

LELAKI itu berpenampilan cukup gaya. Kaos hitam berkerah dengan lambang kodok di bagian saku. Sepatu olah raga. Celana jins. Kulitnya putih. Tubuhnya agak gemuk. Meski tidak sedang sedih, raut wajahnya seperti orang sedih. Nama lahirnya, Muhammad Sukri bin Sulaiman. Tapi dia lebih dikenal dengan nama julukannya dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM): Tengku Diladang. Dia dulu panglima pasukan GAM di wilayah Singkil, Aceh Selatan.

Dia gemar menulis puisi. Di sela-sela percakapan kami, dia kadang melafal bait-bait puisinya. Bersama dia siang itu ada dua lelaki, Herman Jal alias Tengku Man dan Juanda alias Tengku Anwar Amin. Tengku Man tidak banyak bicara dan kadang tersenyum mendengar apa yang dilontarkan Tengku Diladang. Namun, Tengku Anwar berkali-kali menimpali percakapan kami. Suaranya keras, kulitnya hitam dan wajahnya mengesankan ekspresi orang yang selalu marah. Dia tidak terima para bekas panglimanya disamakan dengan bekas panglima perang Timor Leste, Xanana Gusmao. Xanana yang dulu jadi simbol perlawanan rakyat Timor Leste ternyata menciptakan pemerintahan yang korup ketika memimpin negara itu sebagai Presiden.

Mereka bertiga mendapat tugas jaga di rumah Hasan Tiro di Banda Aceh, tapi siang itu mereka tengah beristirahat. Tiro baru saja pulang berobat dari Malaysia. Tiga bulan kemudian, pada 3 Juni 2010 proklamator GAM yang menderita infeksi jantung, gangguan pernapasan dan leukimia itu wafat di rumah sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Tengku Diladang membiarkan Tengku Anwar berceles, baru kemudian melanjutkan bicara. "Nah, inilah contoh yang belum dapat pelatihan FES (Frederich Ebert Stiftung)," katanya, seraya tersenyum.

Demikianlah cuplikan wawancara Linda Christanty dengan Muhammad Sukri bin Sulaiman alias Teungku Diadang. Setelah perjanjian damai ditandatangani di Helsinki, banyak sekali kombatan yang masih meraba-raba arah perdamaian, yang mereka paham selama ini hanyalah senjata dan perang, tak pernah ada pengalaman dalam masa damai. Buku ini berkisah tentang proses transformasi kombatan GAM dari berbagai persepektif.



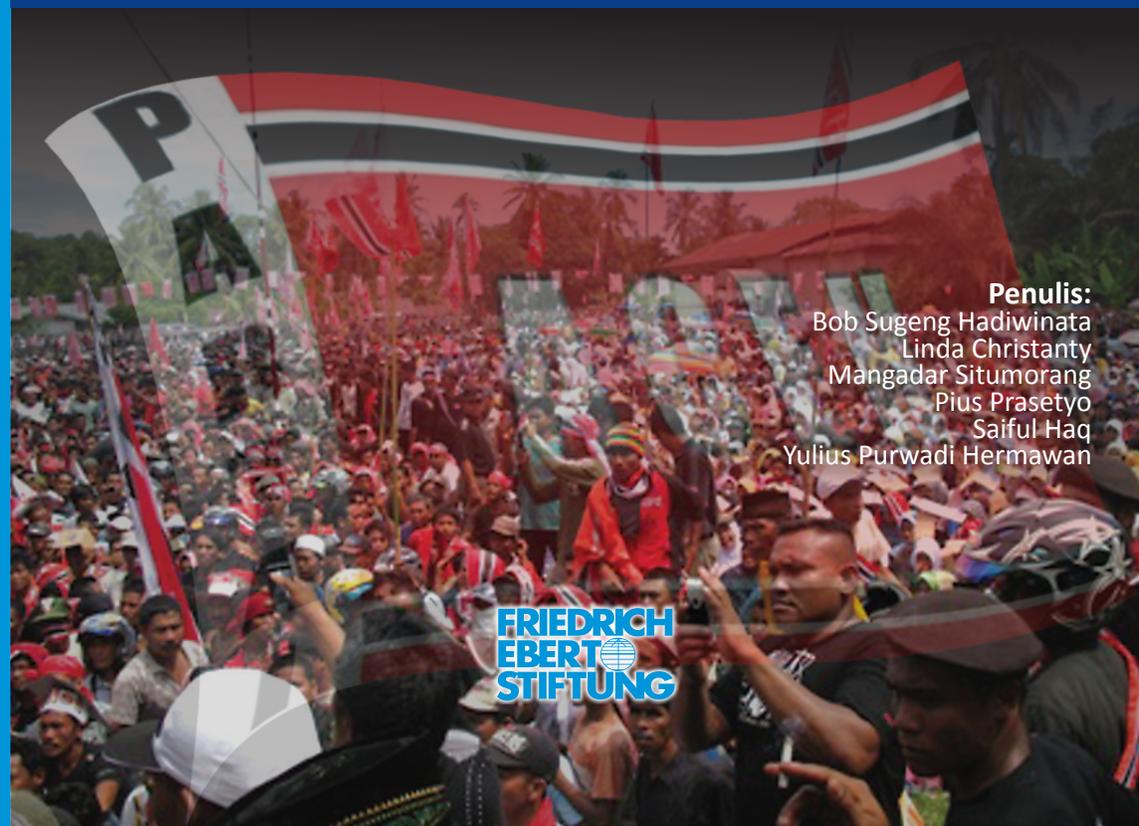
TRANSFORMASI
GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)

Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara
Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh

TRANSFORMASI GERAKAN ACEH MERDEKA



Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh



Penulis:
Bob Sugeng Hadiwinata
Linda Christanty
Mangadar Situmorang
Pius Prasetyo
Saiful Haq
Yulius Purwadi Hermawan





*Ketika kami tidak memiliki senjata di tangan kami,
kami merasa seperti anak ayam tanpa induk semang,
tanpa pengalaman*

(Joni Suryawan, mantan kombatan)

*FES dan Komitmen Mendukung
Perdamaian dan Demokrasi*

untuk info penerbit

Proses perdamaian di Aceh tentu sudah dimulai sejak ditandatangani sejak 15 Agustus 2005 di Helsinki. Namun perjanjian damai diatas kertas tentu membutuhkan tindak lanjut yang bersifat praxis. Tak bisa dipungkiri bahwa bencana Tsunami di Aceh menarik perhatian banyak sekali donor internasional di Aceh. Namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan dalam hal transformasi mantan kombatan di Aceh.

Dengan tidak mengesampingkan pentingnya program rekonstruksi pasca Tsunami di Aceh, FES menganggap bahwa dalam situasi pasca konflik, sektor keamanan (security sector) merupakan simbol kuat dari spektrum konflik yang lebih luas. Sektor keamanan tanpa akuntabilitas dan tanggung jawab akan berpengaruh langsung pada pembangunan dalam bentuk polarisasi komunitas, berkontribusi pada kemiskinan, mendistorsi ekonomi, menciptakan instabilitas dan membekukan pembangunan politik. Pada kondisi inilah, reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform/SSR) menjadi sangat penting sebagai bagian dari strategi pembangunan perdamaian (peacebuilding) dan pencegahan konflik (conflict prevention). SSR diharapkan bisa menyediakan kesempatan untuk membuat ‘lompatan bersih’ dari tradisi represif, dan menyediakan lingkungan yang aman dan terjamin yang memberikan tempat dan kesempatan bagi institusi-institusi politik dan ekonomi untuk tumbuh berkembang

Untuk mencapai tingkat keamanan yang stabil pasca konflik, maka dibutuhkan proses transformasi kombatan GAM menjadi aktor-aktor demokrasi baru di Aceh. Hal ini didasarkan pula pada poin kesepakatan Helsinki yang memberikan ruang berdirinya partai lokal di Aceh.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung upaya ex-combatant untuk mencapai integrasi sosial dan integrasi ekonomi dengan masyarakat lainnya. Setelah program disarmament/decommissioning dan demobilisasi maka program reintegrasi diharapkan mampu membuat ex-combatant menemukan kembali pola hidupnya sebagai masyarakat sipil, program ini berbasis pada individu ex-combatant termasuk jaminan akan kebutuhan dan keahlian untuk melakukan integrasi sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini FES tidak punya tendensi untuk mengkapanyekan ide politik aliran ataupun mendukung partai tertentu. Dalam menjalankan programnya FES sangat konsisten dalam mendukung demokratisasi, kesejahteraan dan kelanjutan perdamaian di Aceh. FES bekerjasama dengan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh (SPD-A) dan Aceh Future Institute (AFI) dalam menjalankan program transformasi ini. FES sangat percaya bahwa proses transformasi GAM tidak hanya dengan merubah cara pandang kombatan GAM tapi juga cara pandang kelompok lain diluar GAM. Hanya dengan itulah reintegrasi yang utuh bisa dicapai, dan perdamaian di Aceh akan abadi.

Jakarta, 12 November 2010

Erwin Schweisshelm

Friedrich Ebert Stiftung
(FES)

Selama lebih dari 80 tahun, Friedrich-Ebert-Stiftung telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan damai dan stabil dan pendalaman pemahaman antara Jerman, Eropa dan Asia. Dampak dari krisis lokal dan regional terhadap situasi global merupakan kepentingan dari negara-negara Eropa, termasuk Jerman.

Fokus dari kinerja FES di Asia Selatan, Tenggara dan Timur berpusat pada promosi pembangunan demokratis dan dimensi sosial dari pembangunan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, dialog internasional telah menjadi semakin penting dalam kinerja FES di kawasan Asia, sama pentingnya dengan dialog antara Asia dan Eropa dan di dalam isu-isu pencegahan konflik.

Friedrich-Ebert-Stiftung memiliki 14 kantor perwakilan di Asia Selatan, Tenggara dan Timur, dan sebuah kantor perwakilan di Singapura untuk menangani isu-isu dalam kawasan. Sejumlah 18 orang pegawai asing dan lebih dari 100 pegawai lokal bekerja di sana. Dalam melaksanakan kegiatannya, FES bekerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah, kota, serikat pekerja, partai politik, gerakan sosial, LSM, media dan lembaga-lembaga ilmiah, serta organisasi-organisasi internasional.

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesian pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia

telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang kami tangani antara lain ialah demokratisasi, *good governance*, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak azasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan *gender*. Sejak 2006, FES Indonesia juga ikut dalam proses perdamaian dan demokratisasi di Aceh.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Bentuk kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Friedrich-Ebert-Stiftung

Indonesia Office

Jl. Kemang Selatan II No. 2A. Jakarta Selatan 12730

Indonesia

Tel. +62 (0)21 7193 711 (hunting)

Fax +62 (0)21 7179 1358

Bakhtiar Abdullah

*Perjuangan untuk menegakkan
marwah bangsa Aceh*



Di hari itu dia tengah menemani dan menjaga Hasan Tiro, orang yang dimuliakannya dan disebutnya “paduka tengku”. Mereka baru saja mengakhiri perjalanan yang melelahkan ke luar kota Stockholm. Tiro sedang dalam masa pemulihan setelah sembuh dari stroke yang dulu. Seorang teman tiba-tiba meneleponnya dan mengabarkan sesuatu telah terjadi di Aceh, lalu memintanya menyalakan televisi. Dia dan Tiro sama-sama menonton siaran itu. Pemandangan yang membuatnya berpikir bahwa Aceh sudah tak ada lagi. Tsunami menghantam kota dan wilayah pesisir Aceh, menenggelamkan daratan dan merenggut ribuan jiwa.

Bakhtiar bertambah panik, karena dia sebenarnya ingin menghindarkan Tiro menyaksikan bencana tersebut. Tiro sebaiknya tidak memikirkan hal yang segawat ini di masa penyembuhannya. Sementara itu dua telepon seluler Bakhtiar terus berdering. Orang-orang menghubunginya untuk meminta penjelasan keadaan Aceh.

“Tapi waktu itu saya tidak bisa menghubungi siapa pun di Aceh. Kontak sempat putus selama beberapa hari,” kenangnya.

“Saya kemudian mengatakan pada orang-orang Aceh yang ada di sini agar menceritakan apa yang terjadi sebenarnya ke pihak luar bahwa mereka putus kontak dan begitu memperoleh informasi, mereka ternyata kehilangan keluarga atau segalanya, jadi mereka ceritakan saja semua itu,” lanjutnya.

Dia dan sejumlah teman di Swedia kemudian ikut mengorganisasi sumbangan untuk korban tsunami Aceh melalui palang merah internasional yang menyediakan kotak tersendiri dan mempersilakannya menulisi kotak itu dengan kalimat “bantuan tsunami khusus Aceh”.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa tsunami memang faktor pencetus perundingan damai di Helsinki,” ujarnya.

Setelah perundingan Tokyo gagal pada tahun 2003 itu, hubungan pemerintah Indonesia dan GAM benar-benar terputus.

“Kami sebenarnya sudah tahu perundingan itu akan gagal. Perunding kita yang dari Banda Aceh ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ini orang yang akan berunding tapi ditangkap,” kata Bakhtiar.

Tsunami membuka ruang perundingan baru.

Perjanjian Helsinki memang menampung sejumlah poin yang diajukan pihak GAM.

“Tapi pelaksanaannya belum banyak yang terwujud. Ini yang juga dialami Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari Helsinki, yang ternyata dihendaki sejumlah pihak untuk direvisi lagi.”

Dia menyebut soal pembebasan tahanan politik dan narapidana politik Aceh yang belum semuanya dibebaskan, tanah dan kesejahteraan bagi bekas GAM serta janda-janda korban konflik yang belum terlaksana dan pembentukan Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tidak juga terbentuk, bahkan dibatalkan status nasionalnya jadi bersifat lokal.

“Kalau Anda ingin tahu seperti apa yang terjadi di balik perundingan itu bacalah buku Damien Kingsbury. Hak Anda untuk membaca buku Farid Husain, tapi apa yang terungkap di buku Damien itu kalau kebenaran tak bisa 100 persen, maka 99 persen ceritanya itu kebenaran,” tuturnya.

Sore itu saya menemui Bakhtiar di kantor Sekolah Pendidikan Demokrasi Aceh (SPDA). Dia akan berada di Aceh selama beberapa hari dan setelah itu kembali ke Swedia, negara yang telah memberinya suaka politik dan tempatnya bermukim selama 28 tahun. Dia menuangkan sendiri teh ke cangkir saya dan menyilakan minum. Dia senang bercerita, tetapi tidak pernah menyela lawan bicaranya.

Dulu Bakhtiar bergabung dengan para pemimpin GAM di Swedia, antara lain karena mereka kekurangan orang yang bisa berbahasa Inggris untuk terlibat dalam aktivitas politik mereka di dunia internasional. Sebelum itu dia bekerja di kantor pos. Dia pernah jadi juru bicara mereka di berbagai lobi, kesaksian dan pertemuan-pertemuan.

Dia belajar tentang politik dan perjuangan langsung dari Tiro.

“Meskipun terus terang saya katakan bahwa saya ini cuma orang suruhannya, bawa tasnya kadang-kadang. Saya ingat sekali apa yang dikatakan paduka tengku, bahwa dia tidak akan menyuruh saya melakukan apa yang tidak pernah dia lakukan.”

Apa bentuk negara yang diinginkan Tiro seandainya Aceh merdeka?

“Negara sambungan dari kerajaan Aceh dulu. Monarki konstitusional yang bermakna kesultanan yang ada hukum.

Bukan perkataan raja itu sendiri yang bisa dibuat sebagai hukum, tapi ada satu majelis yang berkuasa.”

Tiro merujuk pada kesultanan Iskandar Muda yang waktu itu sangat maju di masanya. Kerajaan Aceh waktu itu juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara Barat.

“Di berbatasan antara Belanda dan Jerman, ada satu kota bernama Middelburg. Di situ ada satu gereja yang terbakar dan kemudian didirikan kembali. Yang menarik adalah ada satu prasasti sebesar lemari dari abad ke-16 yang bertuliskan “Di sinilah dimakamkan utusan Raja Aceh Sultan Alaudin Mugayatsyah yang bernama Tengku Abdul Hamid....”

Pihak gereja memakamkan utusan sultan tadi di dalam gereja sebagai penghormatan terhadapnya.

“Dia itu duta besar Aceh. Bisa saja dia dimakamkan di jalanan, tapi karena menghormatinya dia pun dimakamkan dalam gereja. Tidak ada urusan dengan agama dalam hal ini. Tapi inilah tanda baiknya hubungan diplomatic. Waktu itu kita bahkan belum lagi berperang dengan Belanda. Pada 1873 kita baru berperang dengan Belanda. Jadi di situ tanda bahwa kesultanan Aceh itu sudah amat berjaya sebelum lahirnya Indonesia,” tutur Bakhtiar.

Dia menegaskan lagi bahwa negara yang dicita-citakan Tiro adalah negara monarki konstitusional yang Islami. Namun, dia menambahkan, “Tapi juga tidak seperti Islam ala Macan Tamil di Srilangka dan Abu Sayyaf di Filipina.”

Baginya, Perjanjian Helsinki ini merupakan titik permulaan yang penting bagi masa depan Aceh. Meski untuk mewujudkan Aceh masa depan yang baik itu memerlukan waktu, terutama menyangkut perekonomian.

“Tidak usah jauh-jauh, selama 28 tahun saya di Swedia, belum lama ini nilai tukar mata uang crown turun akibat krisis di

Eropa. Apalagi Aceh yang baru akan membangun lagi setelah 30 tahun dalam konflik,” ujarnya.

Pendidikan politik bagi bekas-bekas GAM di Aceh amat dibutuhkan di masa damai untuk menghadapi perjuangan di parlemen yang tidak lagi bertumpu pada senjata ini. Dua bulan sebelum Perjanjian Helsinki, Olof Palme Center atau OPIC mendukung pelatihan tentang demokrasi untuk sekitar 300 orang Aceh di Malaysia. Frederich Ebert Stiftung atau FES juga membuat pelatihan-pelatihan demokrasi untuk para bekas gerilyawan ini.

“Kami juga dan mendiskusikan serta merancang kurikulumnya bersama FES,” katanya.

“Memang tidak mudah menyiapkan para kombatan untuk menjadi politisi misalnya. Tapi itu ada hasilnya dan kita lihat sekarang ada beberapa orang yang di parlemen atau pemerintahan dari pelatihan FES itu. Pendirian sekolah ini (SPDA) ada andil FES,” katanya, lagi.

Hanya ada satu kritik Bakhtiar untuk pelatihan-pelatihan demokrasi yang diselenggarakan FES.

“Ada yang sempat berkata pada saya, kenapa tidak dihadirkan pembicara yang mengajarkan teori demokrasi dari sisi Islam. Karena semuanya dari Barat. Saya pikir, itu masukan juga untuk pelatihan mendatang,” ujarnya.

Bakhtiar menikahi putri Geuchik Umar, penglima pertama dalam angkatan bersenjata GAM dan sahabat dekat Tiro. Geuchik Umar meninggal ditembak tentara Indonesia dalam satu operasi militer yang bersandi “Jaring Merah” pada 1992. Dua saudara ipar Bakhtiar juga gugur dalam konflik.

“Satu bahkan masih di gunung sana. Sudah sempat dicari dan belum ketemu kuburannya untuk dibawa turun dan dimakamkan.

Istri saya juga pernah masuk penjara,” kisahnya.

Namun, baginya itu menjadi sejarah masa lalu Aceh dan keluarga mereka.

“Risiko dari perjuangan untuk menegakkan marwah bangsa Aceh.”

Herman Jal

*Tidak selamanya kita berjuang
dengan senjata* 

Malam itu Tengku Man bermalam sendirian di kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) Singkil. Ketika hampir lelap, tiba-tiba dia melihat kobaran api di depan pintu. Dia langsung bangkit, mencoba menerobos keluar melalui pintu itu. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut membantu Tengku Man memadamkan api. Situasi politik di Aceh menjelang pemilihan umum legislatif memang terus memanas.

“Itulah risiko perjuangan di masa damai ini. Tidak tahu siapa pelakunya. Tapi kita tidak dendam dan kita mencoba bijak,” kenangnya.

Siang itu dia tengah duduk di kedai kopi di Simpang Mesra, Banda Aceh. Tengku Man ditemani Wong Mahli, sekretaris Partai Aceh Subussalam.

“Ancaman-ancaman saya terima juga waktu itu. Kalau dalam bentuk sms (*short message service*) tak terhitung lagi. Sudah seperti sarapan pagi. Isinya lima enam. Isinya, hati-hati kamu. Kami sudah menyediakan granat. Peluru sekian untuk kepala kamu, “ tukas Wong Mahli, menimpali cerita Tengku Man.

Suatu hari Tengku Man dan Wong sedang duduk di warung. Dari kejauhan, mereka sempat melihat orang melempar granat ke rumah Jamaluddin Jabat, ketua PA Subussalam. Granat tak meledak, sedang pelempar granat itu langsung menghilang.

“Tapi cara-caranya itu cara-cara orang terlatih. Kalau di Indonesia, kita sudah tahu siapa,” kata Wong, lagi.

Tengku Man berusia 34 tahun. Nama lahirnya adalah Herman Jal. Dia bertubuh kurus dan berpenampilan sederhana. Dia adalah Wakil Ketua KPA Singkil. Siang itu, seorang mahasiswa yang juga kader PA bergabung dan duduk mengaso bersama mereka, sambil memandangi lalu-lintas di jalan raya.

Meskipun risiko politik tidak ringan bahkan hampir mengorbankan nyawanya, Tengku Man tidak gentar.

“Saya ikut Aceh Merdeka dengan ikhlas. Tahun 2000 saya bergabung dan ikut terjun perang, langsung ke hutan,” katanya.

Pada 2003 dia dan teman-temannya sengaja keluar Aceh untuk mencari logistik. Aceh berstatus darurat militer ketika itu. GAM sedang terjepit. Militer Indonesia telah mengepung basis-basis GAM dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dan berlapis. Dia dan sembilan temannya hanya menghirup kebebasan itu sampai tahun 2004. Mereka ditangkap di kabupaten Tapanuli Tenggara dan dijebloskan ke penjara Sibolga. Dia dan tahanan politik lainnya dibebaskan dari penjara dua bulan setelah pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani Perjanjian Helsinki.

“Saya dapat amnesti dari pemerintah,” tuturnya.

Ada satu peristiwa dari masa kanak-kanaknya yang membekas dalam ingatan Tengku Man, yang kelak menentukan jalan hidupnya.

“Waktu saya masih kelas enam sekolah dasar di Meulaboh. Saya melihat penaikan bendera bintang-bulan di masjid Meulaboh.

Di situ kemudian ada pengepungan dan saya merasa terkejut. Itu tahun 1986. Kejadiannya sesaat,” kenangnyanya.

Setelah dia tumbuh dewasa dan mengetahui lebih banyak tentang sejarah Aceh, dia pun paham bahwa gerakan pengibaran bendera bintang-bulan itu punya tujuan.

“Mereka ingin Aceh jadi negara sendiri.”

Dia hanya belajar sampai kelas dua sekolah menengah pertama. Pasalnya, dia protes terhadap isi pelajaran sejarah yang diajarkan guru di kelas. Dia sangat suka sejarah, tapi bukan sejarah yang berbeda dari apa yang diceritakan orang-orang tua.

“Sejarah Indonesia itu rekayasa,” ucap Tengku Man.

“Iya, misalnya soal G30S itu. Apa benar itu seperti itu ceritanya?” sahut Wong.

Tengku Man ingin perdamaian di Aceh abadi. “Agar impian-impian masa depan kami terwujud,” katanya.

“Iya, tidak selamanya kita berjuang dengan senjata. Ada saatnya berjuang dengan politik. Sebab senjata itu ada jarak tembaknya. Politik kan terus bergulir dan berkembang.” Wong menimpali.

Pada 2006 Tengku Diladang, salah satu panglima GAM, menemuinya di kampung.

“Tengku Diladang mengajak saya ikut pelatihan FES (Frederich Ebert Stiftung). Oke, saya coba ikut. Ternyata apa yang saya dengar di pelatihan itu menambah ilmu saya. Karena perjuangan Aceh untuk demokrasi, ketika saya belajar tentang demokrasi dari FES ternyata nyambung,” katanya, lagi

Dia pernah membaca buku yang ditulis Hasan Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia, Masa Depan Dunia Melayu*.

“ Apa yang Wali Neugara dalam buku itu nyambung dengan pelatihan FES. Kalau dalam politik, berbeda pendapat oke saja. Namanya politik. Tapi kalau dalam perekonomian itu harus saling membantu.” Dia berbicara dengan nada datar dan cepat.

Namun, dia menyatakan bahwa demokrasi di Aceh masih dalam proses. Setelah lima tahun Helsinki, proses itu masih berjalan.

“Dan itu pernah tertuang dalam buku *Demokrasi untuk Indonesia*. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang bersih. Rakyat akan kacau dan kesejahteraan tak akan tercipta tanpa pemerintahan yang bersih. Tapi kalau pemerintahan yang demokratis terbangun, maka ekonomi dan yang lainnya akan terbangun,” ujarnya

Ada sekitar 50 orang yang ikut pelatihan FES saat itu. Perdebatan keras terjadi, terutama ketika menyangkut masalah agama. Bagaimana sikap pemeluk agama yang menganggap agama atau keyakinan orang lain salah, lalu melakukan tindak kekerasan? Ayat-ayat tertentu sering dijadikan pembenaran terhadap kekerasan dan pemaksaan kehendak, yang bertentangan dengan demokrasi.

“Nah, di situ kadang orang jadi tegang. Tapi setelah dijelaskan bahwa agama punya perorangan, sedang demokrasi punya semua, orang jadi mengerti,” kisahnya.

Tengku Man mengambil dompet dari saku celananya. Dia mengeluarkan sehelai potret. Di situ tampak dirinya dan seorang perempuan.

“Ini Mbak Poppy FES. Kenang-kenangan,” katanya. Hampir empat tahun dia menyimpan potret itu dalam dompetnya. Dia bangga mengenal orang yang memberinya ilmu.

Setelah damai, Tengku Man masih belum memiliki aktivitas yang berarti.

“Saya menunggu komando,” katanya. Ternyata sistem komando itu masih membekas juga.

Dia juga tengah merancang program untuk mengatasi banjir di Singkil.

*Untuk hidup yang
lebih bermartabat* 

Di tubuh Joni Suryawan masih bersarang pecahan granat dan proyektil peluru dari sejumlah pertempuran. Dia bercerita sambil tersenyum. Namun, suaranya mendadak tersendat dan matanya mulai berkaca-kaca saat menuturkan kehilangan terbesar yang dialaminya dalam perang. Peristiwa itu terjadi di kampung Menderek, Alur Cincin, Gayo.

“Saya ingat waktu itu sekitar tahun 2001. Korban puluhan, termasuk warga desa. Teman-teman paling dekat saya gugur, kemudian saudara sepupu saya, paman saya dan kawan-kawan sepermainan saya gugur, satu regu pasukan saya gugur,” katanya.

Dia bahkan tak percaya bisa lolos dari maut saat itu. Dengan mereka yang tersisa, Joni terus mundur dan lari ke daerah Blangrakal.

“Dari situlah titik awal kami melanglangbuana dan bertempur hampir di seluruh Aceh,” kenangnya.

Di tahun tersebut tentara Indonesia sudah menguasai Aceh hingga Sumatera Utara.

“Dan mereka berhasil menciptakan kelompok-kelompok masyarakat yang melawan kami. Tiap kali kami melakukan penghadangan, kami harus berhadapan dulu dengan masyarakat dan di sinilah kami harus mundur.” Joni bercerita dengan tenang. Suaranya kadang nyaris tak terdengar.

Dia lahir sebagai anak ketiga dari enam bersaudara pada 22 Maret 1979 di Samalanga. Saat dia beranjak remaja pemerintah Indonesia menerapkan status Daerah Operasi Militer atau DOM untuk Aceh. Kampungnya penuh dengan tentara. Sebagai anak yang belum begitu memahami arti perang, Joni hanya merasakan kurang nyaman. Orangtuanya mulai membatasi ruang gerakannya.

“Membatasi keluar rumah, membatasi ruang lingkup bermain,” katanya.

Di saat bersamaan, konflik rumah tangga mulai mendera orangtuanya. Ibu dan ayahnya kemudian berpisah. Joni pun harus ikut ayahnya meninggalkan Aceh, menuju Bengkulu. Keadaan ekonomi ayahnya mengalami perubahan besar di tempat baru ini, sehingga Joni tak bisa menamatkan sekolah menengah atasnya.

Pada 1998 dia kembali ke Aceh, tepatnya ke Rawaronga, kabupaten Bener Meriah.

Cita-citanya waktu itu hanya satu. Dia ingin bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan ekonomi keluarganya yang hancur akibat perpisahan orangtua.

“Ternyata situasi di Aceh tidak kondusif lagi, karena apa yang dilakukan Jakarta telah membangkitkan dendam-dendam lama di Aceh,” ujarnya.

Akhirnya dia mengalami juga dampak langsung konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dia dipukul tentara yang tengah melakukan *sweeping*. Kejadian itu membuat Joni berpikir lebih serius tentang apa yang tengah terjadi di Aceh.

“Apakah saya tetap menjadi masyarakat biasa atau memilih mendukung pemerintah ataupun saya ikut dalam gerakan perlawanan. Bila saya tidak memilih salah satu di antaranya, maka kami masyarakat tetap akan jadi korban.”

Namun, Ibunya menyarankan Joni pulang ke kampung kelahirannya, Samalanga. Menurut ibunya, keadaan di Samalanga lebih aman. Ibunya juga ingin Joni melanjutkan dan menamatkan SMA-nya. Tapi di kampung ini dia justru mengenal GAM lebih jauh. Alih-alih melanjutkan belajar, dia malah terlibat dalam kegiatan organisasi perlawanan tersebut.

“Kebetulan paman, abangnya Mamak, salah seorang tokoh GAM. Saya sering bertanya apa sih perjuangan GAM itu sendiri dan kenapa bisa muncul. Beliau terangkan semua dan beliau memberi saya beberapa buku yang saya pelajari.”

Dari penjelasan pamannya, Joni mengerti awal mula perlawanan itu tumbuh dan berkembang. Dia kini mengetahui sejarah Aceh di masa lalu. Dia makin paham arti ketidakadilan. Alam Aceh begitu kaya, sedang rakyat banyak yang miskin.

“Saya mulai paham bahwa ini sebuah kewajiban bagi anak bangsa yang memang harus memperjuangkan hak-haknya untuk hidup yang lebih bermartabat,” tuturnya.

Dia meminta restu sejumlah orang-orang tua di kampung untuk ikut berjuang. Setelah itu dia dibaiat (berjanji setia) oleh sejumlah pemimpin GAM.

Joni berada di bawah koordinasi GAM wilayah Linge. Panglima GAM wilayah ini adalah Fauzan Azima, yang

dikenangnya sebagai pemimpin yang baik. Fauzan yang lulusan sebuah universitas di Jakarta itu dianggap Joni berhasil memadukan ilmu pengetahuan dan kemampuan perang dalam memimpin pasukan.

Tugas pertama Joni adalah menjadi mata-mata GAM.

“Kemudian saya ketahuan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Ini tahun 1999 akhir. Waktu referendum itu saya sudah ikut ke Masjid Raya. Waktu itu SIRA (Sentral Informasi Rakyat Aceh) dan GAM masih bersama, tapi saya pilih jadi tentaranya.”

Namun, Joni tidak pernah tahu apa bentuk negara yang diinginkan GAM.

“Seingat saya, apa yang saya dengar adalah kisah tentang sejarah kejayaan Aceh di masa lalu.”

Selama berjuang dia juga membaca pemikiran-pemikiran Hasan Tiro, sang proklamator Aceh Merdeka, melalui internet. Dia membayangkan Tiro sebagai sosok yang cerdas, teguh pada prinsip dan memiliki pengetahuan luas.

“Beliau mencoba menawarkan konsep negara federal kepada Indonesia, tapi ditolak.”

Pada Oktober 2008 Tiro kembali ke Aceh untuk pertama kali setelah hampir 32 tahun memimpin sebuah pemerintahan eksil di Swedia. Joni sempat berjumpa dengan Tiro, meski tidak sempat berbicara. Dia senang bercampur haru, “Rasanya tidak bisa bicara, saking terharunya.”

Sebelum Perdamaian Helsinki disepakati pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005, Joni sudah mendengar kabar bahwa ada upaya penyelesaian damai untuk Aceh. Dia mendengar para pemimpin GAM dan wakil pemerintah Indonesia

tengah melakukan perundingan dengan difasilitasi CMI (Crisis Management Initiative).

Setelah itu, “Pemimpin minta kami mengumpulkan senjata dan atribut militer yang ada. Pemimpin bilang sudah tercapai *win win solution*. Mulai hari ini perjuangan kita tidak lagi mengedepankan pola-pola militer, tapi dengan cara diplomasi, kata pemimpin kami. Ketika proses diplomasi sudah berhasil, maka peran militer tidak ada lagi. Setelah itu kami boleh turun, tapi setahap-setahap, sesuai dengan penarikan pasukan TNI waktu itu,” tuturnya.

Walaupun perdamaian telah terjadi, tak urung Joni dan 14 temannya ditangkap pasukan Brigade Mobil atau Brimob di kampung Singahmul ketika mereka tengah minum kopi di satu kedai.

Mereka diinterogasi dan dimaki-maki, tapi tidak dipukul. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan saat ditanya. Joni dan teman-teman dibebaskan setelah perwakilan GAM di Aceh Monitoring Mission, lembaga yang dibentuk untuk memantau jalannya perdamaian di Aceh, mendatangi kantor polisi tempat para bekas gerilyawan ini ditahan.

Semula Joni tidak tahu apa yang harus dilakukannya di masa damai. Dia terbiasa dengan komando. Kadangkala dia mendengar kabar bahwa akan ada bantuan dana untuk modal hidup para bekas GAM.

“Tapi kapan itu, kami tidak tahu,” katanya.

Akhirnya dia dan 12 temannya memutuskan berkebun cabe dengan pinjaman modal dari orangtua Joni. Di tengah jalan, sejumlah teman mundur. Mereka tidak sanggup bekerja di kebun. Lama-kelamaan upaya sungguh-sungguh Joni dan teman yang masih tersisa menunjukkan hasil.

“Itu juga jadi modal saya untuk naik sebagai anggota Dewan,” katanya.

Joni sekarang wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. Dia mencalonkan diri lewat jalur Partai Aceh, partai yang dibentuk para bekas GAM.

Frederich Ebert Stiftung atau FES merupakan lembaga yang disebutkan telah mendidiknya tentang cara berpolitik di parlemen. Dia benar-benar belajar dari nol.

“Sebelum mendapat pelatihan FES, jangan bayangkan saya seperti sekarang ini. Saya jauh sekali dari saya yang ada sekarang. Menulis saja, saya tidak bisa sama sekali. Ibaratnya, tulisan saya itu seperti cacing kepanasan. Dari pelatihan-pelatihan itu saya belajar tentang membentuk partai, bernegosiasi, melakukan kompromi politiknya. Pendeknya, tentang bagaimana kita mewujudkan keinginan dengan cara-cara yang lebih beradab.”

Pada Agustus 2007 dia diminta bekas gubernur GAM wilayah Linge, Husni Jalil, untuk pergi ke Lhokseumawe, Aceh Utara.

“Saya dan beberapa temann, sekitar 10 orang, disuruh ke losmen Kuta Garam, Lhokseumawe dan waktu itulah kami pertama kali mengikuti training dasar demokrasi,” kenangnya.

Dia kelak mengikuti pelatihan dasar sampai tiga kali. Setelah itu dia terlibat dalam dua kali pelatihan untuk fasilitator. Pelatihan terakhir yang diikutinya adalah pelatihan untuk pelatih.

“Kami kemudian membuat grup yang waktu itu namanya SPD, Sekolah Perdamaian Demokrasi. FES dan Olof Palme Center (OPIC) *men-support* kegiatan SPD waktu itu.”

Dia tidak lagi aktif di SPD setelah terpilih sebagai anggota DPRK.

“Kami melatih hampir seribu orang lebih di seluruh Aceh. Kegiatannya langsung kami lakukan di setiap kabupaten di Aceh, di 23 kabupaten kota. Di antara para lulusan, ada yang jadi anggota Dewan seperti saya. Ada yang masih aktif di SPD. Ada juga yang jadi pengurus partai,” katanya.

Di awal pelatihan yang diselenggarakan FES, Joni merasakan benturan yang cukup keras antara pemahaman militernya dengan teori tentang demokrasi.

“Saya baru satu tahun kemudian bisa menjalankan pola-pola negosiasi ini. Meskipun belum semua kawan sampai saat ini bisa melepaskan cara militernya.”

Ada hal yang paling mengesankannya dari pelatihan-pelatihan itu.

“Pendapat kita itu didengar oleh semua pihak dan apa yang kita sampaikan itu didengar oleh mereka yang ada di ruangan tersebut dan dibahas bersama. Nah, ini yang kurang kami dapatkan di militer. Kita secara batin merasa puas. Jangankan diterima, didengar saja sudah senang.”

Namun, ada hal yang terus membebani pikiran Joni sampai hari ini. Dia menganggap pemerintah belum menunaikan janjinya pada para bekas GAM, termasuk pada mereka yang dulu berjuang bersamanya.

“Dalam MoU tercantum bahwa pemerintah akan mengalokasikan tanah pertanian bagi mantan kombatan terutama bila mereka memang tidak mampu bekerja, terutama bagi mereka yang selama ini mengalami cacat seumur hidup. Dan sampai saat ini, terutama di wilayah kami, saya belum pernah mengetahui di mana lokasi tanah pertanian untuk mereka.”

Joni hampir tak menikmati gajinya sebagai anggota parleman.

“Ketika istri mereka sakit, mereka sampaikan kepada saya, ketika anaknya menjelang masuk sekolah, mereka sampaikan pada saya. Segala macam bentuk keluhan mereka sampaikan dan kami membantu mereka dari mana sumbernya selain dari gaji kami. Gaji kami itulah yang kami pergunakan untuk membantu kombatannya itu, meringankan mereka.” Matanya sekali lagi berkaca-kaca.***

Muksalmina

*Kami percaya senjata tak
menyelesaikan masalah*



“Muksalmina adalah nama saya di GAM. Nama saya yang sebenarnya, Irwansyah,” katanya.

Kami bertemu di lobi sebuah hotel di Banda Aceh. Dia datang bersama seorang lelaki yang hanya duduk diam selama perbincangan kami berlangsung. Barangkali orang ini semacam pengawalnya.

Cara bertutur Muksalmina tenang dan teratur. Posturnya tinggi langsing dan termasuk dalam kategori tampan. Dia sangat antusias membicarakan burung-burung langka. Katanya, seandainya dia diberi izin membiakkan berbagai jenis burung langka di satu pulau, dia akan membuat burung-burung langka di Aceh jadi banyak lagi dan keluar dari kategori langka. Dari pembiakan burung langka yang ditekuninya selama ini, dia memperoleh penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Dia yakin bahwa berjenis-jenis burung unik yang menjadi kekayaan alam Aceh itu kelak dapat mengembangkan pariwisata Aceh.

“Karena untuk menarik orang datang, itu perlu hal-hal aneh,” tuturnya.

Muksalmina lahir sebagai anak ketiga dari 10 bersaudara. Usianya sekarang 37 tahun. Dia memiliki dua anak dan seorang istri.

Sejak tamat sekolah menengah atas Muksalmina mulai ikut Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Tak sampai satu semester kuliah, dia masuk Daftar Pencarian Orang atau DPO militer Indonesia. Dia lantas memutuskan berhenti kuliah serta terlibat penuh dalam GAM. Setelah itu, dia bertugas di Biro Penerangan GAM di Aceh Besar dan juga masuk tim ekonomi organisasi perlawanan ini di Aceh Besar. Pada 2000, Muksalmina diangkat komando pusat GAM untuk memperkuat tim ekonomi mereka. Bersama Irwandi Yusuf, Kamaruddin, Tengku Amni dan Teuku Kamaruzzaman, dia mewakili GAM di AMM, sebuah lembaga pemantau perdamaian Aceh pasca Helsinki. Di antara mereka berlima hanya dia sendiri yang “orang lapangan”.

Kini Muksalmina adalah juru bicara Komite Peralihan Aceh atau populer disingkat KPA, lembaga bekas gerilyawan GAM dan bertujuan membantu memulihkan kehidupan ekonomi anggotanya.

“Saya punya tanggung jawab membuat kombatan bisa hidup, bisa berubah dari pemegang senjata ke sipil biasa. Dari yang dulu pejuang jadi rakyat biasa yang punya tanggung jawab baik terhadap keluarganya dan sebagainya,” tuturnya.

Dia dulu ikut perjuangan bersenjata melawan Indonesia bukan akibat dendam. Saudara-saudaranya tidak ada yang jadi korban militer selama konflik dan sebagian memiliki penghidupan yang baik. Ayahnya wiraswasta di Banda Aceh. Tidak seorang pun yang bergabung dengan GAM.

Awal mulanya, dia mendengar cerita orang dan siaran radio bahwa perlawanan tengah terjadi di Aceh.

“Dari situ, saya menganggap Indonesia melakukan penindasan terhadap orang Aceh. Selain itu, terjadi pembantaian etnis-etnis Aceh, mulai dari DII TII sampai GAM,” katanya.

Dia menganggap pemerintah Indonesia di masa Soeharto sama sekali tidak punya keinginan menyelesaikan konflik di daerah-daerah secara damai dan selalu menyambut tiap protes serta tuntutan rakyat dengan kekuatan angkatan perang.

“Kami percaya senjata tak menyelesaikan masalah. Tapi ketika konflik terjadi dan pemerintah menggunakan senjata, kami melayaninya. Senjata itu kami gunakan untuk membela rakyat dan untuk mempertahankan diri.”

Perang itu ternyata bisa berakhir. Menurut Muksalmina ada sejumlah faktor pencetus perdamaian di Aceh, antara lain tsunami dan kesadaran kedua pihak, GAM maupun pemerintah Indonesia, yang telah sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan bersenjata tidak menyelesaikan masalah.

Tapi Perjanjian Helsinki ternyata tidak menyelesaikan semua masalah juga. “Pasti ada poin yang merugikan dan menguntungkan. Di mana-mana yang namanya perjanjian dua pihak pasti begitu,” ujarnya.

Ada sekitar 50 ribu orang yang mendukung GAM, termasuk sipil dan simpatisan. Hanya 3000 orang yang memperoleh dana reintegrasi untuk memulai modal hidup yang baru di masa damai. Muksalmina sendiri tidak tahu dari mana angka 3000 itu muncul, meski dia yakin hal itu sudah dibicarakan di tingkat para pemimpin yang berunding.

Ketika Irwandi terpilih sebagai gubernur Aceh pun dia tidak langsung bisa mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.

“Penyebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ada waktu itu bukan dari unsur-unsur masyarakat yang memikirkan masa depan rakyat Aceh,” kata Muksalmina.

Kesempatan untuk mengubah situasi ini terbuka saat partai-partai lokal Aceh turut serta dalam pemilihan umum tingkat daerah atau Pilkada.

Tapi persoalan lain muncul. Kemampuan politik para calon legislatif tak memadai. Selain itu, pemikiran dan sikap bekas gerilyawan di masa perang harus berubah jadi sosok politikus yang mampu memahami kebutuhan orang banyak dan menyelenggarakannya. Sistem komando harus berubah jadi dialog yang egaliter dan transparan. Pengetahuan tentang sistem politik dan demokrasi menjadi penting bagi mereka, sehingga pendidikan yang diselenggarakan Frederich Ebert Stiftung (FES) sangat penting.

“Saya berharap pendidikan demokrasi ini diselenggarakan lagi oleh FES, karena sangat berguna. Apalagi sekarang Aceh akan menyambut Pilkada lagi. Calon-calon ini harus disiapkan.”

Muksalmina diam sejenak dan berkata lagi, “Lebih jauh lagi, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca perang ternyata tidak hanya meliputi kebutuhan fisik, melainkan juga menyangkut pendidikan dan ilmu pengetahuan,” katanya.

Kita tidak mengajarkan aliran politik tertentu di sini



Ruang kerjanya agak panas, meski pendingin ruang menyala. Dia menyilahkan tamunya duduk, lalu menawari minum. Di meja kerjanya bertumpuk buku dan berkas.

Rambutnya telah memutih. Umurnya menjelang 70, tapi gerak-geriknya masih gesit. Nur Djuli dulu salah satu dari tim perunding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Kini dia ketua Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh (SPDA).

Nama belakangnya adalah nama kampung kelahirannya, yang kini masuk dalam wilayah kabupaten Bireun. Saat dia belajar di kelas satu sekolah menengah pertama terjadi pemberontakan Darul Islam di Aceh. Dia kemudian pindah ke Jakarta, ikut abangnya.

Ketika belajar di sekolah menengah atas, Nur dan enam teman dekatnya rajin melatih kemampuan berbahasa Inggris mereka dengan berbicara dalam bahasa itu setiap hari.

“Barangsiapa yang tidak berbahasa Inggris akan kena denda. Ada teman yang nilai bahasa Inggrisnya 9, 10, tapi tidak bisa berbicara,” katanya, tertawa.

Kelak latihan ini amat berguna. Dia pernah diterima bekerja di maskapai penerbangan Rusia Aeroflot, karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris.

Di Jakarta dia kuliah di Fakultas Sosial Politik, Universitas Indonesia. Namun, konfrontasi Indonesia-Malaysia waktu itu membuat Nur ikut aksi “Ganyang Malaysia” sebagaimana anak-anak muda seusianya. Presiden Sukarno menyerukan mobilisasi umum untuk mendukung rakyat Kalimantan Utara menolak bergabung dengan Malaysia yang dibantu Inggris. Perang terjadi di perbatasan kedua negara.

“Dulu kita itu bersama tentara, kita berjalan di samping tentara, sukarela, baris-berbaris, tentara itu sahabat kita waktu itu,” kenangannya.

Kuliahnya putus di tengah jalan. Dia diminta abangnya, Yakub, berangkat ke Amerika. Yakub tinggal di sana. Dulu dia ikut berjuang melawan Belanda untuk republik dan berteman dekat dengan Chairul Saleh dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Di usia 16 tahun Yakub sudah hijrah ke negara itu.

Nur tidak berhasil menjejakkan kaki di Amerika. Ketika dia tiba di Singapura, Kedutaan Besar Indonesia telah diobrak-abrik para demonstran. Dia melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur.

“Di Kuala Lumpur ini semua pelarian kumpul. Ada orang-orang PSI, Masyumi, Darul Islam, segala macam. Saya jumpa Des Alwi di sana.” Dia tertawa.

Des Alwi asal Banda Neira dan dikenal sebagai putra angkat Muhammad Hatta, bekas wakil presiden Indonesia yang pertama.

Abang Nur, Yakub, dulu juga dekat dengan pemerintah Malaysia.

“Dengan perdana menteri pertama Malaysia, Tuanku Abdulrahman,” ujar Nur.

Setelah itu dia pergi ke Perancis dan menamatkan kuliah jurnalisinya di sana. Saat dia kembali ke Malaysia, konfrontasi hampir berakhir. Dia kemudian menikah dan mencurahkan perhatian untuk istri serta anak-anaknya.

Suatu hari dia berjumpa Jaffar Shidiq Hamzah, sesama orang Aceh. Jaffar seorang pengacara. Dia bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Medan. Mereka saling berbagi cerita tentang Aceh dan juga berbagi duka cita. Jaffar tengah menangani kasus pembakaran delapan orang GAM yang ditahan di penjara di Medan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan kedelapan orang ini dibunuh oleh tahanan kriminal yang tak suka pada pemberontak. Tentu saja, ini penjelasan yang tak masuk akal. Jaffar kemudian hilang dan ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa.

“Tapi saat itu saya belum benar-benar terlibat dalam politik,” kata Nur.

Suatu hari Malik Mahmud, perdana menteri GAM, membutuhkan orang yang mengerti tentang diplomasi internasional untuk dilibatkan dalam perundingan mereka di Jenewa.

“Jadi saya dipanggil membantu, meski saya juga tahunya sedikit-sedikit,” katanya, lagi.

Hal ini terus berlanjut sampai ke Helsinki.

Tim mereka pun diperkuat oleh Damien Kingsbury, dosen di sebuah universitas Australia yang mengerti soal diplomasi.

“Kami belajar cara berunding dan strategi dari dia. Dia bilang, jangan sekali-kali meninggalkan sidang lebih dulu, biarkan lawan yang pergi dulu. Dia juga bilang, ketika sidang mau ditutup, usahakan kami bicara yang terakhir. Maksudnya kalau perundingan ini gagal dan dilanjutkan kemudian, kita akan memulai *where we left off, we left off* dengan *your last word*, katanya.”

Tak bisa dipungkiri bahwa tsunami merupakan pencetus utama perundingan di Helsinki.

“Waktu itu kita nggak bisa berpikir lain. Apa pun, bagaimana agar rakyat ini bisa menerima bantuan. Kita diminta gencatan senjata, saya nggak mau. Di Malaysia misalnya, banyak barang bantuan tak bisa masuk. *Fresh food* sudah membusuk. Cuma waktu itu, kita sembunyikan kepanikan ini.”

Kedua pihak, Indonesia dan GAM, sepakat kata “otonomi”, “referendum” dan “merdeka” tidak disebut-sebut. Tapi perundingan itu sempat tegang lagi.

“Rupanya Hamid (Awaluddin) ditekan TNI dan dia kembali lagi berkata bahwa kami harus terima otonomi. Ahtisaari kemudian yang mengingatkan tentang kesepakatan semula.” Seingat Nur saat itu Hamid tengah tersangkut tuduhan korupsi, sehingga TNI memanfaatkan situasi tersebut untuk menekannya.

Menurut Nur, Perjanjian Helsinki merupakan kemenangan bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya Aceh secara resmi dan di forum internasional menyatakan sebagai bagian dari Indonesia.

“Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Indonesia memberi terlalu banyak, itu tidak benar. Itu Gus Dur yang mengatakan. Sebenarnya Gus Dur yang memberi lebih banyak. Dalam CoHA itu malah seperti referendum, bahkan tidak ada penghancuran senjata. Karena di situ Aceh tidak pernah menyatakan bagian dari Indonesia dan hanya sepakat pada pembentukan sebuah pemerintahan yang demokratis,” tuturnya.

Namun, dia khawatir isi Perjanjian Helsinki itu tidak dilaksanakan Indonesia.

“Aceh akan bilang Indonesia nipu lagi. Kenapa kami dulu berontak? Karena kami menganggap Daud Beureuh bodoh, bikin

perjanjian kosong. Jadi kalau sekarang anak-anak yang umurnya 12 tahun, 15 tahun melihat ayahnya dibunuh atau rumahnya dibakar, nanti sudah umur 25-26 tahun mengatakan kami semua bodoh karena melakukan perjanjian yang tak bisa dijalankan. Dari berapa belas undang-undang yang dibutuhkan untuk melaksanakan MoU, baru dua undang-undang dibuat. UU Pemilu dan partai lokal.”

Sebenarnya kekuatan GAM di awal pembentukannya tidak seberapa.

“Hanya 80 orang GAM di gunung dengan 20 senjata. Tapi Soeharto tidak menggempur mereka habis-habisan. Soeharto punya strategi lain. Dia sengaja mengumumkan ada pemberontakan GAM yang begitu kecil dan setelah itu diumumkannya DOM. Tujuannya untuk membuka jalan transmigrasi. Jadi waktu itu dengan World Bank, lapangan terbang diperbesar,” katanya.

Nur juga mengeritik sikap Jakarta yang enggan mengucurkan dana reintegrasi lebih banyak bagi bekas GAM dan korban konflik.

“Coba pikirkan sudah berapa triliyun untuk perang dan berapa jiwa manusia hilang. Ini tidak sampai 20 persen dari anggaran perang. Kenapa pemerintah pusat begitu kikir untuk perdamaian. Artinya, biaya perdamaian ini sangat murah,” katanya, lagi.

Dia menyebutkan bahwa masalah utama orang Aceh kini adalah masalah perut.

“Kalau bahasa Acehnya, orang kenyang takut mati. Yang nggak takut mati itu, orang lapar.”

Dia lantas bicara tentang para bekas GAM.

“Mereka masuk hutan umur 20, keluar umur 30 sampai 40. Keahliannya ya nembak orang. Disuruh gali got, nggak mau. Saya

bekas komandan, katanya. Disuruh kerja lain, nggak punya *skill*,” ujarnya.

Namun, SPDA, yang dulu bernama SPD, tidak berkonsentrasi di bidang pengembangan ekonomi.

Mereka menyelenggarakan pendidikan tentang demokrasi untuk para bekas GAM.

“Kami memanggil para panglima ke Kuala Lumpur dan dibiayai Olof Palme Center, itu sebelum FES (Frederich Ebert Stiftung),” kisahnya.

“Begitu menandatangani perjanjian, saya langsung ke Ahtisaari. Saya katakan bahwa saya bekerja dan membantu perjuangan. Nah, sekarang tak mungkin saya bekerja karena harus berkonsentrasi membantu Aceh. Jadi akhirnya diberikan jalan berhubungan dengan Olof Palme Center. Tapi ketika Sosial Demokrat di Swedia kalah, lembaga ini tak bisa lagi membantu. Dari situlah masuk FES.”

Pembentukan SPD didanai FES.

“Tapi ide pembentukan SPD ini sudah kami pikirkan sebelum itu. FES juga membantu pelatihan-pelatihan kami.”

Lulusan sekolah ini lebih dari dua ribu orang.

“Kepala sekolah kita dulu Abdul Manan, bekas gubernur GAM Sabang. Sekarang dia jadi ketua DPRK Sabang.”

Dia optimistis terhadap para lulusannya.

“Kalau kita lihat komentar mereka di akhir pelatihan, mereka mengatakan bahwa dulu jangankan jadi anggota DPR, bicara di depan umum saja tidak berani. Jadi itu positif sekali. Kita tidak mengajarkan aliran politik tertentu di sini. Tapi politik itu ada spektrumnya. Ada yang kiri, tengah, agama, nasionalis.”

Sadiah Marhaban

*Saya menangis
waktu tanda tangan* 

Dia bergabung dengan Sentral Informasi Rakyat Aceh atau SIRA pada 1998. Organisasi yang terdiri dari anak-anak muda dan mahasiswa ini menggerakkan demonstrasi terbesar di Indonesia dan memusatkan massanya di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Warga datang dari berbagai kota dan kabupaten di Aceh. Jumlah massa mencapai satu juta orang pada 1999 itu. Mereka hanya punya satu tuntutan: referendum bagi Aceh. Orang-orang di Aceh ini terilhami oleh referendum di Timor Leste yang berujung pada kemerdekaan negeri tersebut dari negara Indonesia.

“Kita ingin konflik Aceh diselesaikan dengan referendum,” kata Sadiah Marhaban.

Dia menerima saya di ruang tengah kantornya. Di dinding depan kantor itu tercetak nama lembaganya, SPDA atau Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh.

“Semula tidak banyak yang tahu tentang situasi Aceh, termasuk di dunia internasional. Kamilah yang mensosialisasikan kondisi HAM (hak asasi manusia) di Aceh dan apa sih caranya

agar Aceh ini bisa dilihat sebagai *one of the conflict area*, bukan hanya Timor, bukan hanya Papua.”

Setelah dua tahun berkampanye soal Aceh, SIRA memperoleh banyak simpati.

“Kalau GAM yang bersuara, mereka itu bersenjata dan dianggap the rebel group. Kalau SIRA itu sipil, mahasiswa, masih muda. Jadi lebih mudah diterima oleh kelompok-kelompok yang netral di luar negeri. Meskipun di lapangan SIRA berkolaborasi dengan GAM. Misalnya, ada kasus pembantaian Tengku Bantaqiah dan santrinya, atau kasus Bumi Flora, itu lebih cepat direspon kalau dilakukan kelompok sipil.”

Sadiah dan teman-temannya mulai mendirikan konsulat di berbagai negara.

“Banyak yang menertawakan, tapi kami waktu itu menganggap Aceh memang sudah merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

Mereka mengibarkan bendera SIRA dan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika. Mereka menyewa kantor di Washington DC, ibukota negara itu. SIRA juga bekerjasama dengan East Timor Action Network untuk mengadakan seminar, lokakarya dan konferensi internasional. Selain di Amerika, mereka membuka konsulat di Sydney, Australia dan New Zealand. Kekuatan mereka adalah jaringan mahasiswa Aceh yang ada di luar negeri.

“Tugas saya itu berkeliling. Jadi itu kami lakukan dari tahun 2000 sampai 2003,” kenangnya.

Dia membeberkan operasi militer dan kekerasan yang dilakukan TNI, polisi maupun Brigade Mobil atau Brimob.

“Tiap dapat informasi dari teman SIRA yang ada di lapangan, saya langsung forward dan menyebarkannya. Jadi intinya adalah

network. Inilah kelemahan teman-teman yang ada di Papua, tidak membangun jaringan yang kuat,” katanya.

Pada 2003 Sadiah melakukan hal yang disebutnya “agak gila”. Dia mencoba mendekati diri pada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang mereka.

“TNI begitu banyak di Aceh, tapi kita nggak tahu apa-apa tentang mereka.”

Caranya? Dia bekerja untuk media asing. Tiap media asing pasti mewawancarai TNI. Akhirnya Sadiah dipercaya militer Indonesia untuk mengantar wartawan media cetak dan elektronik yang hendak bertemu mereka. Selama hampir 10 bulan, Sadiah bekerja di pihak “musuh” dan dia berhasil memperoleh informasi tentang siapa saja orang-orang sipil yang jadi target TNI. Dia juga kini paham bahwa siapa saja dicurigai TNI sebagai musuh.

“Bahkan penjual di warung,” katanya.

Suatu hari penyamarannya terbongkar, sehingga dia harus lari ke Amerika. Rumahnya di Jakarta digeledah aparat. Mereka menangkap Irwandi Yusuf, salah satu tokoh GAM dan kini gubernur Aceh, yang sedang menginap di situ. Dokumen-dokumen dalam komputer Sadiah disita militer. Irwandi langsung diterbangkan dengan helikopter ke penjara di Aceh.

Berbagai perundingan terjadi, tapi perang tidak juga berakhir. Setelah perundingan di Tokyo gagal pada 2003 dan tim perunding GAM di Aceh dijebloskan ke penjara, tidak ada lagi upaya pihak tertentu untuk mendekati pemimpin GAM di Swedia dan menawarkan kesepakatan dengan mereka. Akhirnya bencana tsunami datang dan mempercepat proses perundingan baru antara Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, yang kali ini ditengahi Martti Ahtisaari dari CMI (Crisis Management Initiative).

Ketika itu tekanan dunia internasional pun luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Lembaga kemanusiaan dan donor sukar masuk ke Aceh, karena Aceh masih berstatus Darurat Militer. Padahal korban bencana memerlukan penanganan segera.

“Mereka ingin supaya Aceh ini ada solusi supaya mereka bisa menyalurkan bantuan kemanusiaannya.”

Sadiah terlibat pada putaran kedua perundingan itu.

“Karena perunding yang lain masih di penjara, seperti Tengku Amni, Tengku Kamaruzzaman, Tengku Ibrahim Tiba. Jadi untuk mendatangkan orang dari Aceh itu risikonya cukup tinggi. Dilibatkanlah saya. Alasannya? Mungkin karena saya tahu betul tentang kondisi di lapangan, karena saya pernah juga di hutan. Kemudian sayalah orang yang paling terakhir berada di Aceh, karena saya baru hengkang dari Aceh itu 2003. Selain itu, posisi saya juga di luar negeri dan kebetulan saya perempuan.”

Perdana menteri GAM, Malik Mahmud, meminta Sadiah masuk dalam support group. Tapi dia tidak sendirian di situ. Munawar Liza Zainal yang kini walikota Sabang dan Tengku Hadi dari Jerman juga terlibat. Jumlah seluruh anggota tim perunding GAM waktu itu sembilan orang: Sadiah, Pak Malik Mahmud, Dr Zaini Abdullah, Nur Djuli, Nurdin Abdurrahman, Munawarliza, Bakhtiar Abdullah, Tengku Hadi dan Damien Kingsbury.

“Sengaja dipilih yang ada di luar, karena khawatir akan keselamatan. Karena tidak ada yang yakin ini akan berumur panjang. Karena melihat kegagalan pada saat Jenewa kemudian juga Tokyo. Jadi kita menganggap Helsinki sebagai is another six months story-lah. Jadi untuk mengamankan kawan-kawan yang ada di daerah, kita sepakat untuk tidak mengundang mereka,” tutur Sadiah.

Sebelum perundingan di Helsinki berlangsung, Sadiah dan orang-orang GAM sudah dua kali bertemu di Swedia. Pertemuan mereka didanai Olof Palme Center (OPIC).

“Uang mereka tentu dari Partai Sosial Demokrat dan dari pajak-pajak orang Swedia. Mereka mengundang CSO (Civil Society Organization), aktivis dari Aceh dan dari mana-mana untuk sharing.”

Pertemuan itu juga membahas bagaimana seandainya terjadi perundingan dan bagaimana dengan keselamatan aktivis.

Kegagalan perundingan sebelumnya, yang difasilitasi Henry Dunant Center (HDC), menurut Sadiah, terletak pada momentum. CMI hadir di waktu yang tepat.

“Selain faktor tsunami, upaya perdamaian juga sudah terjadi berkali-kali. Seandainya kita masih di langkah pertama, saya tidak yakin juga bisa mencapai ini sekarang. Jadi waktu CMI itu masuk, kita komprominya jauh lebih tinggi.”

Topik yang paling sulit saat itu, menurut Sadiah, adalah soal pembentukan partai politik lokal, calon independen dan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.

Namun, “KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) itu misalnya, tidak terlontar dari mulut GAM atau TNI, tapi lebih diinisiatifkan CMI untuk ke depan. Tapi kalau pengadilan HAM ada kita singgung. Artinya, pihak GAM maupun TNI tidak bisa luput. GAM juga sadar akan risikonya.”

Dalam perundingan tadi pemerintah Indonesia juga menawarkan pembicaraan tentang syariat Islam. Namun, GAM menolak. Sebab tujuan perjuangan GAM adalah pembebasan nasional, tidak berkaitan dengan agama.

“Pak Malik, Pak Nur Djuli dan lain-lain mengatakan bahwa tidak pernah ada permasalahan agama di Aceh, karena konflik kita memang bukan konflik agama,” katanya.

“Sehingga saya kaget juga ketika di RUU PA (Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh) itu tiba-tiba penjabarannya sudah begitu luas. Nah, kita nggak bisa salahin juga. Karena GAM pada waktu itu tidak ada di sini dan belum berkuasa. Waktu konflik, tahun 2000-2001 itu kita udah tahu mau dibikin kayak di Poso juga, FPI dan Laskar Jihad ini mau dimasukkan ke Aceh,” lanjutnya.

Setahu Sadiyah, syariat Islam diterapkan di masa pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid.

“Kemudian dikuatkan lagi oleh Megawati. Megawati kan dibeking militer. Karena mereka nggak tahu cara mengontrol Aceh di luar kekuatan militer, maka Megawati bergantunglah dengan syariah itu. Inilah satu-satunya yang bisa mengisolasi Aceh dari dunia Barat. Nah, waktu itu kan orang Aceh nggak punya suara apa-apa.”

Keanehan lain juga terjadi. Pemilu 2004 diboikot. Tapi partai-partai nasional tetap memperoleh suara dan para anggota dewan tetap dilantik.

“Pada saat itu PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional) yang kuat. Golkar ada, tapi yang kuat saat itu PKS dan PAN. Padahal dulu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang kuat dan selalu menang di Aceh. Itu permainan politik Jakarta.”

Meski GAM sepakat damai dengan Indonesia, Sadiyah sama sekali tidak puas dengan isi Perjanjian Helsinki.

“Saya termasuk yang menangis waktu tanda tangan. Seharusnya kami harus punya waktu yang lebih lama dan harusnya

punya tim yang lebih kuat. Harusnya kami punya nilai tawar yang lebih tinggi. Yang paling saya sesalkan, jumlah TNI masih sangat besar di Aceh, kemudian tidak jelas wewenangnya. “

Dia berharap perdamaian ini akan langgeng.

“Jangan setelah kekuasaan diambil oleh GAM, kemudian semena-mena terhadap rakyat lagi. Tapi ini kan contoh klasik gerakan perlawanan di seluruh dunia. Kalau yang melawan itu sudah menjadi penguasa, maka mereka akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh musuhnya dulu.”

Itulah sebabnya dia dan teman-temannya mendirikan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh atau disingkat SPDA. Pembentukan sekolah ini tercetus setelah mereka membuat pertemuan dengan Olof Palme Center (OPIC) dan Frederich Ebert Stiftung (FES) di Sabang. Semula namanya, Sekolah Perdamaian dan Demokrasi atau SPD.

“Karena transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik itu bukan hal mudah.”

Namun, cita-cita mulia itu tidak mudah dicapai.

“Pembentukan SPD ini dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ingin GAM bangun. Sedangkan kita di sini ingin membangun demokrasinya, bukan melanggengkan kemiliterannya. Mungkin mereka konsepnya ingin melanggengkan kemiliterannya, tapi berbungkus demokrasi.”

Friksi itu makin tajam waktu Partai Aceh (PA) berdiri dan puncaknya, Pemilu legislatif pada 2009 lalu.

Menurut Sadiyah, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi terbesar terhadap legislator partai lokal datang dari SPD.

“Karena pada saat waktu itu SPD kerja sama dengan FES dan FES mendanai beberapa kali training dan itu sangat

bermanfaat sekali untuk para kombatan ini. Untuk menyiapkan dia masuk ke partai, dari partai dia menjadi calon DPRK. Kalau saya pikir, DEMOS juga banyak kontribusinya untuk demokrasi, yang waktu itu menjalin kerja sama dengan FES dan juga dengan SPD.”

Sadiah bermimpi suatu hari SPD atau yang kini bernama SPDA menjadi institut resolusi konflik.

“Nah, perdamaian dalam proses lima tahun ini baru fase pertama. Fase kedua itu setelah 10 tahun, yang nanti baru bisa kita lihat apakah yang kita tempel ini lengket. Karena sekarang kan kita sedang dibuai dengan uang, proyek, dan sebagainya, sehingga kita tak bisa melihat celah untuk membangun demokrasi itu lebih kuat. Bagaimana ada oposisi yang sehat di Aceh.”

Taufik Abda

*Orang Aceh jadi sibuk
ngurus baju saja, soal khalwat* 

Dia lahir di Samalanga, Aceh Utara, yang kini masuk dalam wilayah kabupaten Bireun. Usianya, 36 tahun. Dia mulai berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Itu pula awal mulanya terlibat di gerakan politik.

“Dulu HMI ada training advokasi. Tapi substansinya adalah bagaimana mendemonstrasi, bahkan belajar tentang kontraindikasi segala dan macam-macam lagi,” kisah Taufik Abda.

Saat reformasi pada 1998, dia tengah berada di Jakarta. Dia menyaksikan betapa mudahnya waktu itu orang berdemonstrasi ke gedung DPR RI maupun MPR RI. Dia sendiri terlibat demonstrasi mahasiswa pertama kali dengan isu yang menurutnya elitis, yaitu anti KKN (korupsi-kolusi-nepotisme).

Taufik juga bergiat di jaringan pers mahasiswa yang lumayan kuat saat itu.

Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau pun diadakan pada 1999. Kongres ini memutuskan untuk mengkampanyekan isu referendum bagi Aceh dan membentuk SIRA.

“Kami menganggap referendum ini isu damai, demokratis, dan itu perjuangan tanpa menggunakan senjata. Kita anggap referendum merupakan bagian dari instrumen demokrasi,” ujarnya.

Dia bahkan sempat berpidato di rapat GAM, menjelaskan tentang referendum.

“Dulu banyak GAM tak setuju referendum. Tapi Tengku Abdullah Syafii (panglima GAM) itu mendukung. Pokoknya, katanya mau didukung anak-anak kita ini. Intelijen tak menyangka akan seperti itu aksinya. Kami bahkan minta izin resmi dan diberi izin. Ternyata sejuta massa yang datang,” lanjutnya.

Pada 2003, dia hijrah ke Jakarta. Megawati Soekarno memberlakukan Darurat Militer di Aceh.

“Jadi waktu Blang Bintang lagi dijatuhi bom itu, saya berkomunikasi dengan Amnesti (Internasional) untuk mengevakuasi kawan-kawan.”

Di tahun yang sama, dia dan teman-temannya mendirikan Solidaritas Aceh Papua atau SAP.

“Di situ masuk teman-teman Partai Rakyat Demokratik (PRD), Yusuf Lakaseng waktu itu. Karena dia jadi koordinator Solidaritas Gerakan untuk Rakyat Aceh (SEGERA) waktu itu,” kenangnya.

Dia bicara sambil makan. Tidak banyak pengunjung malam itu di satu restoran di kawasan Neusu, Banda Aceh. Taufik tidak punya waktu panjang. Dia harus berangkat ke satu tempat.

Dia Dewan Pengurus Pusat Partai SIRA salah satu partai lokal Aceh. Namun, partainya gagal meraih lima persen suara dalam Pemilu legislatif tahun lalu. Artinya, tidak ada kesempatan lagi bagi Partai SIRA untuk ikut serta di Pemilu berikutnya.

Menurut Taufik, perdamaian belum mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat.

“Dulu waktu kita menuntut pisah dari Indonesia, landasannya, bukan hanya masalah historis dan identitas Aceh. Tapi ada kekerasan militer di sini. Artinya, sekarang masyarakat berharap. Dulu yang memberontak sekarang berkuasa. Nah, ternyata harapan dan kenyataan tidak sejalan. Atau mungkin lupa. Nah, itu yang tidak kita harapkan.”

Di tengah situasi semacam ini penerapan syariat Islam mengheboh.

“Yang ngomong syariat itu pemerintah Indonesia Kemudian ulama dimanipulasi, karena mereka nggak mengikuti kronologisnya, seperti bagaimana sampai ada penerapan syariat itu. Ulama diprovokasi. Karena ini kan bagian dari politik, bukan agama murni. Bagian dari kebijakan,” tuturnya.

Siapa yang memprovokasi para ulama itu?

“Waktu qanun jinayah kemarin, yang bersikeras itu PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Yang bersikeras memasukkan mahir baca Alquran untuk syarat jadi calon eksekutif itu juga mereka. Nah, orang-orang lain nggak berani nolak, karena nanti jadi tidak populer. Hebat mereka memang. Karena mereka mendesak hal tersebut di area terbuka. Sehingga siapa pun yang menolak kan jadi tidak populer,” katanya.

“Gubernur (Irwandi Yusuf) aja yang bandel. Dia nggak mau teken qanun jinayah. Karena dia nggak pernah memasukkan substansi itu, soal hukuman mati itu. Gubernur dimaki macam-macam, tapi dia bandel aja. Sebab dia tahu bahayanya kalau hukum ini sampai diterapkan,” katanya, lagi.

Para pendukung syariat menganggap siapa saja yang berbeda pendapat dengan mereka sebagai anti Islam. Mereka juga melakukan pembunuhan karakter terhadap yang bersangkutan.

Taufik mengusulkan pembentukan lembaga pengkajian Islam atau lembaga dakwah, yang penggeraknya adalah orang-orang yang punya cara pandang terbuka dan maju.

“Mungkin FES (Frederich Ebert Stiftung) bisa terlibat, meski nanti kerjasama dengan lembaga tertentu yang mengurus itu,” ujarnya.

Akibat pelembagaan syariat, “Orang Aceh jadi sibuk mengurus baju saja, soal khalwat. Isu-isu soal korupsi nggak muncul. Isu kesejahteraan tidak muncul.”

Muhammad Sukri bin Sulaiman

*Saya bikin puisi
"Pohon Bunga Demokrasi"*



Lelaki itu berpenampilan cukup gaya. Kaos hitam berkerah dengan lambang kodok di bagian saku. Sepatu olah raga. Celana jins. Kulitnya putih. Tubuhnya agak gemuk. Meski tidak sedang sedih, raut wajahnya seperti orang sedih. Nama lahirnya, Muhammad Sukri bin Sulaiman. Tapi dia lebih dikenal dengan nama julukannya dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM): Tengku Diladang. Dia dulu panglima pasukan GAM di wilayah Singkil, Aceh Selatan.

Dia gemar menulis puisi. Di sela-sela percakapan kami, dia kadang melafal bait-bait puisinya. Bersama dia siang itu ada dua lelaki, Herman Jal alias Tengku Man dan Juanda alias Tengku Anwar Amin. Tengku Man tidak banyak bicara dan kadang tersenyum mendengar apa yang dilontarkan Tengku Diladang. Namun, Tengku Anwar berkali-kali menimpali percakapan kami. Suaranya keras, kulitnya hitam dan wajahnya mengesankan ekspresi orang yang selalu marah. Dia tidak terima para bekas panglimanya disamakan dengan bekas panglima perang Timor Leste, Xanana Gusmao. Xanana yang dulu jadi simbol perlawanan rakyat Timor Leste ternyata menciptakan pemerintahan yang korup ketika memimpin negara itu sebagai Presiden.

Mereka bertiga mendapat tugas jaga di rumah Hasan Tiro di Banda Aceh, tapi siang itu mereka tengah beristirahat. Tiro baru saja pulang berobat dari Malaysia. Tiga bulan kemudian, pada 3 Juni 2010 proklamator GAM yang menderita infeksi jantung, gangguan pernapasan dan leukimia itu wafat di rumah sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Tengku Diladang membiarkan Tengku Anwar berceles, baru kemudian melanjutkan bicara. “Nah, inilah contoh yang belum dapat pelatihan FES (Frederich Ebert Stiftung),” katanya, seraya tersenyum.

Tak berapa lama, Tengku Anwar bercerita bahwa dia telah berpisah dengan orangtuanya sejak usia 13 tahun. Dia ikut dalam satu perahu berisi pelarian Aceh menuju Malaysia dan dari sana dia terdampar di Thailand. “Saya membeli senjata-senjata buat GAM. Nah, kalau orang itu (GAM) belum kirim uang, saya jadi jaminan untuk mafia Thailand itu. Keras, hidup saya keras. Tapi itulah risiko berjuang untuk Aceh. Saya tidak menyesal,” tuturnya.

Tengku Diladang tersenyum lagi mendengar penuturan Tengku Anwar, lalu mulai bercerita tentang dirinya.

Dia lahir pada 5 Maret 1970. Ayahnya, Tengku Sulaiman, asal Tiro, Pidie. Ibunya, Cut Siti Aminah, asal Banda Aceh. Pada 1960 ayah dan neneknya mendirikan madrasah di kampung mereka. Tengku Sulaiman kemudian diangkat jadi pegawai negeri dan bekerja di Departemen Agama pada 1960. Di malam hari, dia mengajar orang-orang kampung mengaji Alquran.

Tengku Diladang menganggap dirinya anak yang beruntung. Orangtuanya tidak pernah berkata kasar, apalagi memukul dia dan saudara-saudaranya ketika mereka masih kanak-kanak. Anak yang nakal atau dianggap tidak patuh akan dinasihati dengan kata-kata.

Ayahnya ternyata terlibat dalam politik, mendukung gerakan melawan pemerintah Indonesia. Dia masih ingat saat diminta sang ayah mengantar surat untuk pamannya, Hanafi, di Pidie. Waktu itu dia masih belajar di sekolah dasar.

Beberapa kali ada tamu yang berkunjung dan menginap di rumah keluarganya.

“Abi, siapa paman itu?”

“Itu saudara kita juga,” jawab ayahnya.

Suatu hari tamu yang disebutnya “paman” itu meninggalkan Aceh menuju Malaysia.

“Abi, mengapa paman tidak di sini?”

Ayahnya tidak menjelaskan dengan rinci dan hanya mengatakan bahwa “paman” tidak bisa lagi tinggal di kampung mereka.

Dia juga sering mendengar ayahnya berbicara dengan beberapa teman tentang “wali”, sebutan untuk Hasan Tiro sebagai pemimpin tertinggi GAM.

“Siapa Wali itu, Bi?”

“Wali itu pemimpin kita, Nak. Pemimpin Aceh,” jawab ayahnya.

Dia masih penasaran, lalu ayahnya berkata, “Nanti, suatu saat kamu pasti ketemu beliau, Nak.”

Pada 1990 dia melihat mayat-mayat di pinggir jalan. Pos-pos tentara berdiri. Pertama kali dalam hidupnya dia menyaksikan Kopassus (Komando Pasukan Khusus) menangkap orang di kampungnya, pelarian dari Peureulak. Peristiwa itu amat membekas dibenaknya. Sejak saat itu tentara terlibat dalam semua urusan orang kampung.

“Mulai dari masalah lembu, sampai masalah rumah tangga jadi urusan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” kisahnya.

Pada 1992 pemerintah Soeharto mengubah struktur dan sistem pemerintahan di Aceh. Gampong dan mukim dihapuskan, diganti dengan istilah “desa”.

“Pemerintah Soeharto mengubah tata pemerintahan kami yang sudah berlangsung berabad-abad.”

Dia dan dua abangnya, Hasballah dan Saifuddin, pernah ditangkap dan diinterogasi Kopassus hanya gara-gara kesebelasan sepakbola yang didukung Kopassus kalah dari kesebelasan mereka. Pukul lima pagi mereka bertiga diambil paksa dari rumah. Tapi mereka dibebaskan hari itu juga, karena seorang kerabat mereka yang jadi polisi militer menelepon markas Kopassus itu.

Tengku Diladang perlahan-lahan mulai terlibat dalam GAM. Dia pun mulai dicurigai militer Indonesia. Pada 1994 dia pergi ke Subussalam untuk menghindari tentara dengan berbekal uang Rp 40 juta. Abangnya, Hasballah, memberinya uang tersebut sebagai modal usaha di tempat yang baru.

Dia beternak ikan garapu. Tapi usahanya tak membuahkan hasil yang diharapkan. Belum menyerah, dia kemudian membuka toko kelontong dan berdagang buah pinang.

“Saya menikah di akhir 1997 dan dikaruniai seorang anak. Tahun 1997 itu juga terjadi krisis ekonomi. Saya membeli barang waktu sebelum krisis dan saya dapat banyak keuntungan waktu krisis,” kisahnya.

Sementara itu, dia terus aktif dalam GAM dan memberi dukungan materi pada organisasi perlawanan ini.

Pada 1998 dia semakin jauh terlibat dalam GAM. Dia memperoleh surat tugas dari panglima tertinggi GAM, Tengku Abdullah Syafii.

“Saya harus menyusun struktur sago, gampong, mukim. Saya juga yang membaiai calon-calon GAM.”

Namun, situasi di lapangan tidak semulus yang dibayangkan. Di Tapak Tuan, ada dua kubu GAM.

“Kubu yang satu ini membunuh, membakar sekolah, meminta uang di mana-mana,” tuturnya.

Orang-orang yang terlibat dalam kubu “bunuh-bakar-minta uang” ini tidak pernah direkrut resmi dalam struktur GAM.

“Mereka bergerak berkelompok. Mereka bilang bahwa mereka kenal Ahmad Kandang (salah satu panglima GAM), padahal Ahmad Kandang nggak tahu apa-apa tentang mereka.”

Menurut Tengku Diladang, ada lima kelompok orang yang terlibat GAM: 1. karena keikhlasan/kewajiban, 2. supaya dihormati, 3. Untuk mengumpulkan kekayaan, 4. karena ada masalah dengan TNI/Polri, 5. karena panggilan darah pejuang.

Namun, dia ikut GAM karena kewajiban dan panggilan darah. Dia selalu ingat cerita ayahnya.

“Ayah saya bilang, kami sudah ditipu. Soekarno datang dan berjanji pada Daud Beureuh untuk memberikan apa yang dimau tapi tetap dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tapi ternyata Soekarno tidak menepati janji.”

Ayahnya juga bercerita bahwa nenek moyang mereka telah berjuang melawan Belanda. Selain itu, sang ayah juga bertutur tentang perang saudara dan pembunuhan paling menyedihkan dalam sejarah Aceh, yaitu perang Cumbok.

“Ini perang antar teuku dan ulama, karena salah satu dianggap kerja sama dengan Belanda. Teuku-teuku itu mau dihabisi. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Saya sangat menentang, seandainya saya sudah dewasa waktu itu,” katanya.

Apa yang paling menyedihkan dari perang?

Air matanya tiba-tiba menetes. Suara Tengku Diladang bergetar.

“Kehilangan teman, paman, saudara. Paman saya, Hanafi, dibunuh tahun 1998, bersama sepupu saya dalam satu pengepungan di Tiro. Terutama yang saya ingat, Paman saya. Saya ingat waktu kecil saya digendong paman. Saya sangat sedih.” Dia menangis.

Tengku Anwar dan Tengku Man masih berada di sekitar kami, tapi tidak lagi terlibat dalam percakapan ini. Mereka sibuk berbicara dengan orang-orang yang datang. Pemilik rumah ini seorang kepala kampung, simpatisan GAM. Dia sedang sakit cacar dan sempat menampakkan dirinya sebentar. Wajahnya putih seperti tembok, karena dilumuri tepung beras yang dianggap bisa menghilangkan bekas-bekas cacar.

Karena situasi Aceh yang terus memanas, Tengku Diladang pindah ke Medan bersama istri dan anaknya. Di tempat yang baru, Tengku Diladang bertugas mengatur pendistribusian senjata ke kantong-kantong GAM di seluruh Aceh. Akhirnya dia ditangkap intelijen kepolisian. Ketika itu situasi rumah tangganya pun sedang tidak hangat.

Setelah 14 hari dia ditahan dan disiksa, ayahnya datang mencarinya ke markas Brimob di Medan.

“Ayah saya bilang pada polisi itu, kalau kamu nggak tahu di mana anak saya, beritahu di mana dia dikubur. Hanya itu kata-kata ayah saya.”

Suatu malam dia dibawa ke suatu tempat. Dia mendengar gemericik air sungai. Matanya ditutup. Dia diminta berjongkok dan sekali lagi ditanya apakah namanya Muhammad Sukri. Dia menjawab, “Nama saya Azhar. Saya bukan Muhammad Sukri.” Azhar adalah nama aliasnya yang tertera di KTP.

Dia diminta berdoa oleh mereka yang bersiap-siap membunuhnya. Di sungai itu dia memohon pada Tuhan agar umurnya dipanjangkan bila dia masih diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik bagi kehidupannya dan bangsanya. Tak berapa lama terdengar telepon seluler salah satu dari orang yang membawanya itu berbunyi. Rupanya mereka diperintahkan untuk membawanya kembali ke penjara. Keesokan harinya Tengku Diladang dibawa ke Banda Aceh dengan pesawat Hercules.

Di dalam pesawat itu dia sempat berpikir untuk mendobrak jendela pesawat. Dia ingin bunuh diri.

“Karena saya sudah tidak tahan lagi.”

Namun, penjagaan sangat ketat dan dia gagal melaksanakan niat itu.

Ketika dia ditahan di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, tiba-tiba dia mendengar seorang jenderal polisi akan datang dari Jakarta.

“Karena ada laporan bahwa Tengku Diladang sudah ditangkap.”

Jenderal itu menemuinya di sel.

“Dia tanya, apa saya GAM. Saya jawab, bukan. Dia bilang, jadi GAM boleh tapi yang nggak boleh pakai senjata. Terus setelah melihat luka-luka saya, dia marah-marah pada orang Polda, ‘Eh, ni bukan binatang, ini manusia. Ini sudah menyalahi aturan. Nanti kita kena pelanggaran HAM.’ Orang Polda itu pun mengobati saya segera. Jenderal itu tidak memakai seragamnya. Saya tidak tahu namanya. Dia berpakaian sipil. Ternyata dalam keadaan yang begitu buruk, masih ada kebaikan.”

Beberapa waktu setelah itu, Tengku Diladang didatangi Said Husaini, kepala polisi resor Aceh Rayeuk, yang menenangkannya.

Teuku Kamaruzzaman atau Teuku Ampon Man, anggota tim perunding GAM, juga mengunjunginya.

“Waktu itu tahun 2003. Ampon Man memeluk saya. Dia bilang, kamu sudah benar dan kamu sudah hebat. Diambilnya buku agenda. Dia bilang apa yang saya butuh, tulis. Saya tidak boleh bicara. Saya tulis bahwa saya butuh pengacara, tolong urus saya ataupun anak saya.”

Keesokan harinya dia dipindahkan ke penjara Rantau Prapat.

Selama di penjara ini pula dia menulis banyak puisi. Dia menitipkan puisi-puisinya untuk diantar ke radio Siantar pada para pegawai penjara yang menurutnya “baik hati”.

“Puisi saya tentang luka hati, derita, jiwa. Nama samara saya, Tengku Reza TS. Saya sebut alamat saya “Istana Biru”. Hehehe....”

Salah satu puisi andalannya adalah “Tuba-Tuba Cinta”. “Puisi itu menggambarkan perasaan saya di ambang perpisahan dengan istri,” tuturnya. Sekarang dia sudah berumah tangga lagi.

Di penjara ini pula dia mendengar kabar yang mengagetkan sekaligus menyedihkan. Tengku Abdullah Syafii gugur dalam kepungan militer Indonesia di Jiem Jiem, Pidie.

“Saya menangis. Kalau bisa, panglima ke depan seperti beliau, yang mengerti perasaan masyarakat dan perasaan tentara. Dia mengajarkan saya bagaimana mengerti masyarakat, bukan ilmu militer.”

Setelah bebas bersyarat, Tengku Diladang pergi ke Malaysia pada September 2003.

“Saya minta izin pada Tengku Yahya Muaz, terus saya sempat telepon Tengku Ishak Daud, saya minta izin berobat. Saya

setahun di sana, terjadi tsunami. Ketika di Malaysia, UNHCR menyarankan saya untuk keluar negeri. Tapi saya tidak mau, karena masih punya tanggung jawab di Aceh.”

Sebelum perdamaian terjadi di Aceh, dia sudah kembali ke Aceh.

“Saya pakai kartu UN (United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan polisi nggak bisa menangkap saya.”

Menjelang perdamaian itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan GAM. Ada yang menyebut perdana menteri GAM Malik Mahmud dan pemimpin tertinggi GAM Hasan Tiro sudah salah langkah.

“Saya harus menjelaskan ke mereka tentang hal ini, karena ada yang tak mengerti arti perdamaian.”

Dia juga sempat hadir dalam sebuah pertemuan di Meureu, Indrapuri, setelah Perjanjian Helsinki ditandatangani pihak GAM dan pemerintah Indonesia. Di sana dia bertemu Malik Mahmud dan mendengar Irwandi Yusuf, yang kelak jadi gubernur Aceh, menjelaskan isi perjanjian antara pihak Indonesia dan GAM itu.

Tidak ada lagi senjata dan komando untuk bertempur. Dia harus belajar bagaimana memperjuangkan hak-haknya dan orang banyak di Aceh di masa damai.

Pada satu hari di tahun 2007 Tengku Diladang diminta datang ke Banda Aceh untuk ikut serta dalam pelatihan demokrasi yang diselenggarakan Frederich Ebert Stiftung (FES). Tujuh belas jam naik bus ditempuhnya dari Singkil. Dia jadi peserta terakhir yang tiba di tempat pelatihan. Di situ pula dia bertemu dengan teman-temannya, sesama bekas gerilyawan GAM.

“Hari kedua, saya bikin puisi, yaitu puisi demokrasi. Judulnya “Pohon Bunga Demokrasi”. Berkat pelatihan FES

itu, kami jadi mengerti apa itu demokrasi, pluralisme, gender, bagaimana selfgovernance dan good governance itu.”

Pengalaman yang amat berkesan baginya adalah debat dan adu pendapat di kelas. Dia juga takjub menyaksikan semua pendapat peserta pelatihan ini didengar dan ditampung. Setelah itu, mereka membahasnya bersama-sama.

Selama bertahun-tahun ikut dalam perang, dia paham bahwa di militer memang tidak ada demokrasi.

“Sebab komandan tak dipilih anak buah. Itulah militer,” katanya.

Menerapkan apa yang diketahuinya dari pelatihan FES amatlah berat.

“Karena saya biasa memberi perintah. Selain itu, dulu kita kan selalu mencurigai semua orang, teman, istri semua kita curigai. Nah, untuk mengembalikan cara berpikir positif itu yang berat. Itulah demokrasi,” katanya lagi

“Kalau dulu, kalau nggak dikasih sesuatu, saya sepak meja. Sekarang sudah banyak bercanda, banyak senyum.” Dia tertawa.

Baginya, ada sejumlah hal yang bisa mengancam demokrasi di Aceh.

“ Dalam poin MoU tertera bahwa tiap mantan kombatan wajib diberi hak-hak hidupnya oleh pemerintah. Pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan itu masih belum ada. Kemudian masalah kombatan akan diberi lahan pertanian, sampai sekarang tak ada. Itu baru satu hal. Bagaimana dengan masyarakat korban konflik yang lebih banyak lagi itu. Mereka juga belum diperhatikan. Saya tak menyalahkan pemerintahan pusat. Tapi yang tinggal di Aceh ini apa kerjanya.”

*FES secara sangat
konsisten mendukung*



Di salah satu restoran Jakarta Ampon Man melahap sup iga dan nasi putih. Hari menjelang pukul delapan malam. Dia sedang ada urusan pekerjaan di Jakarta dan sekaligus menengok putri tunggalnya yang juga kuliah di sini.

Penampilannya ala anak muda. Setelan kaos dan celana jins. Suaranya pelan dan kadang seperti menggumam.

Ampon Man adalah nama panggilan. Nama lahirnya, Teuku Kamaruzzaman. Teuku, gelar aristokrat di Aceh atau biasa disebut kaum ulee balang. Ampon juga panggilan sehari-hari untuk para teuku.

Dia lahir pada 20 September 1960 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ayahnya, Teuku Syahbudin, seorang pamongpraja. Ampon Man anak ketujuh dari sembilan bersaudara.

Baru lima tahun ini dia merasakan kehidupan yang tenang. Dia dibebaskan dari penjara Sukamiskin, Jawa Barat, dua minggu setelah pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat berdamai di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Semula Ampon Man tidak tertarik sama sekali pada politik, apalagi memberontak pada pemerintah Indonesia. Tapi pada suatu hari dia menyaksikan tentara sewenang-wenang terhadap warga dan hal itu ternyata ikut mengubah hidupnya. Rasa marah dan sedih memenuhi benak Ampon Man. Dia lantas memutuskan bergabung dengan GAM, yang saat itu merupakan satu-satunya gerakan perlawanan di Aceh yang berani melawan Jakarta. Sebelum masuk GAM, Ampon Man menekuni jasa konstruksi dan bahkan aktif di Pemuda Pancasila, organisasi pemuda Partai Golongan Karya.

Pada 2002 pemerintah Indonesia dan GAM setuju berunding dengan difasilitasi Henry Dunant Center. Ampon Man terlibat sebagai anggota tim perunding di pihak GAM. Kesepakatan tercapai dan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) atau perjanjian penghentian permusuhan pun ditandatangani kedua pihak.

Setahun kemudian, GAM sepakat berunding lagi di Tokyo dengan pemerintah Megawati Soekarno. Tujuan sebenarnya untuk memperpanjang COHA. Ampon Man ikut lagi sebagai tim perunding dari Aceh bersama Tengku Amni bin Ahmad Marzuki, Tengku Nashiruddin bin Ahmad, dan Tengku Usman Lampoh Awe. Tim ini dipimpin Sofyan Ibrahim Tiba.

Mereka berlima menginap di Kuala Tripa, sebuah hotel di Banda Aceh, untuk persiapan berangkat ke Tokyo. Namun, dua hari sebelum perundingan Tokyo, pada 16 Mei 2003, mereka ditangkap dan dituduh akan kabur dari Aceh. Hanya hitungan jam setelah penangkapan tim perunding ini, pemerintah Megawati Soekarno mengumumkan status Darurat Militer bagi Aceh.

“Artinya Darurat Militer itu sudah disiapkan sebelumnya, bukan mendadak. Sebelum itu, kami sempat mempertanyakan kok ada mobilisasi kapal perang, mobilisasi pesawat. Padahal ini akan

ada perundingan,” tuturnya ketika kami bertemu lagi di ruang kerjanya, di kantor Konsorsium Aceh Baru. Kantor lembaga ini tak jauh dari pasar Neusu, Banda Aceh.

Pemerintah Darurat Militer di Aceh dipimpin Mayjen Endang Suwarya dan panglima komando operasinya Mayjen Bambang Darmono.

Tuduhan polisi terhadap Ampon Man dan kawan-kawan tiba-tiba berubah. Mereka berlima dinyatakan terlibat aksi makar dan terorisme. Di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Ampon Man divonis melakukan tindakan makar dan terorisme. Dia dihukum 13 tahun penjara.

“Kami dibawa dengan Hercules ke Jawa, diikat kaki dan tangan,” katanya, seraya tertawa, mengenang peristiwa itu.

Sekitar 1.900 tahanan Aceh tersebar di seluruh penjara Pulau Jawa dan Nusakambangan. Ketika dibebaskan, dia kembali ke Aceh naik pesawat penumpang. “Dan mengenakan jas,” katanya, terkekeh-kekeh, untuk membandingkan keadaannya sebelum dan sesudah perdamaian.

Ampon Man kemudian ikut tim sosialisasi Perjanjian Helsinki ke seluruh daerah di Aceh.

“Kita mencetak buku, brosur, menyebarkan dan menjelaskan poin-poin perjanjian. Tapi semua ini tidak berlangsung lama dan hanya berlangsung sekitar enam bulan,” katanya, lagi.

Di masa itu pula organisasi baru untuk mewartakan para bekas gerilyawan GAM dibentuk dan dinamai Komite Peralihan Aceh atau KPA. “Tujuannya untuk mengkoordinir mantan-mantan kombatan.” Ampon Man beranjak dari kursinya, lalu membuka jendela-jendela. Udara dingin dari mesin pendingin tak cukup kuat menghalau hawa panas dalam ruangan.

“Ketika itu FES (Frederich Ebert Stiftung) juga sudah melakukan pendekatan untuk membuat sebuah proses transformasi dari mindset konflik ke mindset damai. Ketika itu FES ingin membuat beberapa pelatihan atau semacam itu. Dan untuk itu kami perlu mendirikan sebuah lembaga yang kelak dinamai PPDA, supaya bisa bekerja sama. Irwandi, saya dan Faisal Putra terlibat di PPDA,” ujarnya.

Menurut Ampon Man, bantuan FES itu sangat istimewa bagi mereka.

“Ketika orang masih gamang untuk memberi bantuan kepada kombatan karena rasa khawatir atau dampak psikologis masa lalu, FES secara sangat konsisten mendukung,” kenangnya.

Meskipun begitu, dia pesimistis mental militer para mantan gerilyawan itu dapat diubah hanya melalui beberapa kali pelatihan soal demokrasi. “Kalaupun bisa, akan sangat lama,” katanya.

Setelah itu dia tidak terlibat lagi di PPDA. Dia bekerja sebagai deputy monitoring dan evaluasi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias atau populer disebut BRR. Aturan di BRR melarang pegawainya bekerja rangkap.

Setelah masa kerjanya berakhir di BRR, Ampon Man aktif di Konsorsium Aceh Baru. Lembaga ini berisi orang-orang yang hendak ikut serta dalam mewujudkan iklim politik yang sehat dan demokrasi di Aceh.

*Kami memang selalu
jadi pelopor* 

Ketika dia kelas dua sekolah menengah pertama (SMP), pemerintah Indonesia menerapkan status Daerah Operasi Militer atau DOM di Aceh. Dia sering melihat mayat orang-orang tak dikenal di pinggir jalan. Tak ada yang berani mengambil dan menguburkannya selama berhari-hari. Mayat-mayat itu dibiarkan membusuk.

Suatu hari dia menyaksikan aksi kekejaman yang lebih mengerikan. Para guru dan seluruh murid di sekolahnya diminta prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berkumpul. Mereka harus menyaksikan eksekusi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Jadi orang ini diseret pakai mobil, lalu di bawa ke tiang gawang lapangan bola dan di sana dia diikat dan digantung dengan kepala di bawah, terus dia ditembak,” tuturnya. Peristiwa tadi membekas dalam ingatannya, tidak bisa hilang.

Komandan Kopassus di Aceh waktu itu adalah Sutiyoso, yang kemudian menjabat gubernur Jakarta.

“Dia terkenal sangat kejam,” kata Thamren Amanda, mengenang masa tersebut.

Markas Kopassus kebetulan berada di samping sekolah Thamren.

Tapi orang-orang GAM tak gentar. Mereka terus bergerak dan malah melancarkan propaganda secara terang-terangan. Mereka mendatangi kedai-kedai kopi, berdiri di atas meja dan berceramah tentang Aceh Merdeka di hadapan orang-orang yang ada di situ. Mereka bercerita tentang kekayaan alam Aceh dan kemiskinan warga. Mereka mengajak rakyat memberontak terhadap negara Indonesia yang telah sewenang-wenang dan korup.

Situasi tersebut membuat ayahnya mengkhawatirkan perkembangan jiwa Thamren. Dia lalu dipindahkan ke Banda Aceh untuk melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di sana. Selain itu, ayahnya masih trauma dengan pengalaman politik dalam keluarga mereka. Dia tidak ingin Thamren terlibat urusan politik yang berseberangan dengan pemerintah. Dulu kakek Thamren, Haji Tahir, terlibat dalam berbagai gerakan politik, mulai dari perang Cumbok sampai Darul Islam. Menjelang kejatuhan Soekarno, dia bahkan dituduh komunis. Seorang paman Thamren sengaja meninggalkan Aceh, menuju Bandung, Jawa Barat, lantaran trauma terhadap stigma komunis itu. Dia menikah dan membangun keluarga di sana.

Thamren sangat dekat dengan sang kakek. Dia selalu ingat pesannya.

“Kakek saya bilang, untuk dikenal harus pintar sekali atau bodoh sekali. Kalau nggak jadi pemimpin, ya harus jadi anti pemimpin. Kalau mau dikenal orang, harus paling depan atau paling belakang,” kenangnya.

Kakeknya cukup disegani di kampung dan memiliki beberapa pesantren. Dia juga orang pertama di kampung Kaye Raya yang berangkat naik haji ke Mekah.

Kaye Raya terletak di kecamatan Bandar Baru, Pidie, tapi kini masuk wilayah kabupaten Pidie Jaya.

“Kaye Raya artinya, kayu besar,” kata Thamren.

Menurut orang-orang tua, di kampung itu pernah tumbuh sebatang pohon besar yang akhirnya tumbang. Saking besarnya pohon tersebut, sebuah meunasah dibangun semata-mata dari kayunya. Lama-kelamaan kampung itu dinamai kampung Kaye Raya.

“Desa saya itu terisolir dan lama tidak ada listrik. Saya belajar dengan lampu teplok. Saat menginjak SMP saya baru mengenal listrik. Itupun dari genset yang dibeli orangtua,” katanya.

Dibandingkan warga kampung yang sangat miskin, keluarga Thamren terbilang sejahtera. Meski hanya lulusan SMP, ayahnya dianggap lebih berpendidikan dibanding kebanyakan warga. Paman dan bibinya rata-rata lulus SMP juga.

Thamren melihat pesawat telepon pertama kali saat dia di Banda Aceh.

Dalam keluarganya ada kebiasaan membaca, sehingga dengan uang saku dari orangtua yang pas-pasan dia berusaha membeli majalah bekas untuk memperoleh pengetahuan.

Dia mulai ikut kelompok diskusi saat kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, tahun 2000.

“Saya ikut kelompok diskusi Robur—Rombongan Bantuan Mahasiswa untuk Rakyat. Saya juga ikut kelompok diskusi Iqbal Farabi, Forum Diskusi Sosial Demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Iqbal Farabi adalah aktivis mahasiswa yang populer di masanya dan pernah menjabat deputi bidang hukum di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias.

Pada 1999, referendum dilaksanakan di Timor Leste dan negeri itu merdeka dengan hampir 80 persen warga mendukungnya lepas dari negara Indonesia. Apa yang terjadi di Timor Leste mengilhami orang-orang Aceh, termasuk anak-anak muda seperti Thamren dan teman-temannya.

“Kongres Mahasiswa Aceh Serantau (KOMPAS) yang memutuskan gagasan referendum. Ada SMUR, KARMA, belum ada SIRA. Kongres ini melahirkan SIRA. SIRA itu bukan organisasi, tapi pusat informasi peserta Kongres. Kemudian anggota presidium adalah wakil semua organisasi. Ketuanya Muhammad Nazar yang sekarang wakil gubernur Aceh. Kenapa? Karena dia paling tua di antara semua peserta Kongres,” kata Thamren.

SMUR memelopori tindakan yang lebih radikal untuk memopulerkan referendum. Aktivis-aktivisnya melakukan graffiti action atau aksi corat-coret.

“Setelah itu masyarakat ikut. Lalu ada ceramah tentang referendum, lalu rakyat turun ke jalan. Kalau yang pertama menulis huruf kata referendum itu harus dicatat sejarah adalah Jawon dan Furkan. Itu jauh sebelum mobilisasi. Itu prakondisi. Baru setelah itu mobilisasi massa ke Masjid Raya Baiturrahman,” katanya, lagi.

Furkan dan Jawon adalah nama-nama temannya di SMUR. Mereka kelak ditangkap polisi di Lhokseumawe, karena mengecat atap terminal dengan kata “referendum”.

Ketika itu warga kebanyakan tak paham arti kata “referendum”.

“Ada yang menyangka referendum itu free gandum, gratis semua. Ada juga yang mengartikannya sebagai merdeka.”

Namun, mobilisasi sejuta orang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk menuntut referendum bagi Aceh tak bisa lepas dari peran GAM.

“Kita bagian yang menyiapkan perangkat, selebaran, lewat rapat-rapat.”

Pada 2000 ada rencana mobilisasi serupa. Tapi antara organisasi sipil dan GAM mulai berbeda pendapat. SMUR khawatir warga akan mendapat tekanan hebat dan mengusulkan tiap kelompok massa didampingi seorang aktivis atau kader GAM.

Aksi massa terjadi juga. Tentara menembaki massa membabi-buta dan banyak korban tewas di jalan-jalan.

SMUR juga memelopori strategi baru menyelamatkan orang kampung dari operasi militer.

“Tiap tentara mau masuk kampung, masyarakat kami ajak mengungsi. Kampung kosong. Yang kelak jadi tren dan dipakai oleh GAM ketika itu. Kalau menurut saya, SMUR itu adalah pelopor dan pembuka cara, kemudian orang mengikuti pola-pola itu.”

SMUR dan GAM bertemu di sejumlah kepentingan. SMUR anti militerisme. GAM menghendaki demiliterisasi.

Tapi, “Berbeda dengan yang lain, SMUR berdiri independen, tidak mau diintervensi, menempatkan diri sejajar. GAM sebenarnya ingin mengkooptasi semua organisasi mahasiswa. Meski tak disebut onderbouw. Kalau mereka bilang, demo besok, ya harus mau. Dan SIRA berhasil mereka kooptasi sebenarnya dan hampir semua demonya pesanan dari GAM waktu itu.”

Pada 2001 Thamren menjabat sekretaris jenderal Front Demokrasi Perlawanan Rakyat Aceh (FDPRA). Front ini terdiri

dari mahasiswa, perempuan, dan kaum miskin perkotaan. FDPRA kelak mendorong kelahiran Organisasi Perempuan Aceh Demokratik atau ORPAD dan Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin atau disingkat PDRM.

Ketika Front mencoba mengembangkan basisnya ke berbagai kabupaten dan kota di Aceh, pemerintah Indonesia menetapkan status Darurat Militer untuk Aceh pada 16 Mei 2003.

“Tanggal 17 Mei, Endang Suwarya (Panglima Darurat Militer) bicara di surat kabar Serambi Indonesia bahwa SMUR, FDPRA, SIRA, di luar GAM, termasuk KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) jadi target operasi mereka,” tuturnya.

Thamren berhenti kuliah. Teman-temannya pun lari ke Jakarta. Dia kemudian meninggalkan Aceh menuju Pulau Jawa dan tinggal di Batang, Pekalongan. Sebuah lembaga bantuan hukum, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), menitipkan dia dan sejumlah mahasiswa Aceh di rumah seorang aktivis di situ. Mereka menyamar sebagai peneliti. Thamren ternyata tidak betah di rumah dan jadi anak manis tanpa politik. Dia pun mengajak warga desa mendirikan Forum Petani Nelayan Batang. Mereka bahkan sempat memenangkan kasus tanah.

Di tahun itu juga dia dan sejumlah teman membangun Solidaritas Aceh Papua atau SAP. Thamren jadi ketua presidium organisasi ini.

“Sempat ada demo sekitar seribu orang di depan istana. Orang-orang Papua pakai koteka. Orang-orang Aceh pakai baju tradisional Aceh. Tuntutan kami dari Aceh: Cabut Darut Militer. Kalau kawan-kawan Papua tuntutannya: hentikan Operasi Militer.”

SAP ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Makassar. Setelah itu dia kembali ke Aceh.

Thamren juga terlibat aksi boikot Pemilu 2004. Lagi-lagi, dia diincar aparat dan lari lagi ke Jakarta.

“Kemudian terjadi tsunami. Saya jadi koordinator pengiriman relawan ke Aceh. Kemudian saya diundang ke Malaysia dan juga bicara soal perdamaian. Acara itu disponsori Olos Palme. Kami diundang untuk memberi pendapat pada orang-orang GAM yang akan berunding.”

Namun, Thamren menganggap seharusnya tidak cuma GAM yang diajak berunding oleh pemerintah Indonesia. Dia ingin elemen masyarakat sipil juga terlibat untuk memudahkan jalannya perundingan.

“Saya menyurati pemimpin-pemimpin GAM di Swedia. Di website mereka, mereka merespon negatif. Mereka bilang yang berkonflik kan GAM bukan masyarakat sipil. Saya juga kirim surat ke Martti Ahtisaari. Tidak mendapat respon.”

Tapi menurut Thamrin, ada poin-poin penting yang tercantum dalam Perjanjian Helsinki, seperti partai lokal dan pembagian hasil bumi. Meskipun lagi-lagi, pemerintah Indonesia terkesan enggan untuk mensahkan pelaksanaannya lewat undang-undang.

Thamren dan teman-temannya sengaja mendeklarasikan Partai Rakyat Aceh atau PRA sebelum undang-undang tentang partai lokal dibuat. Tujuannya untuk mendesak pemerintah Indonesia segera mengeluarkan undang-undang.

“Lagipula, aparat nggak bakalan menangkap kami. Mereka bisa dituduh melanggar Perjanjian Helsinki. Kami memang selalu jadi pelopor. Tak lama lahir peraturan pemerintah tentang partai politik lokal.” Dia tertawa.

Ternyata PRA tidak mendapat cukup suara dalam Pemilu legislatif di Aceh. Sebabnya macam-macam, termasuk intimidasi

dari partai lokal saingan. Partai-partai lokal lain pun bertumbuhan. Hanya Partai Aceh atau PA, partai bekas GAM, yang berhasil meraih kursi di parlemen, baik di provinsi maupun kabupaten. Namun, Thamren justru khawatir terhadap kemenangan PA ini.

Baginya, PA bukanlah partai yang demokratis.

“Untuk memenangkan Pemilu kemarin, mereka menggunakan struktur Komisi Peralihan Aceh, struktur tentaranya. Struktur komandonya. Bukan PA-nya. Nah, bagaimana kalau mereka dominan? Lalu majority, single party. Orang yang baik saja, yang tak berwatak militer, kalau sudah jadi single party, akan menjadi tidak demokratis. Apalagi ini ada senjata.”

Menurut Thamren, pelatihan-pelatihan demokrasi yang diselenggarakan Frederik Ebert Stiftung untuk bekas GAM tidak akan mengubah cara berpikir mereka secara signifikan.

“Organisasi mereka masih sangat oligarki, tidak ada kongres, tidak ada sistem demokratis di internal, apalagi di eksternal. Kalau SIRA punya basis aktivis mahasiswa, membenci sistem yang diktator, kita di PRA juga berangkat dari hal yang sama, nah kalau PA ini sangat berbeda. Jadi evaluasi FES terhadap PRA dan SIRA misalnya, sudah sejauh mana pemahaman kami terhadap sosial demokrasi. Evaluasi untuk PA ya pada pemahaman demokrasi mereka.”

Yahya Muaz

*Kami benar-benar
ingin ada demokrasi di Aceh*



Semula ruang tunggu kantor pusat Partai Aceh atau PA begitu sunyi, tapi lama-kelamaan ada sekitar sepuluh lelaki yang duduk di situ, berbicara dan merokok. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Aceh dan hanya beberapa potong kata saja yang saya pahami, termasuk kata “Mentro Malik”. Seorang lelaki sedang membicarakan tokoh yang satu ini dengan antusias pada temannya. Mereka tengah mengisi waktu, menunggu untuk bertemu Yahya Muaz, Sekretaris Jenderal PA.

Tak berapa lama seorang lelaki datang menghampiri saya. Kami baru pertama kali ini berjumpa. Wajahnya kelihatan letih dan tidak ramah. Dia mengajak saya ke lantai dua. Orang-orang yang menunggu tadi pun diam.

“Saya lahir dari keluarga pejuang, dari kalangan ulama,” kata Yahya Muaz, duduk di hadapan saya, di kursi kerjanya. Dia menanyakan apakah boleh merokok, lalu membuka jendela ruangan ini. Tak berapa lama datang seorang lelaki dan berbicara sebentar dengannya, lalu pergi lagi.

Yahya asal desa Garot, Pidie. Pada tahun 1955, ayahnya menjabat kepala bagian politik Departemen Agama Republik

Indonesia di Jakarta. Yahya anak bungsu dari tiga bersaudara. Pekerjaan ayahnya di pemerintahan membuat hidup keluarganya berkecukupan. Namun, ayah maupun kakeknya menyokong gerakan perlawanan menentang kebijakan pemerintah Indonesia.

Uniknya, orangtua Yahya tidak pernah menyuruh anak mereka bergabung dengan gerakan perlawanan mana pun. “Mereka menyuruh saya sekolah, agar pintar,” katanya, seraya menekan tuts telepon selulernya untuk menjawab pesan. Sepanjang wawancara ini, teleponnya beberapa kali berbunyi dan dia beberapa kali meminta izin untuk menjawabnya.

Dia lantas bercerita tentang sejarah Aceh. Menurut Yahya, pada 1948 Indonesia sebenarnya sudah terhapus dari mata dunia dan yang tinggal hanyalah negara yang disebut Hindia Belanda. Ketika itu Aceh jadi satu-satunya wilayah yang belum dapat ditaklukkan penjajah kolonial Belanda. Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan, Rakyat Aceh pun sukarela menyokong kemerdekaan Indonesia dengan menyumbang emas dan harta mereka. Dua pesawat pertama milik republik yang baru berdiri ini merupakan sumbangan dari Aceh.

Tapi kelak pemerintah Soekarno justru ingin melebur provinsi Aceh ke dalam wilayah provinsi Sumatra Timur, mengecilkan Aceh secara geopolitik. Daud Beureuh yang ketika itu menjabat gubernur militer Aceh, Langkat dan tanah Karo memprotes tindakan Soekarno, yang dianggap Beureuh sebagai pengkhianatan. Beureuh kemudian menyatakan diri bergabung dengan Kartosoewirjo yang juga melawan pemerintah Soekarno di tanah Jawa, membentuk Darul Islam-Tentara Islam Indonesia di Aceh.

“Menurut Anda itu pengkhianatan atau bukan yang dilakukan Indonesia itu, mengingat jasa Aceh dulu?” Dia tiba-tiba bertanya pada saya.

“Saya tanya pada Anda dulu, itu pengkhianatan atau bukan? Kalau dijawab iya, boleh lanjutkan wawancara. Kalau tidak, untuk apa wawancara?” katanya, menekan lawan bicaranya.

“Kalau Anda tidak tahu sejarah Aceh, bagaimana Anda bisa mewawancarai saya?” katanya, meremehkan.

Beureuh akhirnya menyerah. Tapi Hasan Tiro yang dulu bekerja sebagai kepercayaan Beureuh di luar negeri memimpin perlawanan baru. Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka atau populer disebut AM pada 1976. Beberapa kali sempat terjadi kesepakatan damai di Aceh antara pemerintah Soeharto dan pihak yang memberontak ini dan ujung-ujungnya, konflik pecah lagi, sampai terjadi perundingan di Helsinki, Norwegia pada 2005.

Yahya tidak terlibat langsung dalam Perjanjian Helsinki. Dia berada di hutan dan jadi kepala biro penerangan di Pulo Aceh saat itu. Setelah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tercapai, Malik Mahmud, perdana menteri GAM, menelepon dan mengabarkan hasil perjanjian tadi kepadanya. Aceh tidak jadi merdeka, melainkan tetap jadi bagian Indonesia dengan sejumlah ketentuan.

“Saya dulu ikut berjuang untuk keadilan. Tujuan perang juga hendak menegakkan satu marwah, karena kita tidak dihargai. Sekarang Indonesia mau menghargai dan ada upaya Uni Eropa juga dalam hal ini,” katanya, mengembus asap rokoknya.

Setelah perdamaian, GAM bertransisi dari perjuangan bersenjata ke perjuangan di parlemen. Ketika itulah pendidikan demokrasi untuk orang-orang bekas GAM amat dibutuhkan.

“Saya dikontak Erwin dari FES (Frederich Ebert Stiftung) dan membicarakan soal itu. Banyak sekali jasa FES dalam hal ini di Aceh. Kami benar-benar ingin ada demokrasi di Aceh, sehingga terbangun ekonomi... eh, terbangun demokrasi di Aceh.

Bagaimana Aceh ke depan, bagaimana memikirkan hydropower di Aceh, bagaimana membangun agrobisnis,” katanya, melantur ke soal bisnis.

Menurut Yahya, pelatihan FES cukup efektif.

“Selain itu sudah ada kesepakatan untuk membangun ekonomi Aceh,” tuturnya.

Dia membantah anggapan orang bahwa struktur komando di GAM bertentangan dengan penerapan demokrasi.

“Kami dalam perang pun mengenal demokrasi. Meski dalam militer, ada demokrasi. Ada musyawarah. Kalau nggak ada musyawarah, nanti akan timbul saling menyalahkan. Kami sudah belajar demokrasi sejak dari perang,” katanya, serius.

Tak berapa lama dia berkata bahwa ternyata pengertian demokrasi di Aceh, sama dengan di Jerman atau Eropa, “Ada syarat-syaratnya untuk dipilih sebagai pemimpin. Jujur, berakhlak baik dan sebagainya. Tidak bisa kita terapkan full democraton. Itu malah kacau.”

Yahya mencontohkan bagaimana seorang perampok yang membagi-bagikan hasil rampokannya kepada orang sedesanya bisa terpilih sebagai kepala desa.

“Tapi kalau dia dipilih jadi kepala desa, kampung-kampung lain yang dirampoknya akan memutuskan hubungan diplomatik.” Dia tertawa. “Jadi kriteria itu penting,” lanjutnya.

Yahya menyebut dirinya sebagai pemegang mandat PA.

“Sejak awal saya memegang mandat ini,” tuturnya.

PA dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 20 tahun 2007. Namun, proses pembentukan partai tersebut tidak mudah meski telah disahkan oleh Perjanjian Helsinki dan peraturan yang sah.

Sebelum bernama PA, partai bekas GAM ini dinamai Partai GAM.

“Tapi kemudian dicurigai tujuan partai GAM ini untuk merdeka. Harusnya mengingat sejarah dulu, kita yang sepatutnya mencurigai mereka, bukan mereka yang mencurigai kita.”

Nama Partai GAM ditolak, apalagi lambang yang dipakai partai itu adalah lambang GAM. Akhirnya, para bekas GAM ini mengubah nama Partai GAM menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Mereka sengaja memberi kepanjangan kata “GAM”, agar tak ada lagi yang menganggapnya sebagai Partai Gerakan Aceh Merdeka. Lambang partai pun berubah jadi tulisan “GAM”. Nama ini ternyata masih memancing kecurigaan elite politik dan militer di Indonesia.

“Lalu kita meminta kepastian hukum. Sehingga Yusuf Kalla, wakil presiden, membuat kepastian hukum untuk nama yang baru, yaitu Partai Aceh, sehingga keluarlah surat pengesahan PA,” ujarnya.

Ruangan kini bau asap rokok. Sejumlah orang yang menunggu giliran bertemu Yahya duduk di kursi di seberang kami, berbincang-bincang dan merokok.

Namun, intimidasi terjadi menjelang Pilkada. Kantor partai dibakar. Sejumlah anggota PA dibunuh. Beberapa orang yang marah dan sedih datang kepadanya, mengadu.

“Tengku, kita terus dibunuh. Senjata kita sudah dipotong, meski tak ada senjata kita boleh rebut dan pakai senjata mereka,” kata salah seorang dari mereka.

Yahya menjawab, “Ingatlah 30 tahun kita berperang, orang nggak berani katakan kita pengecut. Kemudian ini sudah damai. Kita buktikan bahwa kita sanggup menjaga perdamaian. Walau

kita sedih, kemarin kita makan bersama, hari ini kawan sudah nggak ada lagi, sudah dibunuh, sudah ditembak. Inilah bukti kita berkomitmen dalam perdamaian. Kemudian kalau kita menang besok, kita akan membangun ekonomi Aceh.”

Orang-orang ini sepakat tidak melakukan serangan balasan.

Upaya menggagalkan kemenangan PA terus terjadi. Yahya tidak menjelaskan siapa pelakunya, tapi dia menyinggung tentang partai-partai nasional yang sudah berpengalaman dalam politik dan berbeda dengan PA yang masih bayi.

Formulir Pemilu hanya ditempel di dinding sebuah instansi di beberapa basis PA di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, tidak dibagikan kepada warga yang hendak menggunakan hak pilihnya. Jumlah suara yang sudah terkumpul tiba-tiba berkurang secara misterius.

“Secara politik yang kita perlukan: tiada dusta di antara kita. Pihak-pihak yang berkomitmen peganglah komitmen itu,” katanya.

Yahya tidak mendukung calon independen untuk Pilkada eksekutif mendatang.

“Kalau Pilkada dulu itu wajar. Karena saat itu GAM belum punya partai politik. Untuk apa lagi independen, kalau sudah ada wadah. Misalnya, independen ini menang, tentu di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu bukan orang-orang independen tapi orang-orang partai, sehingga akhirnya gubernur pun dibola-bolain oleh orang partai itu,” katanya.

Ia mencontoh kasus anggaran di awal masa pemerintahan Irwandi Yusuf, yang juga kader PA. Ketika itu anggota DPRD periode 2004-2009 adalah partai-partai nasional

“Dana ada 9 triliun dan yang terserap hanya 40 persen. Kenapa? Karena pihak Dewan tak menyetujui anggaran yang

diajukan. Mereka tak bisa komunikasi, karena lain kepentingannya. Akhirnya yang rugi rakyat. Misalnya, terjadi sekarang. Irwandi kader PA. Ditawarkan dana 6,5 triliun. Rupanya tak cukup, kita minta tambah dan bisa kita lakukan, karena apa, karena Irwandi orang kita.”

Yahya berharap FES juga mengarahkan programnya ke pemberdayaan ekonomi.

“Ada program hydropower, agrobisnis. Pertambangan mungkin berhenti dulu. Peternakan, perikanan cukup membuat rakyat Aceh senang,” ujarnya. Dia menyebutkan bahwa titik berat pembangunan Aceh masa depan ada tiga hal: kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

*Perdamaian Aceh:
Sebuah Pembelajaran* 

Mengapa Berdamai?

Kesepakatan Damai yang ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, sehingga dikenal dengan Helsinki Memorandum of Understanding (Helsinki MoU) mendapatkan sambutan yang luas. Kesepakatan damai tersebut memperoleh pujian dan dukungan bukan hanya oleh masyarakat Aceh sendiri, melainkan juga oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Tidak pelak lagi, inti apresiasi tersebut adalah bahwa konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir tigapuluh tahun dapat diakhiri melalui perundingan damai dan secara bermartabat.

Masih tetap menarik dan penting untuk mempertanyakan “mengapa kesepakatan damai bisa dicapai?” Ini bukan sekadar bertujuan untuk mengutak-atik prosesnya; atau semata-mata hendak mengukuhkan apa dan siapa yang paling berjasa dalam membawa perdamaian di Aceh. Hal yang paling utama, baik untuk kepentingan akademik maupun praktis, dari pertanyaan di atas

adalah merumuskan bahan pembelajaran agar para pihak yang sebelumnya terlibat dalam konflik bersenjata maupun kelompok/daerah/atau negara lain tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan malapetaka perang. Dan kalau ada kelompok/daerah/atau negara lain yang sedang mengalami tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata dapat belajar dari Aceh agar mereka segera dan dapat mengakhirinya secara damai.

Tercapainya perdamaian di Aceh bukanlah proses yang mudah dan murah. Analisis-analisis konflik punya kecenderungan besar untuk menyederhanakan, namun realitas yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Sebagai contoh dalam hal analisis aktor atau pihak yang berkonflik tidaklah semata antara GAM dan pemerintah Indonesia. Di dalam GAM sendiri terdapat kelompok yang berbeda pandangan tentang tujuan dan cara perjuangannya. Di pihak pemerintah Indonesia, terdapat beragam faksi yang melihat GAM secara berbeda. Di kalangan militer (ABRI atau TNI) sendiri ada yang mengutamakan cara perang sedangkan yang lainnya menekankan pentingnya penyelesaian secara politik. Contoh lainnya terkait dengan isi atau isu atau substansi konflik tersebut: ada yang menyebut sebagai gerakan separatis atau perang kemerdekaan, sementara yang lain mengatakan sebagai perlawanan ideologis (Islam melawan sekularisme) dan yang lainnya menegaskan bahwa konflik di Aceh lebih sebagai perlawanan sosial atas kesewenangan dan ketidak-adilan pemerintah pusat di Jakarta.

Sejarah konflik dan perdamaian di Aceh sejatinya menghadirkan gambaran yang amat rumit. Setiap hal yang terkait dengan tempat, waktu, peristiwa dan pelaku manusia (baik individu maupun kelompok; baik pemerintah, politisi, organisasi, aktivis, mahasiswa dan rakyat pada umumnya) memberi kontribusi dan seharusnya diperhitungkan secara adil di dalam setiap analisis.

Dan dalam upaya menarik dan merumuskan pelajaran dari perdamaian di Aceh, semua aspek di atas (ruang, waktu, peristiwa dan pelaku) patut dipertimbangkan. Namun demikian, harus diakui bahwa tulisan ini tidak sanggup mewujudkan keadaan ideal dan adil tersebut. Preferensi penulis (atau faktor subjektif dari penulis) masih tetap berpengaruh, meskipun diusahakan ditekan semaksimal mungkin.

Paparan tentang pelajaran yang bisa ditarik dari keberhasilan penyelesaian damai di Aceh dibagi ke dalam tiga bagian penting:

1. Konteks sosial-politik yang terjadi sebelum dan semasa proses penyelesaian damai tersebut. Juga penting ditambahkan lingkungan atau kondisi sosial-politik pada saat pelaksanaan kesepakatan damai (MoU Helsinki). Kondisi di Aceh, di Jakarta (dan Indonesia pada umumnya), serta internasional akan disinggung seperlunya.
2. Proses perundingan di dalam mengupayakan penyelesaian damai. Ini tidak hanya terbatas pada lima putaran perundingan yang difasilitasi oleh Martti Ahtisaari dengan *Crisis Management Initiative*-nya (CMI), tetapi juga menyinggung perundingan sebelumnya yang difasilitasi oleh *Henry Dunant Centre* (HDC). Paparan tentang hal ini dilakukan secara komparatif.
3. Hasil kesepakatan yang dicapai. Sangat jelas bahwa konflik di Aceh bisa diakhiri ketika pihak-pihak yang bertikai telah mencapai kompromi dan persetujuan atas apa yang disengketakan (diperebutkan) dan bagaimana persetujuan itu dihormati dan dilaksanakan kedua pihak secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, kesepakatan dan komitmen kedua pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut merupakan kunci untuk terwujudnya perdamaian di Aceh.

Setelah ketiga bagian tersebut dipaparkan, juga ditambahkan pelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan MoU dan periode setelah Misi Monitoring Aceh selesai menunaikan tugas di Aceh.

Konstalasi Politik Nasional dan Konflik Aceh

Kalau kita mencermati sejarah konflik di Aceh, kita akan melihat konteks politik atau setting politik di Indonesia yang mempengaruhi lahirnya Gerakan Aceh Merdeka dan juga setting politik yang menentukan dinamika konflik tersebut.¹ Konteks dimaksud berupa situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Konteks tersebut juga mencakup hubungan aksi-reaksi yang kompleks yang tidak terbatas hanya pada kontak senjata antara tentara Indonesia melawan gerilyawan GAM, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan, respon dan sikap pemerintah, elit politik, kelompok masyarakat dan dunia internasional. Maka di dalam melihat naik-turun, eskalasi dan deeskalasi, dan intensitas konflik di Aceh hingga penyelesaiannya, kita perlu mempertimbangkan banyak hal, seperti situasi global (yang diwarnai perang dingin dan pasca perang dingin), situasi politik nasional (selama dan sesudah rezim Orde Baru yang otoritarian dan represif), kebijakan ekonomi (yang sangat eksploitatif dan rakus), serta sikap sosial masyarakat (yang takut, pasif, dan antipasti atau yang aktif, kritis dan solider).

Secara sederhana konteks atau situasi yang mengitari kondlik di Aceh dan penyelesaiannya dapat dibagi menjadi konteks yang negatif dan positif. Konteks negatif mencakup sistem internasional yang bipolar dan konspiratif, yaitu berupa persekongkolan antar-negara melawan persekongkolan yang lain. Sistem semacam

ini tidak hanya berorientasi pada kekuasaan (*power struggle*) tetapi juga menekankan sikap permusuhan dan kecurigaan. Dalam sistem ini negara dan pemerintah menjadi hal yang utama, tanpa peduli bagaimana pemerintah memperlakukan manusia dan warga negara. Kepentingan negara dan pemerintah lebih diutamakan daripada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih buruk lagi, pemerintah cenderung menyikapi protes dan tuntutan masyarakat sebagai ekspresi sikap permusuhan dan bahkan ancaman terhadap pemerintah. Pemerintah lalu menjadi represif dan otoriter. Hal ini selanjutnya menciptakan masyarakat yang diam, pasif, dan bahkan takut dan tertekan. Tetapi, begitu kekuasaan represif tumbang, munculah ledakan euphoria yang tidak terkontrol dan bermuara pada berbagai konflik baik vertikal maupun horisontal.²

Perubahan terjadi. Suka atau tidak suka, disengaja atau tidak disengaja, konteks negatif bisa berubah menjadi positif (atau bisa juga lebih buruk). Perubahan positif mengindikasikan sistem global makin berorientasi pada kerjasama dan saling menghormati. Konspirasi bipolar tidak lagi bermanfaat. Setiap negara harus mengurus urusannya sendiri. Karenanya, negara dan pemerintah berpaling kepada warga negaranya sebagai sumber kekuasaan dan legitimasi. Negara dan pemerintah harus lebih akomodatif. Sistem politik demokrasi menjadi sebuah keharusan. Dalam setting yang baru ini kebebasan dan partisipasi aktif warga masyarakat terbuka lebar. Rakyat tidak lagi takut dan tertekan. Penggunaan kekerasan oleh negara menurun drastis. Tuntutan dan protes ditanggapi secara damai, baik melalui proses politik,

1. Pembahasan yang mendalam tentang perubahan konteks politik ini, utamanya konstalasi politik nasional Indonesia, lihat Mangadar Situmorang, *International Humanitarian Intervention in Intrastate Conflicts: Indonesian Case Studies* (Giessen: Johannes-Hermann Verlaag, 2009).

2. Dokumentasi dan analisis tentang konflik di Indonesia lihat misalnya Garry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: KITLV – Obor, 2007) dan Dewi Fortuna Anwar, Helena Bouvier, dkk, eds., *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific* (Jakarta:Obor, 2005)

hukum dan cara-cara dialogis. Selanjutnya, masyarakat menjadi lebih interaktif serta semakin solider terhadap yang lain.³

Pelajaran awal dari perubahan kontekstual ini adalah pentingnya menciptakan dan menjaga kondisi sosial dan politik pada semua tingkatan (global, nasional, dan lokal) yang dapat mencegah terjadinya konflik. Dan pada konflik yang sedang berlangsung, sangat penting untuk mengubah konteks atau lingkungan tersebut guna memudahkan penyelesaiannya secara damai.

Proses penyelesaian damai konflik di Aceh tidak terlepas dari adanya perubahan kontekstual, dari situasi negatif menjadi positif. Ini berlangsung pada skala global (sejak berakhirnya perang dingin pada 1989). Juga pada skala nasional dengan berakhirnya rezim otoritarian Suharto pada 1998. Perubahan ke arah demokrasi memberi ruang yang semakin luas bagi warga masyarakat untuk berbicara, berpartisipasi, dan memperoleh informasi yang kesemuanya bisa bermuara pada semakin kuatnya tekanan kepada pemerintah untuk meninggalkan kebijakannya yang represif atau pendekatan militeristiknya dan menggantinya dengan kebijakan serta pendekatan yang demokratis.⁴

Perubahan utama dari runtuhnya kekuasaan Suharto yang diikuti dengan pudarnya pengaruh politik ABRI (yang lalu berubah menjadi TNI) adalah berakhirnya kebijakan represif dan opresif yang diikuti dengan semakin terbukanya peluang bagi cara-cara

non-militer untuk menyelesaikan persoalan Aceh. B.J. Habibie, yang meneruskan kekuasaan sebagai presiden sesudah Suharto lengser, segera mencabut status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Atas tekanan gerakan pro-reformasi Presiden Habibie membuka kebebasan politik dan mengadopsi berbagai peraturan perundangan yang memberi perlindungan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia (HAM). Di bawah pemerintahan transisi Habibie dilaksanakanlah untuk pertama kalinya sebuah pemilihan umum yang demokratis. Ini diawali dengan pembebasan tahanan politik, pembebasan pers, dan kebebasan membentuk partai-partai politik yang ikut berkompetisi di dalam pemilu.

Pemilihan umum 1999 menghasilkan pemerintahan baru yang lebih demokratis di bawah Presiden Abdurrahman Wahid. Meski memerintah hanya kurang dari dua tahun, Presiden Wahid merintis penyelesaian konflik bersenjata di Aceh melalui perundingan. Wahid mengirim utusan untuk menemui pimpinan GAM untuk membicarakan kemungkinan perundingan. Juga menarik dan penting dimana pemerintah pada saat itu menerima *Henry Dunant Centre* (HDC atau juga dikenal sebagai *the Centre for Humanitarian Dialogue*), sebuah NGO/LSM yang bermarkas di Swis, untuk memfasilitasi perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

Sayangnya, reformasi politik di tahun-tahun pertama pasca tumbangannya Suharto lebih diwarnai oleh euforia (kebebasan politik) yang luar biasa. Kondisi ini mengarah pada gonjang-ganjing politik seperti kecenderungan saling mengkritik dan menyalahkan. Hal ini praktis menghambat upaya damai yang dimulai pemerintahan Presiden Wahid. Lebih jauh lagi, gonjang-ganjing politik (*political turmoil*) tersebut berakhir pada pemakzulan (*impeachment*) Abdurrahman Wahid. Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri, yang partainya Partai Demokrasi

3. Uraian tentang pengaruh perubahan konstelasi politik global terhadap dinamika politik nasional menarik perhatian para penstudi Hubungan Internasional dan Ilmu Politik. Sebagai bahan bacaan lihat misalnya, Yulius P. Hermawan, ed., *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007); Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). Untuk teks dalam bahasa Inggris lihat misalnya Jack Snyder, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict* (NY, London: W. W. Norton & Co, 2000) dan Eric Hobsbawm, *Globalization, Democracy and Terrorism* (London: Abacus, 2007).
4. Salah satu poin penting yang dirumuskan oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) dalam *Responsibility to Protect* (2001) adalah *responsibility to prevent*. Ditegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya konflik adalah dengan membangun sistem politik yang demokratis.

Indonesia Perjuangan – PDIP memenangkan mayoritas kursi di DPR hasil pemilu 1999, kemudian didaulat menjadi presiden menggantikan Wahid pada Nopember 2001.

Harapan untuk mengakhiri persoalan di Aceh secara damai dan bermartabat tetap kuat di awal pemerintahan Megawati. Ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama, pernyataannya bahwa dia tidak akan mengizinkan setetes darah pun dalam penyelesaian konflik di Aceh. Kedua, Megawati berusaha melanjutkan negosiasi yang difasilitasi oleh HDC. Sayangnya, kepentingan politik nampaknya lebih mendominasi pemikiran dan kebijakan Megawati. Agar pemerintahannya lebih stabil, dibandingkan pemerintahan Wahid, Megawati berusaha merangkul kekuatan-kekuatan politik termasuk TNI. Strategi ini menggiring pada kebijakan untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara domestik dan menghidupkan kembali pendekatan koersif dan militeristik. Buktinya, pemerintahan Megawati menghentikan secara sepihak perundingan yang difasilitasi HDC. Selanjutnya, Presiden Megawati mengeluarkan sebuah keputusan pada Mei 2003 tentang pelaksanaan operasi terpadu di Aceh. Tidak dapat dipungkiri bahwa operasi terpadu ini sangat didominasi oleh aksi militer berskala penuh. Kekuatan personil dan senjata dari semua angkatan (darat, laut, udara) dan kepolisian dikerahkan. Ini ditopang oleh anggaran negara yang sangat besar. Tujuannya satu: menghancurkan kekuatan perlawanan GAM. Dengan operasi militer ini secara praktis bisa dikatakan bahwa pemerintahan Megawati mengingkari amanat reformasi dan pernyataannya sendiri yaitu untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai.

Pemilu 2004 selanjutnya membawa perubahan penting terhadap cara penyelesaian konflik Aceh. Megawati dan PDIPnya gagal mempertahankan kekuasaannya. Dan pemilu langsung presiden memberi kemenangan pasangan Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Konsekuensinya, kebijakannya yang nasionalis dan militeristik tidak bisa dilanjutkan.

Pemilu DPR dan Presiden secara langsung pada 2004 secara objektif dapat dibaca sebagai penguatan demokrasi di Indonesia. Prestasi politik ini mendekatkan pemerintah (baik yang di parlemen maupun eksekutif) dengan rakyat. Eksekutif khususnya (yaitu presiden dan jajaran pemerintahannya, termasuk militer dan birokrasi sipil) dituntut lebih bertanggungjawab kepada masyarakat daripada kepada parlemen (DPR/MPR) seperti pada masa Orde Baru. Perlu pula ditambahkan bahwa pemerintah menjadi lebih terbuka pada opini dan aspirasi yang berkembang di masyarakat daripada hanya memperhatikan kepentingan politik yang beredar di Senayan (gedung DPR/MPR). Dan disini harus segera dicatat bahwa aspirasi untuk menyelesaikan persoalan di Aceh secara damai semakin meluas. Hal penting lain yang harus diperhatikan adalah bahwa ketika masih menjabat sebagai Menkopolkam dan Menkokesra (keduanya di bawah pemerintahan Presiden Megawati), SBY dan JK telah terlibat secara intensif di dalam upaya-upaya penyelesaian damai atas berbagai konflik yang terjadi di Ambon (Maluku) dan Poso (Sulawesi Tengah). Artinya, keduanya memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan konflik-konflik di dalam negeri melalui cara-cara damai.

Tidakbeberapa lamasetelahmemenangkankursikepresidenan, Wakil Presiden Jusuf Kalla khususnya menempuh langkah-langkah penting untuk memulai kembali (restart) perundingan dengan para pemimpin GAM di Swedia. Namun, sebelum perundingan berlangsung secara sistematis dan terorganisasi dengan baik, sebuah bencana alam terjadi di Aceh. Bencana tsunami berkekuatan 9 SR pada 26 Desember 2004 meluluh-lantakkan pesisir Aceh (dan juga negara-negara lain di Samudera Hindia). Sekitar 200.000 orang hanyut dan tewas diterjang gelombang tsunami, seratus ribu

lainnya dinyatakan hilang. Seluruh infrastruktur bangunan (rumah, kantor, sekolah, dll), jalan raya dan transportasi serta komunikasi hancur berantakan. Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan (oleh alam) yang maha dahsyat. Sebuah tragedi berskala nasional dan internasional.

Tragedi ini menjadi pemicu penting bagi upaya penyelesaian persoalan Aceh. Bersamaan dengan urgensi penyediaan bantuan kemanusiaan untuk para korban tsunami, penyelesaian konflik Aceh pun menjadi satu keharusan. Dan itu harus dijalankan secara manusiawi, yaitu dialog atau perundingan (negosiasi).

Sejak reformasi bergulir di Indonesia pemimpin GAM (baik yang di Swedia, Malaysia, maupun yang ada di Aceh) mencermati kemungkinan arah perkembangan politik di Indonesia, yang tentu saja membawa pengaruh penting bagi perjuangan GAM. Nampaknya mereka menyadari bahwa reformasi tidak hanya sekadar mengakhiri kekuasaan otoriter Suharto, tetapi juga bisa mengakhiri pendekatan militeristik di Aceh. Lebih penting lagi, perubahan sistem dan konstalasi politik di Jakarta menjadi bahan refleksi dan re-evaluasi terhadap arah dan cara perjuangan GAM sendiri. Misalnya, apakah dengan demokratisasi di Indonesia cita-cita perjuangan GAM untuk merdeka akan bisa diwujudkan, atau, sebaliknya justru akan menyurutkan atau bahkan mengubah keinginan GAM untuk lepas dari NKRI.⁵

Perubahan yang terjadi dalam tubuh GAM bisa menjadi bahan yang berguna untuk meneliti apa sesungguhnya cita-cita dan tujuan perjuangan GAM, apakah betul-betul mau merdeka dan memisahkan diri dari NKRI atau lebih tertuju pada perlakuan yang lebih adil terhadap nasib dan pembangunan rakyat Aceh.

5. Mengenai perubahan di alam GAM, baik karena demokratisasi, operasi terpadu, maupun tsunami, bisa dibaca dalam analisis Edward Aspinall, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?* (Washington: East-West Center, Policy Studies 20, 2005), khususnya hal. 7-31.

Demikian juga halnya dengan dasar ideologis yang dipakai untuk men-justifikasi perjuangan GAM: apakah Islam atau identitas etnik Aceh atau ketidak-adilan yang menimpa masyarakat Aceh. Ini tidak mengesampingkan fakta bahwa tindak kekerasan yang secara sistematis dan berlangsung lama yang berakibat pada *gross violation of human rights* (berupa pembunuhan, penembakan, penyiksaan, perampasan, pemerkosaan, dan penahanan tanpa prosedur hukum) telah memperluas dukungan dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Tidak tersedia cukup bukti untuk menunjukkan adanya perubahan tujuan dan cara perjuangan GAM di tahun-tahun pertama reformasi. Yang bisa dicatat adalah dua hal. Pertama, pimpinan GAM bersedia berunding sebagaimana ditawarkan oleh Presiden Wahid yang sesaat juga dilanjutkan oleh penggantinya Megawati. Kesepakatan mengenai Jeda Kemanusiaan dan Penghentian Permusuhan dihasilkan lewat perundingan tersebut merupakan bukti penting. Kedua, di samping melakukan perundingan, GAM juga mencoba memperkuat posisi politik dan membangun kekuatan bersenjata selama masa awal reformasi. Selama gonjang-ganjing politik berlangsung di Jakarta, pengaruh GAM di Aceh semakin luas. Sekitar tujuh puluh persen wilayah pemerintahan daerah dan desa di Aceh berada di bawah pengaruh GAM. Jajaran birokrasi pemerintah pusat di Aceh nyaris tidak lagi berfungsi. Bersamaan dengan itu, tuntutan untuk merdeka yang diperjuangkan GAM diikuti oleh tuntutan untuk melaksanakan jajak pendapat atau referendum: apakah Aceh tetap menjadi bagian integral atau terpisah dari Indonesia. Sebagai catatan, pengalaman referendum di Timor Timur sering dijadikan sebagai acuan atau preseden untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Jajaran mahasiswa dan penduduk perkotaan di Aceh Yang tergabung dalam Sentral Informasi untuk Referendum Aceh – SIRA) merupakan kelompok yang paling kencang menyuarakan referendum di Aceh.

Dua peristiwa lain yang mempengaruhi posisi politik dan kekuatan GAM adalah pelaksanaan operasi terpadu di bawah hukum darurat militer Mei 2003 dan bencana tsunami. Operasi terpadu, yang seperti disinggung di atas lebih merupakan operasi militer yang bersifat massif, mengurangi secara signifikan kekuatan GAM. Pengerahan 40.000 personel kekuatan darat, laut, udara dan kepolisian berhasil melemahkan GAM.⁶ Logikanya, GAM akan sulit melanjutkan perjuangannya dengan cara yang sama karena kekuatan yang tidak berimbang dengan kekuatan militer yang dimiliki Indonesia.

Peristiwa kedua adalah bencana tsunami. Pemimpin GAM menunjukkan keprihatinan yang mendalam akan banyaknya korban dan dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan gempa dan gelombang tsunami. GAM mengambil sikap untuk mendahulukan penyediaan dan pemberian bantuan kemanusiaan. GAM memilih menghentikan perlawanan bersenjata untuk memberi kesempatan kepada para pekerja kemanusiaan internasional untuk menyalurkan bantuan kepada para korban. Lebih jauh lagi, dalam situasi keprihatinan demikian GAM membuka diri terhadap himbuan dan tekanan masyarakat internasional agar mereka bersedia berunding kembali dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Aceh. Himbuan dan tekanan internasional juga ditujukan kepada pemerintah Indonesia.⁷

Dari paparan di atas, sekurang-kurangnya terdapat tiga poin penting terkait dengan konteks perdamaian di Aceh.

Pertama, demokratisasi yang diusung reformasi telah membuka peluang bagi perundingan untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Reformasi menuntut kebebasan politik. Reformasi juga menuntut

perlindungan dan penghormatan HAM. Reformasi menuntut pengakhiran cara-cara kekerasan, pendekatan militeristik, dan tindakan represif. Terlepas dari kepentingan para pemimpin politik di Indonesia untuk menarik dukungan suara dalam pemilu, mereka (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan S.B. Yudhoyono) menyatakan diri sebagai pemimpin yang reformis. Artinya, mereka membuka diri pada pendekatan-pendekatan dialogis, damai, dan bermartabat untuk menyelesaikan konflik termasuk di Aceh.

Kedua, sejalan dengan perubahan politik di Jakarta dan Indonesia pada umumnya, pimpinan GAM juga nampaknya membuka diri pada kemungkinan penyelesaian persoalan di Aceh melalui cara-cara non-bersenjata.

Ketiga, bencana alam tsunami telah “memaksa” pemerintah Indonesia dan GAM untuk menyelesaikan konflik di Aceh lebih cepat dan manusiawi. Seiring dengan kepentingan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para korban tsunami, kedua pihak menunjukkan niat baik untuk menghentikan kontak senjata. Selanjutnya, mereka sama-sama melihat penyelamatan, bantuan, dan pembangunan di Aceh sebagai hal yang sangat mendesak dan utama.

Berdasarkan ketiga poin di atas, pelajaran penting yang dapat ditarik adalah pentingnya sikap terbuka dan responsif terhadap setiap perubahan dan peristiwa yang ada di sekitar terjadinya konflik serta mengupayakannya menjadi peluang yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian konflik secara damai, bermartabat, manusiawi, dan sekaligus efektif.

Pelajaran dari Proses Perundingan: Menuju Kesepakatan Damai

Di tengah perubahan politik di Indonesia proses ke arah penyelesaian damai konflik di Aceh dimulai dan terus bergulir. Guliran perundingan kian cepat dan berkelanjutan saat SBY

6. *Ibid.* hal. 13. Lihat juga International Crisis Group (ICG), *A New Chance for Peace*, Asia Briefing No. 40, 15 Agustus 2005, hal. 4-6.

7. Edward Aspinall, *Ibid.*, hal. 19-21.

dan JK menjadi presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2004. Urgensi penyediaan bantuan kemanusiaan akibat tragedi tsunami yang meluluh-lantakkan Aceh menambah akselerasi, urgensi dan signifikansi perundingan. Tidak ada lagi ruang yang tersisa, tidak ada lagi waktu yang perlu dibuang percuma, dan tidak ada lagi alasan yang harus dicari-cari, kecuali segera berunding dan menyelesaikan persoalan Aceh. Dalam istilah W. Zartman, ahli resolusi konflik, telah tercipta “ripe moment”, satu situasi yang matang atau kondusif untuk memulai dan melaksanakan perundingan serta menghasilkan kesepakatan damai.

Inisiatif dan pendekatan non-formal (second-track approach)

“Saat yang tepat” atau ripe moment tidak muncul secara tiba-tiba atau dengan sendirinya. Itu adalah hasil kerja. Artinya “saat yang tepat” itu harus direkayasa, diciptakan, dibangun dan dijaga. Di samping karena perubahan-perubahan makro dan bencana alam tsunami, usaha untuk menciptakan “saat yang tepat” untuk perundingan diawali dengan perubahan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada dua pendekatan yang berubah sejak kekuasaan Suharto tumbang. Pertama, pendekatan keamanan (yang bersifat militeristik) ke pendekatan politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum. Ini ditunjukkan pernyataan Presiden B.J. Habibie ketika berkunjung ke Masjid Baitrrahman, Banda Aceh, pada 26 Maret 1999. Dalam pernyataannya Habibie mengatakan akan membebaskan narapidana yang ditahan selama operasi militer (1989-1998) dan akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.⁸ Pendekatan yang lebih komprehensif dan non-militeristik ini pada dasarnya dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Wahid. Meskipun Presiden Megawati

mencoba meneruskannya, pendekatan militeristik kembali dominan. Ini ditunjukkan oleh keputusannya yang menetapkan Aceh dalam keadaan darurat militer pada Mei 2003.

Kedua, adanya perubahan dari pendekatan formal-institusional ke pendekatan non-formal dan personal. Pernyataan Habibie untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara politik dan melalui pembangunan terbentur pada hambatan-hambatan formal dan institusional. Tidak ada dukungan riil dari lembaga-lembaga pemerintahan lainnya terhadap keputusan itu. Baik militer maupun DPR, dan juga jajaran eksekutif pemerintahan, tidak menunjukkan dukungan nyata. Hal ini bisa dikatakan disebabkan tidak stabilnya pemerintahan Habibie, karena dianggap hanya sekadar pemerintahan transisional. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dia mencoba mendekati GAM secara personal dan non-formal. Ini dilakukan dengan mengirim utusan khusus (pribadi), yaitu Bondan Winarno, untuk menemui pimpinan GAM, khususnya yang ada di Aceh. Usaha yang bersifat rahasia ini dimaksudkan untuk membicarakan kemungkinan dilakukannya perundingan dan penyelesaian damai. Hasilnya adalah perundingan yang bermuara pada disepakatinya Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause).

Inisiatif dan usaha yang bersifat non-formal dan personal tidak ada ketika Megawati menjadi presiden. Tetapi, usaha semacam itu kembali ditempuh ketika SBY dan JK menggantikan Megawati. Peran Wapres JK sangat dominan dalam hal ini. Dia mengutus dr. Farid Husein untuk menemui pimpinan GAM baik yang di Aceh, Singapura, Malaysia maupun di Swedia. Sebenarnya usaha ini sudah dilakukan sejak Mei 2003, ketika SBY dan JK masing-masing menjabat sebagai Menkopolkam dan Menkokesra di bawah pemerintahan Megawati.

Prakarsa dan usaha-usaha yang bersifat non-formal, non-institusional, dan sedikit-banyak bersifat rahasia ini bisa

⁸ Lihat Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006), hal. 21-22.

dikategorikan sebagai pelaksanaan dari second-track negotiations atau second-track diplomacy. Hal ini ditempuh dikarenakan pertimbangan praktis dan politis. Praktis dalam arti untuk menjadikannya sebagai perundingan formal dan institusional diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Pertimbangan politisnya karena persoalan Aceh (dan kemungkinan penyelesaiannya) sangat sensitif. Ontohnya, terlepasnya Timor Timur (lewat jajak pendapat Agustus 1999) telah menjadi salah satu pertimbangan krusial bagi pemilih, militer, politisi di Jakarta untuk menolak kelanjutan kepemimpinan Habibie. Maka, seandainya pendekatan second-track ini gagal, hal itu diperkirakan tidak membawa pengaruh yang membahayakan kekuasaan pemerintah.

Pendekatan jalur-kedua (second-track approach) ini juga terkait dengan dilibatkannya pihak ketiga yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan negosiasi. Hebatnya, pihak ketiga ini adalah LSM atau non-governmental organizations (NGOs) dan bukan Negara atau organisasi antar-negara (IGO), semacam PBB, Uni Eropa atau ASEAN. NGOs dimaksud adalah Henry Dunant Centre (HDC) dan Crisis Management Initiative (CMI).

Berbeda dengan HDC yang datang kepada Presiden Wahid dan menawarkan jasa baiknya untuk memfasilitasi perundingan antara pemerintah Indonesia dengan GAM, keterlibatan CMI yang dipimpin Martti Ahtisaari justru karena permintaan pihak Indonesia. Dalam kasus ini, Farid Husein lewat Juha Christensen (dari Interpeace Organization) meminta bantuan Martti Ahtisaari dan CMI-nya untuk memfasilitasi perundingan damai tersebut. Juha Christensen selanjutnya berupaya meyakinkan Ahtisaari dan pihak GAM yang ada di Swedia, sementara Farid Husein, atas jaminan JK dan SBY, bertugas meyakinkan pihak Indonesia.

Pendekatan non-formal dan rahasia ini juga ditujukan kepada Damien Kingsbury, seorang warga Australia yang

menjadi penasihat politik GAM. Damien, yang dicekal masuk ke Indonesia, secara diam-diam didatangkan ke Jakarta dan bertemu dengan Jusuf Kalla di Hotel Hilton. Oleh JK dia diminta untuk mendesak GAM bersedia duduk di meja perundingan. Jika Damien tidak bersedia, dia akan dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pembunuhan rakyat Aceh.⁹

Pendekatan non-formal dan tertutup berhasil menuju perundingan formal dan terbuka tidak terlepas dari kondisi dan/atau syarat lainnya. Di antaranya adalah adanya kesungguhan dan kemauan yang tulus dan jujur dari masing-masing pihak. Juga, adanya dukungan politik yang kuat dari masing-masing pihak. Harus pula ditambahkan bahwa pada pertemuan non-formal sudah ada pembicaraan awal (dan sampai kadar tertentu kesepakatan) tentang formula perundingan formal yang akan dilaksanakan. Di sini tercakup tentang siapa yang menjadi mediator, bagaimana, dimana dan kapan perundingan berlangsung, serta apa substansi atau isi perundingan dan kemungkinan kesepakatan yang akan dicapai.

Dukungan politik dan komitmen yang kuat

Posisi SBY dan JK sebagai presiden dan wakil presiden tidak pelak lagi menunjukkan kekuasaan pemerintahan tertinggi. Mereka tidak hanya secara konstitusional sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga secara politik mempunyai legitimasi yang sangat luas dan kuat karena dipilih secara langsung lewat pemilu 2004. Artinya, mereka dapat bertindak secara otoritatif tanpa harus selalu diganggu oleh anggota DPR/MPR, jajaran pemerintahan di bawah, dan lawan-lawan politiknya.

9. Hal ini dikatakan oleh Farid Husein sebagaimana dituturkan oleh Moch. Nurhasim, "Perundingan Helsinki: Jalan Menuju Damai Aceh" dalam *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* disunting oleh Ikrar Nusa Bakti (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008) hal. 124-125.

Dalam sistem politik dan pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, segala keputusan yang diambil presiden dan wakil presiden secara normatif (konstitusional dan teoritis) akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode pemerintahannya.

Hal yang sama pentingnya dengan kekuasaan yang berada di tangan SBY-JK adalah komitmen mereka pada upaya penyelesaian persoalan di Aceh secara damai dan bermartabat. Keduanya memiliki keyakinan yang kuat atas cara-cara damai. Ini ditunjukkan oleh pengalaman, usaha dan keberhasilan mereka menyelesaikan secara damai konflik-konflik yang terjadi di Poso (Sulawesi Tenggara) dan Ambon (Maluku) ketika keduanya duduk sebagai menteri kabinet Megawati.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa pendekatan non-formal yang dilakukan oleh Farid Husein dan perundingan-perundingan formal selanjutnya memperoleh dukungan kekuasaan, moral, dan finansial yang sangat besar dari presiden dan wakil presiden. Sebagai bahan bandingan, meskipun presiden-presiden pasca Suharto menyatakan akan menyelesaikan konflik di Aceh secara damai, mereka tidak memiliki kekuasaan politik yang kuat dan stabil. Kekuasaan Habibie terus digugat sebagai hanya transisi yaitu dari sejak menerima kekuasaan dari Suharto (Mei 1998) sampai pemilu 1999. Meski mendapatkan dukungan pada saat-saat terakhir pemilihan oleh MPR, Presiden Wahid ternyata gagal menjaga dan memperkuat dukungan. Kekuasaannya secara terus-menerus digerogeti kelompok nasionalis (seperti PDIP) dan kelompok konservatif (terutama militer). Akibatnya, perundingan yang sedang berjalan tidak mendapat dukungan sepenuhnya karena Presiden Wahid terus diterpa kecaman dan kritikan. Demikian juga dengan Megawati. Lebih parah lagi, anggota tim perunding GAM yang akan berangkat ke Tokyo untuk melanjutkan perundingan mengenai penghentian permusuhan (Cessation of Hostilities)

April 2003 ditangkap dan ditahan di Banda Aceh. Fakta-fakta ini menunjukkan lemahnya kekuasaan politik dan komitmen moral dari pemimpin tertinggi pemerintahan akan menghambat proses penyelesaian damai.

Komitmen pemerintah SBY-JK kepada perundingan damai secara khusus terlihat dari komunikasi yang terus-menerus antara JK dengan tim non-formal yang dipimpin Farid Husein. Komunikasi yang intensif dan dukungan massif juga ditunjukkan ketika perundingan memasuki tahapan formal yang dipimpin oleh Awaluddin Hamid sejak Januari 2005. Mesin faksimil dan telepon di ruang kerja dan di kamar tidur JK tetap tersambung untuk menjaga komunikasi dengan tim perunding di Helsinki.

Perlu ditambahkan bahwa baik SBY maupun JK mampu secara elegan menjawab kecaman dari para pengritiknya. Tanggapan dan jawaban mereka bersandar pada konstitusi dan rasionalitas politik. Misalnya, mereka secara konsisten menegaskan bahwa persoalan-persoalan dalam negeri harus diselesaikan melalui musyawarah (yang berarti dialog dan negosiasi) sesuai dengan amanat UUD. Contoh lainnya, JK sering mengatakan bahwa pemberontakan sering muncul dikarenakan ketidak-adilan dan persoalan ekonomi. Karena itu, menurutnya, rasa keadilan dan pembangunan ekonomi harus dipenuhi.

Pilihan pihak ketiga (mediator) yang tepat

Seperti disinggung di atas, mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dan lembaganya (Crisis Management Initiative – CMI) dipilih dan diminta pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi perundingan damai. Pilihan atas CMI juga didukung dan disetujui pihak GAM. Ini merupakan satu syarat penting dimana pihak ketiga yang menjadi mediator atau fasilitator diterima oleh kedua pihak yang akan berunding.

Pilihan dan dukungan atas CMI didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Pertama, Presiden Ahtisaari memiliki pengaruh politik yang luas baik di negara-negara Uni Eropa maupun di PBB. Dia memiliki akses politik dan mampu mendapatkan dukungan yang diperlukan dari negara-negara dan/atau organisasi internasional. Kedua, Martti Ahtisaari telah memiliki pengalaman yang luas dan berhasil di dalam memfasilitasi penyelesaian damai konflik, seperti di Kosovo dan di Afrika. Kepemimpinan, pengalaman, dan reputasi CMI jauh lebih hebat dibandingkan dengan organisasi HDC yang memfasilitasi perundingan awal antara pemerintah Indonesia dengan GAM.

Kapabilitas dan kredibilitas Ahtisaari dan CMI-nya tidak dapat diragukan. Tetapi, bagaimana dengan netralitasnya? Dalam teori ada semacam tuntutan bahwa mediator haruslah netral atau imparial, artinya tidak memihak. Dalam praktik, prinsip itu memerlukan fleksibilitas sekaligus rasionalitas. Ini ditampilkan dengan sangat baik oleh CMI.

Jauh sebelum perundingan dimulai, Jusuf Kalla telah melakukan komunikasi yang intensif dengan Martti Ahtisaari. Kepada Ahtisaari, JK menyampaikan posisi Indonesia yaitu bahwa Aceh tetap menjadi bagian integral Indonesia dan penyelesaian konflik di Aceh harus tetap dalam kerangka NKRI. Tawarannya adalah otonomi khusus untuk Aceh. Posisi ini dimengerti dengan baik oleh Ahtisaari. Dan inilah posisi awal dan akhir yang harus disampaikan dan dirundingkan dengan pihak GAM. Seperti ditulis oleh Moch. Nurhasim “Salah satu pertimbangan kenapa Ahtisaari dipilih karena dalam pandangan RI, ada persepsi bahwa Ahtisaari setuju dengan konsep otonomi khusus sebagai kerangka penyelesaian separatism di Aceh”.¹⁰ Terhadap permintaan dan posisi Indonesia tersebut, Ahtisaari member syarat bahwa

“pemerintah Indonesia benar-benar ingin menyelesaikan persoalan separatism GAM secara tuntas”.¹¹

Persetujuan Ahtisaari atas posisi politik Indonesia dalam perundingan tersebut tidak harus dibaca sebagai mencederai prinsip netralitas dari pihak ketiga. Sikap demikian juga tidak harus dilihat sebagai merugikan pihak GAM. Berbagai analisis yang dilakukan oleh CMI tentang GAM, sejarahnya, perjuangannya dan kekuatannya, nampaknya bermuara pada kesimpulan bahwa otonomi khusus di Aceh merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai.

Posisi dan kredibilitas para perunding dari kedua pihak yang bertikai pun perlu disinggung. Pihak GAM diwakili oleh ada

Konsistensi dalam perundingan

Persiapan yang matang yang dilakukan secara non-formal, adanya dukungan kekuasaan dan komitmen moral untuk melakukan perundingan damai, dan adanya mediator yang kapabel dan kredibel merupakan serangkaian faktor yang bisa menjamin perundingan formal dan institusional akan berjalan dengan sangat efektif. Namun, hal itu perlu dilengkapi dengan konsistensi pada tahapan-tahapan perundingan. Juga perlu kreatifitas yang dimiliki baik para perunding maupun mediator. Ini dimaksudkan untuk menghindari dead-lock atau jalan buntu. Dengan kata lain, agar perundingan dapat berjalan dan sampai pada hasil yang diharapkan, setiap pihak yang terlibat dalam perundingan harus menunjukkan sikap saling menghormati dan fleksibilitas yang tinggi.

Perundingan di Helsinki berlangsung selama lima putaran. Sebulan setelah bencana tsunami putaran pertama berlangsung pada 27-29 Januari 2005. Ini dilanjutkan dengan putaran kedua

10. Lihat Moch. Nurhasim, *Ibid.*, hal. 121.

11. *Ibid.*, hal. 127-8.

pada 21-23 Februari, ketiga pada 12-16 April, keempat pada 26-31 Mei, dan terakhir 12-17 Juli 2005. Putaran pertama dan kedua tercatat sebagai awal yang sulit. Ini terutama terkait dengan peletakan dasar rasa saling percaya (trust building) di antara para perunding serta terhadap proses perundingan itu sendiri. Tahapan awal ini juga ditujukan untuk mempelajari posisi politik masing-masing yang akan dirundingkan.

Proses trust-building berjalan dengan baik. Pihak perunding dari pemerintah Indonesia dan perunding GAM nampak semakin saling mempercayai satu sama lain. Demikian juga dengan pihak fasilitator atau mediator CMI nampak lebih diterima dan dipercaya oleh kedua pihak yang berunding. Putara perundingan selanjutnya dapat berlangsung secara bersamaan. Artinya, kedua pihak yang bertikai dan berunding serta negosiator duduk bersama dan membuat agenda perundingan.

Proses perundingannya sendiri berlangsung sederhana, tetapi dengan aturan main yang jelas. Misalnya, kedua belah pihak tidak boleh melakukan konferensi pers sebelum CMI melakukannya. Ini ditujukan untuk menghindari salah peneritaan dan salah informasi. Juga ditetapkan bahwa masing-masing pihak tidak boleh menghentikan perundingan secara sepihak. Yang dapat menghentikan perundingan hanyalah CMI.

Terdapat dua prinsip yang diterapkan oleh CMI dan diterima oleh pihak-pihak yang berunding. Yang pertama adalah prinsip “nothing is agreed until everything is agreed”. Artinya, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai dan mengikat apabila salah satu pihak tidak menyepakatinya. Persetujuan kedua pihak atas penyelesaian sebuah persoalan menjadi syarat mutlak.

Prinsip kedua adalah “comprehensiveness” yang berarti semua masalah yang terkait dengan penyelesaian persoalan di

Aceh harus dibicarakan dan diselesaikan. Ini berbeda dengan perundingan-perundingan sebelumnya yang bersifat parsial atau bertahap. Misalnya, kesepakatan tentang Jeda Kemanusiaan dan Penghentian Permusuhan dijadikan sebagai syarat atau tahapan menuju pembicaraan yang lebih substansial. Di Helsinki, semua hal dibicarakan dan harus disepakati. Ini tercermin dari hasil perundingan tersebut, yang tidak hanya mencakup bagaimana perundingan berlangsung, tetapi juga mencakup substansi kesepakatan yang dipandang dapat mengakhiri konflik serta mekanisme pelaksanaan isi kesepakatan tersebut.

Maka, setelah lima babak atau putaran perundingan, kedua pihak sampai pada perumusan akhir kesepakatan damai pada 17 Juli 2005. Juga disepakati bahwa kesepakatan tersebut akan ditandatangani dan berlaku efektif pada tgl 15 Agustus 2005, yang kemudian dikenal dengan Helsinki Memorandum of Understanding (Helsinki MoU). Dan dengan kedua prinsip di atas, perdamaian yang langgeng (sustainable peace) di Aceh akan dapat diwujudkan.

Kreatifitas dalam Perundingan: pemberian kompensasi politik dan konsesi ekonomi

Salah satu hal yang menonjol dari pelaksanaan perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM adalah dimunculkannya tawaran-tawaran politik dan ekonomi. Sebelumnya posisi Indonesia selalu terpaku pada “NKRI sebagai harga mati”. Tawaran yang diberikan pun hanya sebatas “otonomi khusus atau status istimewa untuk Aceh”. Lebih jelek lagi, tawaran otonomi khusus ini seringkali diikuti dengan ancaman “jika tidak menerima otonomi khusus, tindakan militer akan ditempuh”.

Posisi dan tawaran semacam ini tidak produktif dalam arti tidak mampu menarik atau mendorong GAM untuk mengendurkan tuntutanannya untuk merdeka. Lagi pula, pengalaman di masa lalu

tentang status keistimewaan Aceh atau otonomi khusus Aceh dianggap sebagai retorika belaka karena tidak pernah diwujudkan sebagaimana mestinya. Ditambah dengan kuatnya peran politik militer dalam pengambilan keputusan di Indonesia, preseden semacam ini membuat GAM tidak beranjak dari posisi dan perjuangan politiknya, yaitu terpisah dari NKRI.

Kreativitas sangat diperlukan guna menghindari jalan buntu perundingan. Wapres Jusuf Kalla tercatat sebagai orang yang berjasa dalam membangun kreativitas perundingan ini. Meskipun tetap dalam kerangka yang sama (mempertahankan NKRI lewat otonomi khusus), JK menawarkan kompensasi-kompensasi politik dan konsesi-konsesi ekonomi yang mampu mendorong GAM merevisi posisi politiknya. Pada pertemuan dengan pimpinan GAM di Kuala Lumpur, 31 Oktober 2004, tim perunding yang dibentuk JK menawarkan lahan pertanian dan perkebunan untuk dikelola oleh pemerintah daerah Aceh dan anggota GAM. Juga diberikan dana kompensasi enam juta dolar kepada para anggota GAM. Dijanjikan pula upaya-upaya perbaikan dan pembangunan madrasah dan mesjid. Imbalan terhadap tawaran ini adalah GAM diminta untuk menyerahkan senjata yang dimilikinya.¹²

Kreativitas semacam ini terus berlangsung pada putaran-putaran perundingan formal dari Januari hingga Juli 2005. Yang menarik dicatat disini adalah tentang pemerintahan Aceh dan pembentukan partai-partai politik lokal. Seperti disinggung GAM tidak tertarik dengan istilah “otonomi khusus” atau “daerah istimewa” karena pemerintah pusat tidak pernah konsisten mewujudkannya. Alternatifnya adalah “pemerintahan Aceh” (the governing of Aceh). Peraturan tentang “pemerintahan Aceh” menetapkan bahwa pemerintahan di Aceh dipilih melalui pemilu lokal. Dan untuk itu, diperkenankan membentuk partai-partai lokal.

12. Lihat ICG, Aceh: A New Chance for Peace, *Ibid.* hal. 2-3.

Hasil perundingan ini ditetapkan dalam Kesepakatan Helsinki.¹³

Istilah tentang “pemerintahan Aceh” maupun pembentukan partai-partai lokal segera menuai kritikan dan kecemasan dari politisi “nasionalis” dan para komentator di Jakarta.¹⁴ Tetapi, Presiden SBY dan khususnya Wapres JK tetap tegar sembari menegaskan bahwa kompensasi-kompensasi semacam itu tidak membahayakan integrasi nasional dan sebaliknya akan mampu menjaga keutuhan wilayah dan persatuan nasional.¹⁵

Pembebasan tahanan GAM dan pemberian amnesti serta dukungan dana bagi integrasi para mantan anggota GAM melengkapi kompensasi politik dan ekonomi yang diberikan pemerintah. Semua ini menjadi insentif yang sangat penting untuk dipertimbangkan GAM. Di samping hal-hal lain seperti yang telah disinggung di atas (seperti proses demokratisasi di Indonesia dan kesungguhan pemerintahan SBY dan JK, peristiwa tsunami serta jaminan dunia internasional), dengan kompensasi dan konsesi tersebut GAM memiliki sejumlah hal untuk dipertimbangkan dan me-revisi posisi dan tawaran politiknya. Maka, pada putaran kedua GAM membuat terobosan yaitu menerima tawaran-tawaran baru tersebut.¹⁶

Pelajaran penting dari sisi kreatifitas ini adalah pentingnya mencari terobosan-terobosan baru yang bisa menggiring perundingan agar lebih progresif dan produktif. Terobosan-terobosan dimaksud pada hakikatnya mencoba membawa para

13. Lebih lengkap lihat *MoU Helsinki*, poin 1.1. dan 1.2.

14. Lihat misalnya “Anggota Komisi I DPR Kecewa Pemerintah Lanjutkan Perundingan Babak Kelima”, *Kompas*, 11 Juli 2005 dan “DPR Minta MOU Dijelaskan”, *Kompas*, 23 Agustus 2005.

15. Lihat “Presiden: Jangan Khawatir Aceh Lepas”, *Kompas*, 10 Agustus 2005, dan “NKRI Tak Bisa Ditawar”, *Kompas* 15 Agustus 2005.

16. Patut ditegaskan bahwa tidak ada pernyataan resmi yang mengatakan bahwa GAM menggugurkan (abort) tujuan perjuangannya yang awal, yaitu merdeka. Tetapi dengan melihat isi *MoU Helsinki* tuntutan tersebut dengan sendirinya gugur. Mengenai terobosan yang dibuat GAM lihat Edward Aspinall, *Ibid.*, hal. 25-31.

pihak yang bertikai untuk melihat secara rasional dan realistis kebaikan (keuntungan) dan kebaikan (kerugian) dari konflik serta kemungkinan penyelesaiannya secara damai. Kreatifitas penyelesaian konflik haruslah bersandar pada rasionalitas.

MoU Helsinki: Sebuah Konsesi Jalan Tengah

MoU Helsinki mencakup enam hal penting yang dapat menjamin perdamaian abadi di Aceh. Ke enam hal tersebut adalah (1) pemerintahan mandiri di Aceh, (2) hak-hak asasi manusia, (3) amnesti dan reintegrasi, (4) keamanan, (5) pembentukan Misi Monitoring di Aceh (AMM), (6) mekanisme penyelesaian perselisihan.

Ada tiga pelajaran penting yang bisa ditarik dari isi kesepakatan damai (MoU Helsinki) ini.

Pertama, Kesepakatan Damai ini merupakan sebuah kesepakatan yang menghormati martabat dan harga diri masing-masing pihak. Tidak ada pihak yang merasa kalah atau dikalahkan. Tidak ada pihak yang merasa malu atau dipermalukan. Penyelesaian damai lewat perundingan tetap membuat kedua pihak berdiri tegak dan kembali ke tempat masing-masing dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kondisi yang disebut sebagai win-win solution ini membuat kedua belah pihak merasa sebagai pemenang dan secara bersama-sama mengemban tanggungjawab untuk menjaga perdamaian dan membangun Aceh. Lebih jauh lagi, seperti dikatakan ketua tim perunding Indonesia Awaluddin Hamid, “tidak ada lagi perbedaan antara ‘kami’ dan ‘mereka’”. Yang ada sekarang adalah ‘kita’, untuk membangun Aceh”. Ini ditimpali oleh ketua juru runding GAM Malik Mahmud, “Hari ini kita mengakhiri konflik...dan meninggalkan hari bersejarah ini beranjak menuju masa depan yang lebih baik”. Pernyataan kedua pemimpin delegasi tersebut disampaikan saat menandatangani

MoU Helsinki. Dan dalam pembukaan MoU tersebut dituliskan :

Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka terhadap penyelesaian damai, komprehensif dan abadi atas kondlik di Aceh dengan harga diri dan martabat.

Kedua, penyelesaian damai yang bermartabat tersebut dapat menjawab persoalan pokok yang menggiring kedua pihak terlibat dalam konflik bersenjata selama hampir tigapuluh tahun. Dari sisi Indonesia, kepentingan utama untuk menjaga Aceh sebagai bagian integral NKRI dapat dicapai. Ini adalah capaian yang tidak ternilai harganya. Sedangkan dari sisi GAM, aspek-aspek utama yang menjadi sebab munculnya GAM dan yang menjadi isi perjuangan GAM selama ini bisa diraih. Kebebasan politik dan hak-hak untuk mengelola sendiri pemerintahan, sosial-budaya dan kekayaan Aceh telah diperoleh melalui kesepakatan damai tersebut. Sekalipun tidak berdiri sebagai negara yang berdiri sendiri dan berdaulat, kesepakatan damai tersebut menjamin hak-hak politik, sosial, dan ekonomi mereka secara adil. Rumusan tentang “pemerintahan rakyat Aceh” merupakan formulasi politik yang mendasari dan diakuinya pemerintahan di Aceh yang mandiri dalam NKRI.

Pemerintahan mandiri,¹⁷ atau the governing of Aceh, mengartikan bahwa Aceh memiliki kewenangan yang luas di dalam mengatur daerahnya sendiri. Tetapi, harus ditegaskan bahwa kewenangan itu berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam uraian lebih jauh disebutkan bahwa Aceh dapat memilih pemerintahnya sendiri lewat pemilihan

17. Istilah “pemerintahan mandiri” digunakan oleh Bob Sugeng Hadiwinata untuk mencakup semua otoritas dan keistimewaan Aceh yang diberikan oleh Mou Helsinki. Dalam perundingan GAM mengajukan “self-government” untuk Aceh dan menolak “special autonomy”. Dalam MoU Helsinki istilah yang digunakan adalah “the governing of Aceh”. Lihat Bob SUGeng Hadiwinata, “Dari Kekerasan Menuju ke Pemilihan: Resolusi Konflik dan Demokratisasi di Aceh” dalam Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck, eds., *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hal. 145-171.

umum daerah, dapat membuat aturan-aturan khusus sesuai dengan karakter sosial, budaya dan agama yang ada di Aceh. Dalam kasus terakhir ini misalnya, Aceh dimungkinkan membuat aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Syariah Islam. Lebih lanjut, dalam rangka membentuk pemerintahan yang mandiri, disepakati bahwa Aceh dapat membentuk partai-partai lokal yang berkompetisi secara demokratis. Dan dalam mengelola, menggali, dan memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam ditegaskan bahwa pemerintah dan rakyat Aceh akan memperoleh manfaat yang lebih besar.¹⁸

Ketiga, Kesepakatan Damai Helsinki juga memutuskan perlunya mekanisme dan kekuatan yang bisa menjamin pelaksanaan isi kesepakatan tersebut dan selanjutnya mendukung terwujudnya perdamaian di Aceh. Hal ini terutama dilihat dari hadirnya Aceh Monitoring Mission (AMM) yang mengemban mandat mengawasi pelaksanaan isi kesepakatan tersebut sebagaimana ditetapkan pada poin kelima MoU Helsinki. AMM terdiri dari dan didukung sepenuhnya oleh Uni Eropa dan beberapa negara anggota ASEAN. Tugas pertama dan utama mereka adalah mengawasi pembubaran (decommission) tentara GAM dan pelaksanaan peletakan, penyerahan dan penghancuran senjata yang dimiliki GAM (disarmament), mengawasi pergerakan dan penarikan pasukan organik TNI (demobilisation), dan mengawasi pelaksanaan reintegrasi (reintegration). Ketiga bidang tugas ini, sering disingkat dengan tugas DDR, sangat strategis dan taktis untuk menghindari terjadinya kontak senjata. Lebih dari itu, lewat proses rekonsiliasi para mantan anggota dan pendukung GAM akan terintegrasi ke dalam masyarakat dan dapat menjalani kehidupan yang lazim tanpa harus takut terhadap aparat keamanan. Dengan kredibilitas, kapabilitas dan profesionalitas

18. Lihat isi Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

yang dimiliki AMM, proses DDR ini berlangsung selama sekitar 15 bulan dan berjalan dengan sangat baik.¹⁹

Sebagai lanjutan dari decommissioning dan demobilisasi, yang tidak kalah penting adalah reintegrasi. Proses reintegrasi ini ditempuh lewat pelepasan atau pembebasan pimpinan, anggota, dan simpatisan GAM dari penjara-pejara di seluruh Indonesia. Ini diikuti dengan pemberian kompensasi-kompensasi sosial dan ekonomi. Artinya, mereka diberikan modal uang dan akses ekonomi sebagai modal penting untuk memulai kehidupan sosial dan ekonomi bersama dengan anggota masyarakat lainnya secara normal.

Pelajaran tentang kehadiran AMM sangat penting mengingat pengalaman masa lalu. Jeda Kemanusiaan dan Penghentian Permusuhan yang dicapai pada masa Presiden Wahid dan Presiden Megawati tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak ada institusi atau/dan mekanisme yang bisa mengawasi pelaksanaannya. Sering terjadi dan dalam banyak kasus kesepakatan damai yang dicapai di meja perundingan tidak dapat dilaksanakan karena salah satu atau kedua pihak mangkir atau mengingkari isi kesepakatan damai tersebut. Juga patut diingatkan bahwa salah satu tahapan paling serius dan paling sulit dari proses penyelesaian konflik adalah pada saat pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai di atas meja perundingan. Karena itu, kehadiran sebuah badan pemantau yang berwibawa, kuat, professional, dan didukung secara politis dan finansial yang besar sangat diperlukan. AMM telah membuktikan itu.

19. Awalnya AMM akan bertugas hanya satu periode selama enam bulan sejak September 2005, tetapi kemudian diperpanjang satu kali enam bulan lagi dan satu kali tiga bulan yang berakhir Desember 2006.

Pelajaran penting pasca penandatanganan MoU Helsinki

Dua pelajaran tambahan yang patut dicatat pasca penandatanganan MoU Helsinki. Meskipun ini tambahan, tidak berarti itu tidak penting. Dua pelajaran tambahan ini menegaskan (meng-affirmasi) prestasi-prestasi atau pelajaran-pelajaran sebelumnya.

Pertama, adanya transformasi dari kombatan ke non-kombatan atau tepatnya dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan non-bersenjata. Segera setelah AMM memulai tugasnya di Aceh, para kombatan GAM diminta untuk menyerahkan senjata yang dimiliki. Setelah dikumpulkan, senjata-senjata tersebut diverifikasi dan selanjutnya dimusnahkan. Dari pihak Indonesia sendiri dilakukan penarikan pasukan non-organik dan hanya meninggalkan pasukan organik dan aparat kepolisian dalam jumlah yang disepakati dalam MoU. Peristiwa ini secara simbolik dan substansif menandai perubahan cara, metode, atau strategi yang ditempuh oleh GAM di dalam memperjuangkan aspirasinya, yaitu dari bersenjata menjadi tidak-bersenjata, dari gerilya ke ruang-ruang perdebatan dan persaingan politik.

Perubahan cara perjuangan tersebut diperkuat oleh kesepakatan lainnya yang memberi ruang bagi GAM dan masyarakat Aceh pada umumnya untuk mendirikan partai-partai politik lokal. Juga terbuka kesempatan bagi calon-calon independen (yang tidak dinominasikan oleh partai politik lokal dan nasional) untuk bersaing secara jujur dan terbuka dalam memperebutkan kursi pemerintahan (gubernur) di Aceh. Meskipun kesepakatan ini mendapatkan tantangan dari para politisi di Jakarta, hal itu diyakini mampu mengakhiri kekerasan di Aceh dan mencegah berulangnya konflik bersenjata. Kesepakatan tersebut disambut dengan antusias. Pada pemilihan gubernur 2007 misalnya, calon

independen dan juga mantan GAM keluar sebagai pemenang. Dan pada pemilu legislatif 2009, sejumlah partai lokal turut berpartisipasi. Hasilnya cukup mengagetkan dimana Partai Aceh, yang dibentuk oleh para mantan GAM, memenangkan mayoritas kursi di DPR Aceh (DPRA) dan hampir di semua DPR Kabupaten/Kota (DPRK).

Kedua, adanya upaya mengintegrasikan kepentingan untuk menjaga perdamaian dan kepentingan untuk melaksanakan demokrasi dan pembangunan secara bersamaan di Aceh dan Indonesia pada umumnya. Bersamaan dengan makin kecilnya peluang berulangnya konflik bersenjata di Aceh, proses demokratisasi pun terus berkembang.²⁰ Dalam konteks ini, baik para mantan GAM maupun kekuatan-kekuatan politik lokal dan nasional lainnya berupaya melakukan konsolidasi politik lewat partai-partai dan organisasi-organisasi sosial-politik lainnya. Perdamaian di Aceh kerap dijadikan sebagai agenda politik partai. Partai Demokrat (partainya SBY) maupun Partai Golkar (pimpinan JK) misalnya menjadikan kesepakatan damai di Aceh sebagai prestasi partainya. Ini digunakan untuk menarik suara para pemilih pada pemilu 2009 lalu. Demikian juga dengan program pembangunan di Aceh. Semakin luas pemahaman di kalangan pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan di Aceh merupakan syarat penting untuk menjaga perdamaian. Pemerintahan Aceh di bawah gubernur Irwandi Yusuf nampaknya menyadari hal ini dengan sangat baik. Sebagai mantan GAM, Irwandi melihat keberhasilan pembangunan di Aceh sebagai kunci penting, tidak hanya untuk menjaga keamanan dan perdamaian tetapi juga untuk mendapatkan dukungan politik yang luas dari masyarakat Aceh.

20. Lihat Mangadar Situmorang, "Memperluas Konstituen bagi Perdamaian yang Langgeng di Aceh", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, November 2008.

Penutup

Sependinggal Misi Monitoring Aceh (AMM) pada Desember 2006 keraguan dan kekhawatiran akan masa depan perdamaian di Aceh muncul. Hal ini bisa dimengerti karena tidak ada lagi lembaga internasional yang akan mengawasi komitmen pihak pemerintah Indonesia atau GAM untuk taat pada perjanjian damai Helsinki. Namun kekhawatiran tersebut tidak berlangsung lama. Lima faktor dapat disebut secara ringkas yang dapat menjelaskan mengapa perdamaian terus terjaga di Aceh paska AMM.

Pertama, komitmen pemerintah Indonesia di bawah SBY dan JK tetap tinggi untuk memelihara perdamaian dan melaksanakan pembangunan di Aceh. Meskipun kemudian terjadi peristiwa-peristiwa yang mengganggu keamanan, hal itu tidak mengancam perdamaian tersebut.

Kedua, komitmen yang sama tingginya juga ditunjukkan oleh pemimpin dan para mantan kombatan GAM. Sebagian besar mantan pimpinan dan kombatan telah berbaur dengan anggota masyarakat umum dan telah aktif di dalam berbagai kegiatan baik politik, sosial keagamaan, dan ekonomi.

Ketiga, pengawasan dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat juga semakin besar. Ini tidak terbatas hanya pada organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs atau LSM) tetapi juga asosiasi masyarakat sipil lainnya. Berbagai LSM lokal, nasional, dan internasional secara bersama-sama atau secara terpisah berupaya membangun dan mendampingi masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian. Friedrich Ebert Stiftung (FES) dari Jerman misalnya bekerjasama dengan sejumlah aktivis dan mantan pimpinan GAM membentuk Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD) di Aceh. Tujuannya adalah untuk memperluas konstituen yang mengawal pelaksanaan perdamaian dan demokrasi di Aceh.

Keempat, meskipun secara resmi telah meninggalkan Aceh, masyarakat internasional, khususnya negara-negara Eropa tetap memantau pelaksanaan perdamaian dan memberikan dukungan terhadap pembangunan di Aceh. Dukungan yang sama juga ditunjukkan oleh negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang serta oleh organisasi-organisasi internasional seperti Uni Eropa dan PBB.

Kelima, bersamaan dengan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam tsunami, terdapat urgensi dan signifikansi untuk membangun Aceh sekaligus menjaga perdamaian di Aceh.

Terkait dengan semua faktor di atas pelajaran penting terakhir yang perlu ditegaskan disini adalah pentingnya perhatian, kepekaan dan dukungan yang berkelanjutan untuk mencegah peristiwa yang dapat mengancam keamanan, perdamaian, pembangunan dan demokrasi di Aceh. Semua pihak bertanggung jawab dalam hal ini. Kunci utama untuk menjaga perdamaian, dan ini bukan hanya untuk Aceh, tetapi juga di Indonesia, dan dunia, adalah jika setiap orang mempunyai ruang dan kesempatan yang adil untuk maju dan berkembang. Inilah esensi perdamaian yang sesungguhnya.

=====

Anwar, Dewi Fortuna, Helena Bouvier, dkk, eds., *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific* (Jakarta: Obor, 2005).

Aspinall, Edward, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?* (Washington: East-West Center, Policy Studies 20, 2005).

Hadiwinata, Bob Sugeng "Dari Kekerasan Menuju ke Pemilihan: Resolusi Konflik dan Demokratisasi di Aceh" dalam

Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck, eds., *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Hamid, Ahmad Farhan, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006).

Hermawan, Yulius P., ed., *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007);.

Hobsbawm, Eric, *Globalization, Democracy and Terrorism* (London: Abacus, 2007).

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *Responsibility to Protect* (2001)

International Crisis Group (ICG), *A New Chance for Peace, Asia Briefing No. 40, 15 Agustus 2005.*

Jemadu, Aleksius, *Politik Global dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

Klinken, Garry van, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: KITLV – Obor, 2007).

Moch. Nurhasim, “Perundingan Helsinki: Jalan Menuju Damai Aceh” dalam *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* disunting oleh Ikrar Nusa Bakti (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008).

Situmorang, Mangadar, “Memperluas Konstituen bagi Perdamaian yang Langgeng di Aceh”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, November 2008.

Situmorang, Mangadar, *International Humanitarian Intervention in Intrastate Conflicts: Indonesian Case Studies* (Giessen: Johannes-Hermann Verlaag, 2009).

Snyder, Jack, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict* (NY, London: W. W. Norton & Co, 2000).

Bob Sugeng Hadiwinata¹

*Aceh Pasca Konflik:
Dinamika Penegakan Demokrasi* 

Demokrasi dan Perdamaian: Sebuah Diskursus

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara GAM dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, yang menandakan berakhirnya konflik separatis selama tigapuluh tahun di Aceh, memunculkan harapan baru dimana demokrasi menjadi salah satu instrumen yang sangat berharga untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Penyelesaian konflik di Aceh memiliki implikasi dalam studi resolusi konflik baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, apabila penyelesaian masalah Aceh secara damai dapat berjalan dengan sukses, hal tersebut dapat merefleksikan bagaimana perdamaian dan demokrasi merupakan suatu

1. Penulis adalah Dosen FISIP, Universitas Parahyangan, Bandung, menyelesaikan studi doctoral di Universitas Cambridge, Inggris, dan penulis buku *The Politics of NGOs in Indonesia* (London: Routledge, 2003) serta ko-editor buku *Democracy in Indonesia: Challenge of Consolidation* (Munich: Nomos Publishing, 2007).

kesatuan dan demokrasi dapat menghasilkan momentum untuk melaksanakan dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik. Secara praktis, apabila proses perdamaian di Aceh terus berkelanjutan, adanya dorongan yang benar untuk berpartisipasi dalam negosiasi memberikan indikasi yang sangat penting untuk memulai sebuah penyelesaian perdamaian. Hal ini menjadi makin signifikan ketika prosedur standar penyelesaian perdamaian difokuskan pada *DDR-disarmament, demobilisation, and reintegration* (pelucutan senjata, demobilisasi, dan penyatuan kembali) dapat menghasilkan *sustainable peace* (perdamaian langgeng). Proses demokrasi yang mengikuti hal tersebut menjadi sangat krusial manakala proses perdamaian dapat menjamin para mantan pejuang untuk dapat terlibat dalam proses politik lokal.

Banyak penulis telah membahas tentang bagaimana demokrasi memiliki hubungan dengan perdamaian. Sebagai contoh, Ashutosh Varshney menyebutkan bahwa di dalam lingkungan yang demokratis, dimana masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang lebih menekankan pada perdamaian.² Dalam perspektif yang sama, Ann Griffiths menyatakan bahwa konflik etnis-religius dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka kerja demokrasi politik karena melalui demokrasi perbedaan-perbedaan yang ada dapat diselesaikan secara damai.³ Keyakinan bahwa demokrasi dapat menghasilkan perdamaian telah membimbing para cendekiawan dan aktivis perdamaian untuk meyakini bahwa rekonstruksi

pasca-konflik yang sukses membutuhkan demokrasi seperti halnya demokrasi membutuhkan perdamaian.⁴

Meskipun demikian, sekelompok pemikir politik lainnya memperdebatkan hubungan yang positif diantara demokrasi dan perdamaian. Dalam bukunya yang kontroversial, Jack Snyder menyebutkan bahwa demokratisasi cenderung menghasilkan persaingan etnis dimana hal tersebut dapat menciptakan konflik kekerasan. Merujuk pada negara-negara yang memiliki tendensi untuk konflik – *conflict-prone* – di berbagai bagian dunia, beliau menyatakan bahwa para elit politik yang merasa tidak aman dapat menggunakan sentimen etnik-religius dan kampanye-kampanye politik sektarian untuk meruntuhkan dukungan dari pihak mayoritas untuk dapat memenangkan pemilihan umum, dimana hal tersebut dapat mengarah pada politisasi terhadap isu etnis-religius. Politisasi terhadap isu etnis-religius inilah yang membuat negara-negara demokratis baru di daerah Balkan, Asia, dan Afrika sangat rentan terhadap konflik kekerasan.⁵ Pernyataan ini juga didukung oleh Daniel Bell yang berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat mencegah konflik kekerasan dalam masyarakat plural yang didalamnya tidak terdapat pembagian bahasa nasional dan identitas nasional yang sama. Karena demokrasi membutuhkan adanya saling percaya dan pengertian, bahasa yang berbeda dan identitas kultural yang lain dapat mempersulit proses pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada tumbangnya pemerintahan demokratis.⁶

2. Varshney, Ashutosh (2003), "Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond", dalam Elliot, Carolyn M., ed., *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford University Press, hal. 434-435.
3. Griffiths, Ann L. (1998) "Introduction". Dalam Griffiths, Ann L., ed., *Building Peace and Democracy in Post-Conflict Societies*. Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University, hal.4.

4. Weinstein, Harvey M. and Eric Stover (2004) "Introduction: Conflict, Justice and Reclamation". Dalam: Harvey M. Weinstein and Eric Stover, eds., *My Neighbour, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity*. Cambridge, Cambridge University Press, hal.19.
5. Snyder, Jack (2000) *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York, W. W. Norton.
6. Bell, Daniel A. (2004) "Is Democracy the 'Least Bad' System for Minority Groups?". Dalam Henders, Susan J., ed., *Democratization and Identity: Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*. New York, Lexington Book, hal.29.

Diantara perbedaan interpretasi mengenai hubungan antara demokrasi dan perdamaian, penyelesaian pasca-konflik baru-baru ini di Aceh mengindikasikan bahwa didalam keadaan tertentu, demokrasi memegang peranan penting dalam mengakhiri konflik kekerasan. Dari pihak pemerintah Indonesia, transisi demokrasilah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan para pejuang separatis. Demokratisasi di Indonesia yang pada akhirnya memperkuat posisi para pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai solusi perdamaian, telah menghasilkan penyelesaian perdamaian di Aceh.⁷ Sementara pemerintahan otoriter dibawah Presiden Suharto melihat strategi militer sebagai cara yang utama dalam mengakhiri pemberontakan, pemerintahan demokratis pasca pemerintahan Suharto – kecuali beberapa pemimpin nasionalis yang mendukung operasi militer – mulai melihat potensi dialog dan negosiasi sebagai cara yang patut diperhitungkan untuk mengakhiri konflik. Dari pihak separatis, perkembangan keyakinan bahwa kerangka kerja demokrasi politis memungkinkan untuk membuat suara mereka didengar dan kepentingan-kepentingan mereka terwakili (setidaknya dalam tingkat pemerintahan lokal) telah membuat mereka siap untuk menyerahkan senjata-senjata mereka dan membuat persetujuan dengan pemerintah Indonesia melalui negosiasi. Makalah ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis keadaan dimana demokrasi memiliki hubungan yang positif dengan perdamaian.

Selama masih berhubungan dengan penyelesaian perdamaian, para pemerhati masalah ini cenderung untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek sosial, psikologi, dan ekonomi dari rekonstruksi pasca-konflik. Menurut mereka, satu-satunya proses politik, jika ada, dalam penyelesaian perdamaian

adalah dialog dan negosiasi dalam konteks penciptaan perdamaian. Menurut para praktisi pembangun perdamaian, prioritas utama seharusnya ditujukan pada DDR (*disarmament, demobilisation, and reintegration* – pelucutan senjata, demobilisasi, dan penyatuan kembali) untuk memastikan para pejuang dapat meletakkan senjata mereka, pasukan pemerintah dapat mundur dari daerah konflik, orang-orang yang terlibat perang dapat dipulangkan kembali, dan kehancuran ekonomi dapat diperbaiki. Tetapi proses politik setelah penandatanganan perjanjian tidak boleh dilupakan. Proses lain yang sangat penting dalam rekonstruksi pasca-konflik adalah bagaimana menyediakan sebuah landasan jangka panjang untuk pemerintahan sipil yang efektif dan damai melalui penciptaan perwakilan daerah dan institusi nasional yang sah.⁸ Perhatian yang serius untuk membangun institusi-institusi yang representatif akan juga menyediakan sebuah insentif untuk para mantan pejuang untuk terlibat dalam proses demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Makalah ini mencoba untuk melihat lebih jauh proses politik pasca penyelesaian konflik yang berlangsung di Aceh. Makalah ini juga akan mendiskusikan bagaimana para partai yang berkonflik – terutama para mantan pejuang – menyadari proses demokratis sebagai sebuah jalan untuk membuat suara mereka didengar dan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terwakilkan dan terartikulasikan.

Dalam kasus Aceh, banyak orang beranggapan bahwa gempa bumi dan bencana tsunami yang terjadi pada bulan Desember 2004 – yang membunuh kurang lebih 127.000 jiwa, meninggalkan 30.000 orang hilang dan sekitar 500.000 *displaced* – merupakan faktor krusial yang membawa kaum separatis dan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan suatu penyelesaian yang berhubungan dengan

7. Aspinall, Edward (2005) *The Helsinki Agreement: a More Promising Basis for Peace in Aceh?* Policy Studies No.20, Washington, East-West Center, hal.2.

8. Brown, Mark Malloch (2004) "Post-Conflict Transitions: the Challenge of Securing Political, Social and Economic Stability." Dalam Cahill, Kevin M., ed., *Human Security for All: a Tribute to Sergio Vieira de Mello*. New York, Fordham University Press, hal. 66.

usaha rekonstruksi dan proses perdamaian.⁹ Pemasukan yang sangat besar dari donor internasional – baik dari pemerintah maupun dari agen-agen non-pemerintah – setelah bencana tsunami dipercaya telah memperkuat tekanan untuk demiliterisasi dan pelaksanaan pemerintahan demokratis di Aceh.¹⁰ Meskipun bencana tsunami tidak diragukan lagi menjadi salah satu faktor untuk memulai dengan segera proses perdamaian, hal ini bukan menjadi penyebab pembaharuan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Belajar dari penyelesaian-penyelesaian sebelumnya dalam “*humanitarian pause*” (jeda kemanusiaan) dan “*cessation of hostilities agreement*” (COHA) selama periode 2001-2003, pemerintah Indonesia (melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla) membuat usaha untuk mendekati para pemimpin GAM untuk membangun kembali penyelesaian perdamaian yang tumbang berbulan-bulan sebelum terjadinya tsunami. Sehingga dapat dikatakan bahwa bencana tsunami lebih merupakan faktor pendukung, daripada merupakan penyebab terjadinya negosiasi-negosiasi yang definitif antara pemerintah Indonesia dan GAM.

Makalah ini berargumen bahwa dalam situasi dimana para elit politik sangat yakin dalam bersaing secara demokratis dan insentif untuk berpartisipasi dalam sebuah perjanjian perdamaian adalah pantas, cara-cara demokratis dapat digunakan sebagai sebuah cara yang sangat layak untuk mengakhiri sebuah konflik. Seperti yang telah dikatakan oleh mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, secara metafor: “Jika mas kawinnya pantas, perkawinannya akan berjalan langgeng!”¹¹ Dalam konflik di Aceh, meskipun

9. International Crisis Group (ICG) (2005) *Aceh: a New Chance for Peace*. Asia Briefing No.40, Brussels, 15.8.2005.

10. Hedman, Eva Lotta E., (2005) “Back to the Barracks: Relokasi Pengungsi in Post Tsunami Aceh”, *Indonesia*, No. 80.

11. Pernyataan dari Abdullah Puteh dalam sebuah wawancara dengan ICG bulan Februari 2005. Lihat ICG 2005:2.

faktor etnis dan agama memegang peranan penting, tidak dapat disangkal bahwa aspirasi terhadap kemerdekaan muncul dari kekecewaan sebagian masyarakat Aceh terhadap pemerintahan pusat akibat ketidakadilan dalam distribusi ekonomi dan tindakan represif militer. Insentif untuk perjanjian perdamaian dapat dicapai jika pemerintah siap untuk mengakhiri operasi militer dan dapat menjamin masyarakat Aceh untuk mengatur masalah-masalah politis dan ekonomi mereka sendiri dalam batas-batas yang telah disetujui; dan kaum separatis telah siap juga untuk menukar aspirasi “kemerdekaan” mereka dengan “keadilan dan otonomi”. Hipotesis penulis yaitu apabila kepercayaan diri diantara masyarakat Aceh untuk dapat membuat suara mereka lebih didengar dan kepentingan mereka terwakilkan melalui proses demokrasi adalah tinggi, maka proses perdamaian akan dapat bertahan dan kesempatan untuk terjadi perang menjadi sangat kecil.

Konflik Separatis dan Kemunculan GAM

Propinsi Aceh, yang memiliki populasi kurang lebih 4,4 juta jiwa, adalah salah satu propinsi milik Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang relatif melimpah, terutama kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam. Propinsi ini telah dikenal sebagai wilayah dimana Belanda tidak pernah memiliki kontrol secara penuh pada masa penjajahan. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para kaum ulama telah membuat wilayah ini mempertahankan identitasnya.¹² Sebagai kaum Muslim yang setia, masyarakat Aceh memiliki kebanggaan diri sebagai serambi Mekah. Seorang orientalis Belanda yang terkenal, Snouck Hurgronje, memastikan pengertian ini dengan melihat Aceh sebagai pintu menuju ke jazirah Arab bagi para pelaksana ibadah haji dari

12. Pada masa penjajahan perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh para figure-figur yang berasal dari kaum ulama, seperti Teuku Cik Di Tiro dan Daud Beureuh.

seluruh kepulauan pada abad keenambelas dan ketujuhbelas.¹³ Hal ini mengindikasikan kehebatan Aceh pada masa itu.

Sewaktu perlawanan terhadap Belanda menjadi semakin kuat di Indonesia – terutama pada masa revolusi kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1950 – para ulama Aceh menjadi bagian dalam perjuangan kemerdekaan nasional dalam skala yang lebih besar yang dipimpin oleh Sukarno. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh pada saat itu, perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan berada dalam tingkatan yang sama dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dimana pada bulan Oktober 1945, kaum ulama, dengan dukungan dari masyarakat Aceh, mendeklarasikan bahwa masyarakat Aceh teguh bersatu dan tunduk dibawah pimpinan besar Sukarno. Mereka juga memaparkan perjuangan Indonesia sebagai kelanjutan dari perjuangan Aceh di masa lalu yang dipimpin oleh pahlawan lokal seperti Tengku Cik Di Tiro, Cut Nyak Dien dan Teuku Umar.

Tetapi, segera setelah kemerdekaan dicapai, rasa ketidakpercayaan mulai tersebar di Aceh. Setelah Republik Indonesia memegang kendali wilayah tersebut, pengaruh ekonomi dan politik dari kaum ulama mulai menurun. Pada saat itu ada pula elemen kekecewaan diantara kaum ulama terhadap pemerintah pusat. Sebelumnya, pada saat pertemuan beliau dengan Gubernur Militer Aceh, Daud Beureuh, Presiden Sukarno telah menjanjikan penerapan hukum Islam atau syariah di wilayah tersebut. Kegagalan beliau untuk menepati janjinya telah menghasilkan kekecewaan diantara masyarakat Aceh terutama kaum ulama. Konflik yang terjadi diantara Aceh dan Jakarta semakin meruncing sewaktu tahun 1953 pemerintah pusat menyatakan Aceh sebagai bagian dari kesatuan Indonesia. Pada tanggal 20 September 1953,

Daud Beureuh mengumumkan pembentukan Darul Islam.¹⁴ Dia juga menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia yang dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat beberapa tahun sebelumnya. Sejak saat itu aspirasi untuk kemerdekaan diantara masyarakat Aceh mulai berkembang.

Pada masa Orde Baru, perlawanan dan pemberontakan untuk kemerdekaan berlanjut. Kecewa dengan cara-cara pemerintah Indonesia memperlakukan Aceh, Hasan Tiro (anggota dari delegasi Indonesia untuk PBB di New York dan cucu dari pahlawan terkenal masa perjuangan anti-kolonial melawan Belanda, Tengku Cik Di Tiro) kembali ke Aceh. Bersama dengan 70 pengikutnya (kebanyakan merupakan keluarga dan teman-temannya), dalam bulan Oktober 1976 dia membentuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Meskipun dalam otobiografinya Tiro berkeras bahwa gerakan separatis ini dipicu oleh perasaan penderitaan dan kekecewaan masyarakat Aceh, beberapa cendekiawan percaya bahwa Tiro kemungkinan besar mengalami frustrasi karena penawaran kontraknya untuk membangun konstruksi pipa untuk Mobil Oil di Aceh gagal. Pada tahun 1974, telah diketahui bahwa Tiro mengalami kegagalan juga dalam tender dengan perusahaan konstruksi Amerika Serikat, Bechtel.¹⁵ Pada tanggal 4 Desember 1976, Tiro dan para pengikutnya mendeklarasikan “kemerdekaan Aceh-Sumatra” dan pada waktu yang bersamaan menuduh “kaum Jawa-Indonesia” sebagai pelaku neo-kolonial yang berusaha untuk merebut harta-harta Aceh.¹⁶ Tidak seperti Darul Islam di

13. Riddell, Peter G. (2006) Aceh in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: “Serambi Mekkah” and Identity. In: Reid, ed., 38-39.

14. Lembaga rResearch dan Survey IAIN Ar-Raniry Darussalam (*The Research and Survey Institute of IAIN Ar-Raniry*) (1978) Laporan Penelitian PUSA terhadap Reformasi di Aceh. Banda Aceh, IAIN Ar Raniry, 71.

15. Lihat Schulze, Kirsten E. (2006) ‘Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict’, October 1976 – May 2004. Dalam: Reid, ed., *op cit.*, hal. 233; dan Missbach, Antje (2005) “Aceh’s Guirellas: the Internal Transformation of Gerakan Aceh Merdeka (GAM)”. Dalam Wessel, Ingrid, ed., *Democratisation in Indonesia: After the fall of Suharto*. Berlin, Logos Verlag, hal.164.

16. Missbach (2005), *op cit.*, hal. 163.

tahun 1950an yang menjadikan agama sebagai motivasi utama demi pencapaian kemerdekaan, faktor ekonomis menjadi motivasi yang kuat dalam pembentukan GAM.

Pada akhir 1970an dan awal 1980an, diantara eksplorasi minyak dan gas secara intensif oleh pemerintah Indonesia di propinsi Aceh, pemberontakan dari GAM cenderung meningkat. Hal ini membawa pemerintah untuk menetapkan Aceh sebagai DOM (Daerah Operasi Militer) dimana Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan taktik-taktik brutal (pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dsb) untuk meneror pejuang GAM dan para simpatisannya. Pendekatan garis keras ini memberikan beberapa akibat. Pertama, terdapat perkembangan sentimen diantara masyarakat Aceh yang membawa kebencian dan penolakan terhadap Jakarta. Laporan-laporan terhadap tindakan brutal yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI telah menanamkan rasa balas dendam diantara generasi muda di Aceh.¹⁷ Kedua, melihat bahwa sebagian besar dari tentara Indonesia berasal dari suku atau etnis yang berbeda, terutama berasal dari suku Jawa, taktik brutal yang mereka pakai berimbas pada berkembangnya sentimen etnis diantara masyarakat Aceh.¹⁸ Melalui pertemuan penulis dengan salah seorang mantan pejuang GAM membenarkan pandangan tersebut, seperti salah seorang wanita muda mantan pejuang mengatakan: “Sewaktu ayah saya disiksa sampai mati oleh sekumpulan tentara Jawa, pikiran saya penuh dengan kebencian terhadap orang Jawa, dan saya berpikir untuk balas dendam kepada mereka dengan bergabung dalam GAM”.¹⁹ Ketiga, keinginan besar untuk balas dendam menyebabkan bertambahbanyaknya anggota

17. *Ibid*, hal. 167.

18. Aspinall, Edward (2006) “Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesian Rule”. Dalam: Reid, ed., *op cit.*, hal. 159.

19. Wawancara dengan Nur, mantan anggota inong balee (Unit khusus wanita GAM), di Lohkseumawe 7.3.2006

GAM. Jika di tahun 1970an GAM bertumbuh dari kelompok pejuang kecil yang beranggotakan 70 orang, pada saat jatuhnya proses perdamaian tahun 2003 dapat dipastikan bahwa GAM memiliki kurang lebih 8000 anggota.²⁰

Unsur historis tampak mempengaruhi pembentukan identitas Aceh. Elemen historis yang pertama adalah merujuk pada kejayaan masa keemasan dibawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dan Sultan Iskandar Thani (1636-1641) dimana Kesultanan yang pra-modern mengembangkan kekuasaannya melewati Selat Malaka dan menetapkan hubungan ekonomi dan politik yang penting dengan kerajaan-kerajaan lain di Cina, India, dan Timur Tengah.²¹ Elemen historis yang kedua yaitu kumpulan penderitaan dari intrusi-intrusi asing, terutama pada masa pendudukan Belanda di abad ke-18. Cerita mengenai perjuangan kepahlawanan yang dilakukan oleh para pemimpin seperti Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien telah diturunkan pada generasi-generasi penerus. Untuk sebagian besar pemuda dalam GAM, cerita-cerita ini menjustifikasi perlawanan mereka melawan pihak asing, terutama pada “*Javanese colonisers*” – penjajah dari Jawa. Tiro dapat dikatakan berhasil dalam memicu kebencian terhadap para penyusup asing yang merampok harta kekayaan Aceh.

Meskipun identitas etnis Aceh memiliki peranan dalam memunculkan sentimen separatis, nasionalisme Aceh tidak cocok untuk menghasilkan pemberontakan bersenjata. Seperti yang dikatakan oleh Antje Missbach: “*ethnic identity simply based on historical misconception by Hasan Tiro may not be enough to achieve GAM’s purpose to obtain independence from Indonesia*” – identitas etnis yang didasarkan pada konsepsi historis yang

20. Schulze, dalam: Reid, ed., *op cit.*, hal. 242.

21. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Kesultanan pra-modern di Aceh, lihat Anthony Reid (2006) “*The Pre-modern Sultanate’s View of Its Place in the World*”, dalam: Reid, ed., *op cit.*, hal.52-71.

salah oleh Hasan Tiro tidak cukup untuk mencapai tujuan GAM untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia.²² Dengan pandangan yang serupa, Sulaiman mengatakan bahwa melebihi penilaian identitas etno-nasionalis sebagai dasar dari gerakan separatis adalah salahkarena akar permasalahannya adalah gabungan dari kekecewaan politik, ekonomi, ambisi pribadi dan kepentingan dari pendiri-pendiri gerakan tersebut.²³ Sehingga dapat dikatakan bahwa etnisitas bukan merupakan faktor penyatu tunggal untuk GAM dalam melakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Keterlibatan orang-orang non-Aceh dalam perjuangan kemerdekaan membuktikan bahwa etnisitas lebih dari sekedar retorika untuk memobilisasi dukungan untuk masyarakat Aceh daripada perjuangan GAM sendiri. Dalam satu kesempatan, penulis bertemu dengan seseorang ber-etnis Tionghoa yang bertempur untuk GAM. Dengan nama samaran “Adi Cina”, pemuda ini berasal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan bergabung dengan GAM selama keadaan darurat militer pada tahun 2002. Pertemuan pertamanya dengan GAM adalah pada masa 1999 dan 2000 sewaktu ia menjalankan bisnis perkayuan di Singkil dan Tapak Tuan. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui bahwa ia tertarik untuk bergabung dengan GAM karena ia diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga oleh para anggota GAM dan ia memiliki simpati terhadap gerakan separatis setelah menghabiskan banyak waktu dengan mereka.²⁴ Menjelang akhir keadaan darurat militer di awal 2004, Adi ditangkap oleh TNI dan dipenjarakan. Dia dapat meloloskan diri dari penjara di Banda Aceh setelah bencana tsunami menghancurkan selnya

22. Missbach (2005), *op cit.*, hal.175.

23. Sulaiman, M. Isa (2006) “From Autonomy to periphery: A Critical Evaluation of the Acehese Nationalist Movement”. Dalam: Reid, ed., *op cit.*, hal.139-40.

24. Wawancara dengan Adi, 8.3.2006, di Lohseumawe.

bulan Desember 2004. Diantara koleganya, Adi terlihat sangat dihormati. Beberapa anggota yang lebih muda menyebut dia sebagai “Bang Adi” dan anggota-anggota senior menyebut dia sebagai “Tengku Adi”. Sewaktu penulis menanyakan berapa banyak anggota GAM yang non-Aceh, jawabannya berkisar beberapa lusin, yang termasuk etnis Tionghoa dan Jawa. Merujuk pada keterlibatan etnis Jawa, beberapa mantan petinggi GAM menyebutkan bahwa orang-orang yang bergabung dengan GAM adalah kaum imigran yang memiliki perasaan marginalisasi dan kemiskinan yang sama dengan orang-orang Aceh.²⁵

Perundingan Damai: Kegagalan di Masa Lalu

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, beberapa usaha penyelesaian telah dilakukan untuk mengakhiri konflik di Aceh. Sewaktu pendekatan pemerintah otoriter yang tanpa mengenal kompromi telah menggagalkan setiap kemungkinan untuk melaksanakan dialog dan negosiasi, pemerintah demokratis pada masa pasca orde baru menunjukkan niat serius untuk menciptakan penyelesaian perdamaian di Aceh. Para pemimpin pemerintahan Indonesia yang demokratis bahkan mengizinkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk memulai proses perdamaian dan berlaku sebagai mediator pihak ketiga. Dimulai pada awal tahun 2000, serangkaian pembicaraan difasilitasi oleh LSM yang berbasis di Swiss, *Center for Humanitarian Dialogue* (HDC), yang menghasilkan “jeda kemanusiaan” (*Humanitarian Pause*) pada pertengahan tahun 2000 dan proses pembicaraan yang lebih kompleks yaitu “*Cessation of Hostilities Agreement*” (COHA) pada bulan Desember 2002.

Meskipun demikian, beberapa faktor yang terkait dengan kekurangan komitmen di kedua belah pihak (baik dari pemerintah

25. Wawancara dengan mantan gubernur GAM (ulee nanggroe) untuk Linge (2.2.2006) dan mantan komandan militer distrik (panglima sagoe) untuk Lhok Tapak Tuan (3.2.2006) di Banda Aceh.

Indonesia dan GAM), kegagalan untuk mencanangkan insentif yang tepat untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, kekurangan kredibilitas dan kapasitas dari mediator untuk melaksanakan persetujuan, kegagalan dari persetujuan tersebut untuk menyentuh pokok atau kunci permasalahan, dan kehadiran dari pihak-pihak yang ingin merusak yang tidak terkontrol dari kedua belah pihak, telah memicu jatuhnya persetujuan perdamaian. Pada bulan Mei 2003, Presiden Megawati mengeluarkan dekret presiden No. 28/2003 yang mengumumkan bahwa keadaan darurat militer di propinsi tersebut dan memerintahkan penyerangan militer secara penuh yang tergabung dalam Operasi Terpadu, yang menandakan awal dari konflik bersenjata yang paling brutal dan penuh dengan kekerasan di daerah tersebut sepanjang pembentukan GAM pada tahun 1976. Mengapa jeda kemanusiaan dan COHA gagal menjaga perdamaian? Dalam pemaparan berikut, penulis mencoba untuk mendeskripsikan empat faktor utama yang menyebabkan gagalnya penyelesaian perdamaian tahun 2000-2002.

Pertama, tidak adanya fleksibilitas baik dari pemerintah Indonesia maupun GAM untuk melaksanakan perundingan. Kekurangan fleksibilitas dan komitmen dari pemerintah Indonesia dan GAM telah membuat proses perdamaian menjadi rentan. Di satu pihak, pemerintah sangat berkeras bahwa Aceh harus tetap menjadi bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan membawa kekecewaan bagi para pemimpin GAM, pernyataan ini telah digunakan terus menerus bagi para pemimpin militer Indonesia, para elit politik, dan para negosiator dalam berbagai kesempatan dan ditempatkan sebagai salah satu acuan untuk negosiasi. Di pihak lain, para pemimpin dan perwakilan GAM tidak cukup fleksibel untuk memunculkan suatu strategi alternatif untuk mendiskusikan permintaan mereka

akan kemerdekaan. Setidaknya sampai tahun 2003, banyak pemimpin GAM berkeras bahwa kemerdekaan penuh untuk Aceh adalah harga mati, sehingga tidak dapat tercipta suatu negosiasi apabila pemerintah Indonesia juga berkeras bahwa Aceh tetap menjadi bagian NKRI.²⁶ Ketidakfleksibelan GAM dalam penyelesaian perdamaian sedikit banyak berasal dari penilaian dan pemikiran yang salah dari pemerintahan pasca Orde Baru yang disadari sebagai tonggak kejatuhan dan disintegrasi wilayah.²⁷ Sewaktu negosiasi perdamaian membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak, pemerintah Indonesia dan GAM tidak menunjukkan komitmen yang dibutuhkan sewaktu mereka gagal untuk memunculkan konsep yang baru bagi masa depan politik dan ekonomi Aceh.

Kedua, kegagalan (terutama dari pihak pemerintah Indonesia) untuk memberikan insentif yang tepat sehingga GAM benar-benar bersedia melakukan negosiasi. Pada awal penyelesaian perdamaian – terutama COHA – insentif-insentif yang dapat menjamin terjadinya perdamaian yang berkelanjutan gagal untuk dimunculkan. Dalam perundingan-perundingan yang dilakukan, pihak pemerintah dibutuhkan untuk menawarkan atau menyediakan insentif yang tepat kepada kelompok separatis untuk dapat membuat mereka menerima persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam perjanjian. Dalam usahanya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Aceh dan para pemimpin GAM, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 18/2001 (UU-NAD) yang menyatakan diberlakukannya *syariah* di propinsi tersebut. Bagi para elit politik, pemaparan Aceh sebagai komunitas Islam merupakan penilaian yang salah terhadap inti permasalahannya. Pemerintah Indonesia – pada tahun 2001-2004 – juga salah membaca GAM

26. Wawancara dengan Faisal Putra, tokoh ternama GAM dan anggota pengurus pihak Aceh dalam pembentukan undang-undang baru terhadap pemerintahan Aceh di Banda Aceh, 1.2.2003.

27. Aspinall (2005), *op cit.*, hal. 4; Schulze (2006), *op cit.*, hal. 243.

sebagai organisasi Islam. Akibatnya, insentif ekonomi dan politik bagi masyarakat Aceh gagal untuk diberikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, GAM memiliki kekecewaan yang mendalam dalam bidang ekonomi terhadap pemerintah pusat dan menggunakan etnisitas dan Islam sebagai instrumen untuk memobilisasi pengikutnya dan membawa hal-hal tersebut sebagai bagian dari identitas Aceh. Sehingga, kekosongan insentif politik dan ekonomi telah membawa penyelesaian perdamaian ini dalam ketidakpuasan, terutama bagi para pejuang GAM.

Ketiga, kurangnya kredibilitas dan kapasitas dari mediator untuk menerapkan persetujuan yang telah dicapai. Baik jeda kemanusiaan dan COHA mengalami kekurangan kredibilitas dan kapasitas (terutama dari pihak mediator) untuk menerapkan persetujuan. Untuk menjadi mediator yang berhasil, sebuah LSM tidak hanya harus mengerti duduk persoalannya tetapi harus juga memiliki kapasitas institusional untuk mengatasi pemimpin negara dan pemimpin kelompok serta pengganggu yang potensial, untuk memperlihatkan otoritas dan reputasinya dalam area-area yang bermasalah, dan untuk menarik simpati dan kehormatan dari kubu-kubu yang sedang berunding.²⁸ Hal inilah yang gagal dihasilkan oleh HDC. HDC bukan hanya LSM yang tidak terlalu menonjol, tetapi juga memiliki kekurangan dalam pengaruh politik dimana misi penjaga perdamaian PBB dapat membawa mediasi dan penerapan perdamaian. Sehingga sewaktu COHA akan diimplementasikan, HDC tidak memiliki otoritas untuk membuat kubu-kubu yang berseteru berpegang pada perjanjiannya atau membawa mereka kembali kepada meja perundingan sewaktu terjadi permasalahan atau ketimpangan-ketimpangan

28. Natsios, Andrew (1997) "A NGO perspective", Dalam Zartman, I. W. dan J.I Rasmussen, eds., *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*. Washington, D.C., United States Institute of Peace, hal.337-61; dan Rieff, David (2004) "Humanitarian Action in a New Barbarian Age". Dalam Cahill, Kevin M., ed., *Human Security for All: A tribute to Sergio Vieira de Mello*. New York, Fordham University Press, hal.52-9.

dalam realitasnya.²⁹ Sebagai contoh, sewaktu COHA berada dalam ujung tombak kehancuran, Amin Rais (perwakilan MPR Indonesia) menolak permintaan HDC agar Indonesia kembali ke meja perundingan dengan berkata, "HDC hanyalah sebuah LSM kecil, kami tidak harus menyetujui semua yang mereka minta kami lakukan. Kami adalah sebuah negara independen, sehingga kami memiliki hak untuk terus berjalan dengan agenda atau rencana kami di Aceh dan tidak membiarkan kami didikte oleh LSM kecil."³⁰

Keempat, kegagalan dalam menyentuh inti persoalan yang menjadi sumber konflik. Kegagalan jeda kemanusiaan dan COHA dapat juga dihubungkan dengan kegagalan dari kedua perjanjian tersebut untuk menyentuh pokok permasalahan. Sementara jeda kemanusiaan ditujukan untuk mengadakan gencatan senjata, COHA merupakan proses yang lebih pelik dan lebih ambisius yang melibatkan aktivitas demobilisasi dan pelucutan senjata. Sebagai sebuah negosiasi perdamaian, COHA gagal untuk mencapai persetujuan dalam beberapa masalah kunci, seperti bagaimana cara mencapai suatu kompromi antara permintaan kelompok separatis akan kemerdekaan dan pernyataan kuat pemerintah Indonesia bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia, bagaimana penyatuan kembali mantan anggota GAM harus dilakukan, dan sejauh mana mantan anggota GAM dapat berpartisipasi dalam pemerintahan daerah. Sebuah penawaran akan otonomi khusus (UU-NAD) yang diajukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat diterima karena pemerintah sepertinya tidak tertarik untuk menyatukan mantan pejuang GAM ke dalam masyarakat dan politik Aceh. Sebagai contoh, tawaran dari pihak Aceh untuk menunjuk pemimpin utama GAM, Hasan Tiro, sebagai *Wali Nanggroe* – penasihat daerah –

29. Aspinall (2005), *op cit.*, hal. 4-5.

30. *Kompas* 7.1.2003.

yang terhormat dan untuk memasukkan pejuang GAM sebagai penegak hukum atau polisi di daerah tersebut ditolak oleh Jakarta. Kegagalan untuk memasukkan GAM dalam administrasi lokal dilihat sebagai kelemahan dari kinerja pihak pemerintah Indonesia untuk menciptakan proses politik yang inklusif dalam penyelesaian kembali pasca-konflik. Seperti yang dikatakan oleh seorang anggota Perwakilan Daerah Aceh, Teuku Syaiful Ahmad, “Bagaimana kita dapat meminta GAM untuk menyerah apabila kita sama sekali tidak memberikan mereka posisi (dalam pemerintahan)?”³¹

Resolusi Konflik Secara Demokratis

Inisiatif perdamaian Kalla mulai dilakukan bahkan pada masa kepresidenan Megawati, sewaktu beliau meminta Asisten Menteri Kesejahteraan Rakyat, Farid Husain, untuk mengadakan kontak dengan para pemimpin GAM di Swedia di awal 2004. Kunjungan Husain di Helsinki pada bulan Februari 2004 dengan inisiatif perdamaian tersebut, menarik perhatian mantan presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, yang menyetujui melibatkan organisasinya, *the Crisis Management Initiative* (CMI), sebagai mediator pihak ketiga.³² Hal ini memperlihatkan bahwa negosiasi yang menghasilkan Perjanjian Helsinki bulan Agustus 2005 telah dimulai berbulan-bulan sebelum bencana tsunami terjadi di Aceh. Sehingga tidak seperti mereka yang percaya bahwa tsunami memiliki peranan penting dalam berakhirnya konflik bersenjata di Aceh, penulis berpendapat bahwa proses perdamaian di Aceh (dibawah perjanjian Helsinki tahun 2005) merupakan hasil dari proses demokrasi di Indonesia yang telah meningkatkan perhatian diantara para elit pemimpin Indonesia dan pemimpin GAM akan

pentingnya dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan yang ada. Apabila tsunami memang berperan, semata-mata hanya mempecepat jalannya proses perdamaian.

Pertemuan yang terjadi antara perwakilan pemerintah Indonesia dan pemimpin GAM diikuti oleh serangkaian komunikasi yang intensif dari kedua belah pihak. Pada 31 Oktober 2004, di sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, kedua belah pihak menandatangani sebuah persetujuan yang disebut sebagai “*Points of Agreement between Negotiators of the Government and GAM.*” Perjanjian ini memuat beberapa isu-isu krusial yang selama ini belum pernah diangkat dalam penyelesaian-penyelesaian perdamaian sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan suatu insentif ekonomi kepada GAM, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) lahan-lahan pertanian dan perkebunan milik pemerintah dan segala asetnya di daerah utara dan timur Aceh akan diberikan kepada pemerintahan daerah untuk didistribusikan kepada anggota-anggota GAM; (2) pemerintah akan mengalokasikan 6 juta dolar AS sebagai kompensasi anggota-anggota GAM; (3) lahan-lahan pertanian dan perkebunan akan dialokasikan untuk pembangunan 150 dayah (asrama Islam tradisional) yang masing-masing luas tanahnya mencapai 100 hektar; (4) semua masjid di Aceh akan mendapatkan listrik gratis; dan (5) GAM harus menyerahkan 900 senjata untuk ditukar dengan amnesti penuh yang termasuk dengan orang-orang yang sudah ditangkap dan sedang dalam masa hukuman, dengan tambahan penyerahan senjata sebanyak 100 buah yang akan diserahkan sewaktu perjanjian perdamaian ditandatangani.³³

Keterlibatan CMI dan secara khusus pendirinya, Marti Ahtisaari, merupakan instrumen yang sangat efektif dalam memajukan proses perdamaian. Dibandingkan dengan HDC

31. Miller, Michelle Ann (2006) “What’s So Special About Special Autonomy in Aceh?”. Dalam: Reid, ed., *op cit.*, hal.303.

32. ICG (2005) *Aceh: a New Chance for Peace*. Asia Briefing No. 40, Jakarta and Brussels, 15.8.2005, hal.2.

33. *Ibid.*, hal.2-3.

dalam penyelesaian perdamaian sebelumnya, CMI memiliki tingkat otoritas yang lebih tinggi dan memiliki kapasitas dalam bekerja sebagai mediator perdamaian. Adalah sangat mudah bagi Ahtisaari, sebagai contoh, untuk memperoleh akses kepada otoritas tingkat tinggi seperti Sekjend PBB, Kofi Annan, dan Representasi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Eropa (*European High Representative for Foreign and Security Policy*), Javier Solana, yang membuktikan bahwa hal tersebut sangat berarti dalam tahap-tahap awal perundingan. Dalam prosesnya, Ahtisaari menerima konfirmasi dari pemerintah Indonesia dan GAM bahwa pembicaraan perdamaian akan dilakukan pada bulan Desember 2004.³⁴ Akan tetapi, pada 26 Desember 2004, bencana tsunami menghantam Aceh dan diikuti oleh gempa bumi sebesar 9 SR di barat laut Sumatra.

Didalam kekecewaan dan penderitaan yang besar pada saat tsunami, perundingan perdamaian dilanjutkan bulan Januari 2005 di Helsinki. Dari pihak pemerintah Indonesia, tim perundingnya melibatkan Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM), Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informasi), dan Wiryono Sastrohandoyo (seorang diplomat) yang berlaku sebagai kepala perunding. Sementara dari pihak GAM, tim perunding mereka melibatkan para pemimpin senior seperti “Perdana menteri” Malik Mahmud dan “Menteri Luar Negeri” Zaini Abdullah dan juga beberapa tokoh ternama lainnya yang berasal dari diaspora Aceh dengan didampingi oleh penasihat-penasihat asing. Beberapa isu yang terdapat dalam agenda perundingan: (1) bagaimana demobilisasi dan demiliterisasi dilaksanakan; (2) bagaimana pengawasan dan pelaksanaan perjanjian diberlakukan; (3) bagaimana amnesti dan penyatuan kembali dari para mantan pejuang dilakukan; dan (4) bagaimana masa depan status politik Aceh dan keterlibatan GAM dalam politik lokal ditetapkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, GAM mulai mencapai suatu terobosan. Pada proses perundingan yang kedua, pada 21-23 Februari 2005, pemimpin GAM mengumumkan bahwa mereka menerima solusi yang didasarkan pada ‘pemerintahan mandiri’ daripada mendapatkan kebebasan penuh. Sementara mereka tetap berkeras untuk tidak menerima otonomi khusus (terkait dengan hubungannya yang negatif dengan konsesi-konsesi yang terbatas dalam UU-NAD), mereka siap untuk menerima versi lebih longgar dari suatu pemerintahan mandiri (self-government). Perubahan posisi yang dramatis ini dapat dihubungkan dengan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu proses pembelajaran dari para pemimpin GAM; meskipun pendiri GAM yang menganut paham garis keras, Hasan Tiro, masih memegang kendali terhadap organisasi tersebut, kondisi kesehatannya yang semakin melemah telah mencegahnya dalam berpartisipasi secara langsung dalam perundingan. Dengan menyadari bahwa keinginan kuat akan kemerdekaan dapat menghasilkan suatu jalan buntu, yang kemungkinan dapat membawa pada konflik bersenjata yang baru, para pemimpin GAM yang lebih muda mulai memikirkan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima yang setidaknya dapat menghasilkan suatu solusi. Seperti yang dikatakan oleh Bakhtiar Abdullah, juru bicara GAM, “Konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti itu (dengan berkeras pada permintaan akan kemerdekaan) dan kami harus mengakuinya.... Dimana hal tersebut (pemerintahan mandiri) adalah hal yang utama dalam perundingan... dalam perundingan-perundingan kami maju dengan hal-hal yang mungkin untuk dibawa kedalam perundingan.”³⁵ Faktor yang kedua adalah tekanan dari komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik dengan segera sehingga bantuan kemanusiaan terhadap korban tsunami dapat diberikan tanpa ada hambatan. Tergerak oleh penderitaan

34. Aspinall (2005), *op cit.*, hal.19.

35. Aspinall (2005), *op cit.*, hal. 26.

masyarakat Aceh, komunitas internasional mulai menaruh tekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik untuk memberikan perhatian khusus terhadap perjanjian perdamaian. Pendekatan yang sama juga diberlakukan terhadap pemerintah Sri Lanka dan kelompok separatis Tamil. Sewaktu Presiden Yudhoyono mengumumkan gencatan senjata dan memberikan saran akan solusi perdamaian yang permanen segera setelah tsunami, komunitas internasional telah memperhitungkan GAM akan menempuh pendekatan yang lebih fleksibel.

Setelah lima babak perundingan (27-29 Januari, 21-23 Februari, 12-16 April, 26-31 Mei, dan 12-17 Juli 2005), pihak pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya dapat menghasilkan sebuah *memorandum of understanding* (MoU) yang meliputi pemerintahan, partisipasi politik, ekonomi, hukum perundang-undangan, hak-hak asasi manusia, amnesti dan penyatuan kembali, pengaturan keamanan, pengawasan, dan resolusi konflik. Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 17 Juli 2005 berisi:

*The Government of Indonesia and Free Aceh Movement confirm their commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all. The parties are committed to creating conditions which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic process within a unitary state and constitution of the Republic of Indonesia ... The parties to the conflict commit themselves to building mutual confidence and trust.*³⁶

36. Pernyataan bersama pemerintah Indonesia dan GAM, 17.7.2005, terdapat pada <http://www.cmi.fi/?content=press&cid=61>.

Membangun Demokrasi pada Masa Pasca Konflik

Keberhasilan pihak pemerintah Indonesia dan GAM dalam menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian bulan Agustus 2005 dapat dihubungkan dengan paling sedikit tiga faktor. *Pertama*, sikap moderat yang ditunjukkan kedua belah pihak sehingga memungkinkan sebuah proses negosiasi yang menghasilkan kesepakatan. Seperti yang telah disebutkan, pemilihan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla bulan Juli 2004 telah membawa harapan baru akan proses perdamaian di Aceh. Pembukaan kembali perundingan-perundingan setelah mereka terpilih, menurut Edward Aspinall, menandakan peningkatan kekuatan-kekuatan terhadap pencapaian solusi perdamaian.³⁷ Memang proses pemilihan yang demokratis telah mengalahkan mereka yang menginginkan solusi militer di Aceh sebagai penyelesaian yang utama. Di bawah pemerintahan yang baru, solusi perdamaian telah menjadi prioritas utama.

Kedua, Perjanjian Helsinki lebih dapat diterapkan (dibandingkan dengan COHA) karena perjanjian tersebut memberikan insentif yang tepat dan dapat diterima GAM untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian. Insentif-insentif ekonomi yang ditawarkan oleh tim negosiasi Kalla selama perundingan perdamaian yang diutamakan pada tsunami lebih menarik daripada alasan perjuangan GAM yang meminta kontrol ekonomi yang lebih. Sehingga, tidak seperti *syariah*, yang terbukti memberikan pengaruh yang tidak banyak terhadap menyakinkan GAM untuk menyerahkan senjata mereka, insentif-insentif ekonomi (terutama alokasi lahan-lahan pemerintah untuk pendistribusian mantan anggota GAM) mendapatkan respon yang lebih serius. Observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis mengindikasikan bahwa

37. Aspinall (2005), *op cit.*, hal.31.

pada bulan April 2006, KPA (Komisi Peralihan Aceh) – organisasi baru yang dibentuk untuk merumahkan mantan pejuang GAM – dalam daerah Aceh Besar dan bagian utara Aceh telah membentuk perusahaan-perusahaan bisnis untuk mengantisipasi penggunaan lahan pertanian dan aktivitas pembalakan (*logging*). Sewaktu ditanya pandangannya mengenai aktivitas-aktivitas yang mungkin untuk dilakukan melalui organisasi barunya, Tengku Usman Muda menjelaskan, "Kita tidak mengetahui pastinya kapan pemerintah akan menyerahkan lahan-lahan yang telah dijanjikan pada kita. Tetapi setidaknya kita telah menetapkan suatu perusahaan bisnis untuk mengantisipasi hal itu."³⁸ Insentif lain yang ditujukan untuk GAM adalah mereka diijinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum daerah dengan membentuk partai-politik mereka sendiri atau dengan menjadikan mantan anggota GAM untuk menjadi calon independen. Sementara COHA tidak menyebutkan kemungkinan untuk GAM dalam berpartisipasi dalam pemerintahan lokal, MoU Helsinki mengizinkan GAM untuk membentuk partai mereka sendiri dan mencalonkan kandidat-kandidat dalam pemilihan umum daerah. Dengan menerima suatu ide mengenai pemerintahan yang mandiri – self government – , para pemimpin GAM mulai menyadari bahwa mereka dapat mengontrol keadaan politik lokal melalui demokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh juru bicara GAM, Bakhtiar Abdullah, "Kami percaya bahwa pemikiran kami akan pemerintahan yang mandiri yang kami utarakan dalam perundingan perdamaian dapat dicapai melalui proses demokrasi. Yang dapat kami pelajari sekarang adalah bagaimana menerapkan demokrasi dengan kehormatan."³⁹ Sehingga, observasi penulis yang dilakukan selama pelatihan

38. Wawancara dengan Tengku Usman Muda, seorang tokoh KPA terkemuka di daerah Aceh Besar, Banda Aceh 6.4.2005.

39. Pernyataan yang dibuat oleh Bakhtiar Abdullah dalam sesi penutupan dalam pelatihan demokrasi di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Friedrich-Ebert Foundation (Jerman), 3.2.2006.

demokrasi membuktikan bahwa mantan anggota GAM sangat antusias terhadap demokrasi, terutama dalam memperkirakan partisipasi mereka dalam proses politik lokal.

Ketiga, kelelahan dalam berjuang dan kerusakan-kerusakan yang dialami GAM, terutama dalam keadaan darurat militer pada tahun 2003-2004. Segera setelah masuknya militer Indonesia dalam jumlah yang sangat besar, anggota GAM terdesak dan harus mengungsi ke pegunungan. Sementara para *sagoe* (administrasi sub-distrik) yang dianggap sebagai pusat dari operasi GAM, pada pertengahan tahun 2004, hampir setahun sejak keadaan darurat militer, pemasokan kebutuhan GAM dan komunikasi pada masa ini mengalami gangguan yang sangat berarti yang menyebabkan para pejuang yang berperang di pegunungan dan daerah terpencil lainnya menjadi semakin terisolasi dan mulai mengalami kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok. Sebagai contoh, 'Gubernur' GAM untuk daerah Linge, memperhitungkan situasi tersebut, "Keberadaan pihak militer dalam jumlah yang sangat banyak selama masa darurat militer telah memaksa kita untuk mundur ke daerah pegunungan. Selama berbulan-bulan kami harus bertahan dengan hampir tidak adanya makanan, bergerak terus menerus selama setiap empat sampai lima jam. Secara logistik, kami harus dapat bertahan dengan apa yang dapat kami temukan di hutan. Kadang-kadang kami harus menyelip untuk mendapatkan sesuatu dari hasil lahan orang-orang desa. Kami makan kelapa, umbi-umbian, pisang, nangka muda, atau apa saja."⁴⁰ Dalam situasi ini solusi perdamaian nampak lebih cocok untuk diterapkan daripada terus berjuang dalam perang.

Ketika bencana tsunami memporak-porandakan Aceh pada penghujung tahun 2004, situasi di Aceh berubah total, terutama dengan masuknya ratusan LSM internasional melakukan

40. Wawancara dengan Husni Djalil, Banda Aceh, 3.2.2006

berbagai aktivitas kemanusiaan untuk memberikan bantuan darurat kepada para korban, memperbaiki sarana infrastruktur, membangun kembali rumah tinggal penduduk yang hancur, dan membantu pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Dengan terbukanya Aceh bagi komunitas internasional, terpilihnya pemimpin negara yang berorientasi pada perdamaian, dan makin terdesaknya GAM, maka peluang bagi solusi damai menjadi semakin terbuka. Pada masa pasca-MoU, sejumlah LSM internasional masuk ke wilayah Aceh untuk menindaklanjuti MoU dengan membantu warga Aceh untuk memahami demokrasi secara lebih baik dan membangun institusi demokrasi, terutama partai politik lokal. Salah satu LSM yang bergerak di bidang ini adalah Friedrich-Ebert Stiftung (FES), sebuah LSM Jerman, yang sejak pertengahan 2005 membuka unit kerja khusus Aceh melakukan serangkaian program demokratisasi melalui pelatihan demokrasi, memfasilitasi pembentukan sekolah perdamaian dan demokrasi, serta memfasilitasi pembentukan partai politik lokal Aceh. Dengan mempekerjakan para pakar politik dan trainer lokal, sejak akhir 2005 hingga saat ini, FES melakukan serangkaian pelatihan tentang praktek demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan manajemen partai politik kepada mantan anggota dan petinggi GAM supaya dapat berpartisipasi dalam demokrasi lokal dan nasional.

Prospek ke Depan

Versi terakhir dari MoU akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Penandatanganan MoU merupakan akhir dari seluruh proses yang melelahkan. Pemerintah Indonesia masih harus meyakinkan pihak-pihak yang skeptis, terutama orang-orang yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong pembentukan partai politik lokal di Aceh dan mengizinkan mantan anggota GAM

maju dalam proses pemilihan umum daerah. Masalah inilah yang sepertinya menciptakan perundingan yang berat dalam tahap-tahap akhir perundingan. Undang-undang No.31/2002 mengenai partai politik menyatakan bahwa sebuah partai politik dapat ikut serta dalam pemilihan apabila mereka memiliki struktur cabang yang tetap di lebih dari setengah dari 27 propinsi, dan dalam setiap propinsi tersebut mereka juga harus memiliki cabang tetap di lebih dari setengah daerah distrik dan *municipalities*. Melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat plural dalam konteks agama dan etnisitas, undang-undang ini di disain untuk mencegah pembentukan partai-partai daerah berdasarkan etnis yang dapat mengganggu kesatuan negara. Sehingga untuk mengizinkan partai-partai daerah dibentuk di Aceh, pemerintah harus lebih dulu mengamandemen undang-undang tersebut. Tentunya, usul untuk merevisi undang-undang tersebut mendatangkan protes dari pihak nasionalis. Pramono Anung, Sekretaris Jenderal dari partai politik kedua terbesar di Indonesia (PDIP), sebagai contoh, menolak usul akan pembentukan partai lokal dengan merujuk pada ancaman-ancaman dari pihak separatis yang berbahaya yang ditunjukkan oleh partai-partai berorientasi etnis di daerah Basque dan Quebec.”⁴¹

Tetapi, tidak ada gunanya untuk mundur. Perjanjian perdamaian sudah ditandatangani dan penerapannya menunggu. Walau pun kenyataannya undang-undang mengenai pemerintahan Aceh (RUU-PA) masih dikerjakan, penandatanganan persetujuan (di DPR) untuk menggalakkan pembentukan partai lokal di Aceh mulai terlihat. Untuk menyusun undang-undang mengenai pemerintahan Aceh, pemerintah Indonesia diminta oleh masyarakat Aceh untuk membentuk tim mereka sendiri untuk menyerahkan rumusan undang-undang tersebut kepada pemerintah. Dengan terdiri dari perwakilan GAM, akademisi, anggota-anggota DPRD,

41. Koran Tempo 7.7.2005.

dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, tim tersebut dapat menyelesaikan rumusan undang-undang tersebut dan diserahkan ke Sekretariat Negara bulan Desember 2005. Sekretariat Negara menyerahkan rumusan tersebut untuk dibicarakan dan disahkan oleh DPR, yang mana telah membentuk suatu panitia kerja atau Panja untuk mengerjakan rumusan akhir dari undang-undang tersebut. Dari laporan-laporan memperlihatkan bahwa Sekretariat Negara telah memangkas secara substansial rumusan asli undang-undang tersebut. Pihak media mendapatkan bocoran bahwa diantara poin-poin krusial yang dihapus dari versi aslinya terdapat klausa mengenai penerapan kandidat independen dalam pemilihan umum daerah yang diinginkan oleh mantan anggota GAM dan juga otonomi khusus daerah Aceh untuk menerapkan hubungan dengan ekonomi asing secara mandiri. Terdapat pembicaraan diantara anggota-anggota GAM bahwa ‘pemangkasan’ tersebut merupakan cerminan dari pengkhianatan pemerintah terhadap Perjanjian Helsinki. Sebelum situasinya menjadi lebih parah, Yusuf Kalla campur tangan dalam menjamin keaslian rumusan undang-undang tersebut bahwa rumusan itu tidak akan diubah sampai rumusan itu sampai kepada panja di DPR.⁴²

Undang-undang mengenai pemerintahan di Aceh direncanakan untuk dikeluarkan DPR pada tanggal 31 Maret 2006 untuk mengantisipasi Pilkada yang dijadwalkan pada bulan April 2006. tetapi sewaktu panja mulai mendiskusikan rumusan tersebut bulan Februari, terdapat suatu daftar yang memuat 1446 pertanyaan untuk diklarifikasi dan dipecahkan bersama. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu sampai bulan Juli 2006, dan pilkada dijadwalkan pada bulan September 2006. Pada masa penyelesaian makalah ini, rumusan tersebut masih dalam proses pembuatan. Walaupun terdapat beberapa komentar

skeptis dari beberapa kelompok yang berbeda dari Aceh dengan melihat pada kapasitas panja untuk dapat menyelesaikan semua masalahnya, pemimpin GAM cukup puas dengan perkembangan dari rumusan tersebut. Malik Mahmud, ‘Perdana Menteri’ GAM, menyatakan, “Meskipun terdapat masalah, situasi terakhir dari RUU-PA memuaskan. Rumusan tersebut berjalan menurut Perjanjian Helsinki. Secara umum, kami puas dengan itu.”⁴³ Suasana di DPR mengindikasikan bahwa masalah pembentukan partai lokal di Aceh akhirnya disetujui. Sebelumnya, 9 dari 10 fraksi di DPR menyetujui pembentukan partai politik lokal di Aceh. PDIP (satu-satunya fraksi yang menentang rumusan tersebut) akhirnya menyerah, setelah beberapa diskusi internal yang serius.⁴⁴

Meskipun GAM berencana untuk membentuk partai politik dan berpartisipasi dalam pilkada berikutnya, dalam pandangan lain GAM mengetahui bahwa partisipasinya dalam pilkada tahun 2006 tidak dapat dipaksakan. GAM menyadari bahwa pembentukan partai politik dalam waktu yang pendek memiliki resiko yang besar untuk gagal dalam pilkada yang nantinya dapat menuju pada munculnya ketidakpercayaan dan perpecahan. Sehingga, GAM cenderung untuk lebih berhati-hati dalam rencananya untuk membentuk partai politik lokal. Seperti yang dinyatakan oleh perwakilan GAM dalam AMM (*Aceh Monitoring Mission*), Irwandi Yusuf, “Semua tergantung dari apakah RUU-PA masih mewakili hak-hak masyarakat Aceh untuk membentuk partai mereka sendiri. Apabila diperlukan, kami dapat menunggu sampai undang-undang mengenai partai politik disahkan. Apabila tidak, kami dapat mengumumkan pembentukan sebuah partai politik. Kami Siap. Jaringan kami sudah ada, kami hanya mengaktifkannya kembali.”⁴⁵

43. <http://www.acehkita.com>, 4.5.2006 (diakses pada 3.6.2006).

44. <http://www.acehkita.com>, 31.5.2006 (diakses pada 3.6.2006).

45. <http://www.acehkita.com>, 8.5.2006 (diakses pada 5.6.2006).

42. Serambi Indonesia 4.2.2006.

Tetapi, menghadapi pilkada untuk memilih gubernur propinsi dan kepala daerah yang dijadwalkan pada bulan September 2006, GAM memutuskan untuk tidak berpartisipasi tetapi tidak mencegah para anggotanya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat individual, seperti yang diungkapkan oleh Bakhtiar Abdullah, “Sebagai sebuah organisasi GAM tidak akan menominasikan kandidat manapun untuk pilkada yang akan berlangsung di Aceh. Tetapi kami memberikan kebebasan bagi anggota kami untuk mencalonkan diri sebagai individual, dan bukan atas nama GAM.”⁴⁶ Para pemimpin GAM menyadari bahwa partisipasi dalam pilkada tanpa persiapan khusus sangat beresiko, dan oleh karena itu mereka menargetkan pada pemilihan umum tahun 2009. Dalam sebuah konferensi pers, Malik Mahmud menyatakan, “Kami telah berpikir dan memutuskan bahwa tujuan kami bukanlah pilkada ini, tetapi pemilihan umum tahun 2009. Pada saat itu kami telah memiliki partai kami sendiri dan akan siap untuk berpartisipasi dalam proses politik.”⁴⁷ Sangat jelas terlihat bahwa GAM tidak tertari untuk memaksakan dirinya untuk berpartisipasi dalam pilkada yang akan berlangsung. Meskipun GAM mengarahkan pandangan pada pemilu tahun 2009, GAM harus dapat menemukan sesuatu yang dapat menghubungkan organisasinya dengan politik nasional. Beberapa cendekiawan meramalkan kemungkinan koalisi antara mantan partai GAM dengan Golkar pada pemilihan umum nasional tahun 2009. Melihat bahwa Yusuf Kalla merupakan Pemimpin Golkar dan popularitasnya dari memulai proses perdamaian mulai bertumbuh, koalisi ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

Meskipun proses perdamaian di Aceh saat ini berjalan pada arah yang benar, tidak mustahil dapat terjadi kemunduran.

kemunduran-kemunduran ini dapat terjadi oleh 2 gangguan yang potensial. Gangguan yang pertama yang mungkin untuk membawa proses perdamaian pada jalan buntu berasal dari pihak pemerintah Indonesia, yaitu para nasionalis garis keras (terutama diwakili oleh elemen-elemen konservatif di dalam PDIP yang didukung oleh pemimpinnya, Megawati) dan birokrasi negara (terutama pihak-pihak dari Kementerian Dalam Negeri). Dalam perumusan undang-undang mengenai pemerintahan Aceh (RUU-PA), sebagai contoh, PDIP menolak dengan keras usulan akan terbentuknya partai lokal dan pencalonan independen bagi masyarakat Aceh. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berkeras untuk hanya memberikan Aceh 2 persen dari pendapatan daerah (seperti yang telah tercantum dalam undang-undang otonomi khusus) daripada 5 persen yang diminta oleh masyarakat Aceh. Seperti yang dinyatakan dengan keras oleh salah seorang anggota panja RUU-PA, Djoko Susilo, “jika terjadi kemunduran dalam proses perdamaian di Aceh, kita harus menyalahkan pemerintah (merujuk pada Kementerian Dalam Negeri) yang berkeras untuk mengalokasikan hanya 2 persen dari pendapatan lokal kepada pemerintah Aceh. Kita masih harus menunggu campur tangan Presiden Yudhoyono. Setelah itu baru kita dapatkan undang-undang akan pemerintahan Aceh yang setidaknya dapat diterima.”⁴⁸

Gangguan yang kedua terhadap proses perdamaian datang dari kelompok militer anti-GAM yang berada di Aceh. Saat ini terdapat 15 kelompok militer anti GAM yang tersebar di seluruh Aceh. Tiga organisasi terbesar adalah Barisan Rakyat Anti Separatis GAM dengan 125 ribu anggota, Front Perlawanan Separatis GAM dengan 62 ribu anggota dan Gerakan Pemuda Merah Putih⁴⁹ dengan 25 ribu anggota. Pada masa perang, kelompok-

46. <http://www.acehkita.com>, 30.5.2006 (diakses pada 6.6.2006)

47. Ibid.

48. Wawancara dengan Djoko Susilo, Anggota PAN dan anggota panja RUU-PA, di Jakarta, 21.6.2006.

49. Merah Putih merupakan warna bendera Indonesia.

kelompok ini membantu pihak militer untuk menyadap operasi GAM dan memobilisasi sumpah setia kepada Republik Indonesia diantara para masyarakat desa.⁵⁰ Pada masa proses perdamaian, kelompok-kelompok ini cemburu terhadap perlakuan khusus pemerintah terhadap GAM (pemberian lahan kompensasi, dana reintegrasi, hak-hak untuk maju dalam pemilihan umum, dan sebagainya). Bagi mereka, baik MoU dan Undang-undang mengenai pemerintah Aceh telah memberikan terlalu banyak keuntungan bagi GAM.⁵¹ Sehingga mereka akan melakukan apapun yang dapat mereka lakukan untuk mengganggu proses tersebut dan mereka melemparkan semua kesalahan kepada GAM. Sebagai contoh, pada bulan April 2006, kelompok-kelompok ini menyerang dan menghancurkan kantor-kantor organisasi masyarakat sipil yang dikenal dengan SIRA di Pidie. Terdapat kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok ini akan melakukan pemaksaan, intimidasi, dan bentrokan-bentrokan bersenjata yang dapat menggagalkan proses perdamaian.⁵² Walaupun terdapat ancaman dari pengganggu-pengganggu yang potensial, masyarakat Aceh dan anggota GAM yakin bahwa perjanjian Helsinki akan bertahan dan konflik bersenjata di Aceh selama 30 tahun akan segera berakhir sepenuhnya. Hal ini terjadi berkat demokrasi di Indonesia dan Aceh serta peran mereka yang percaya akan pentingnya penyelesaian secara damai. Demokrasi telah memberikan kesempatan kepada mantan pejuang GAM untuk terlibat dalam proses politik. Melalui proses demokrasi, pihak-pihak yang berkonflik mampu untuk menghasilkan insentif-

50. Serambi Indonesia 13.5.2006.

51. Wawancara dengan Saifuddin Bantasyam, pakar hak asasi manusia di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, 5.4.2006.

52. Tjhin, Christine Susana (2006) Post-tsunami Reconstruction and Peace-building in Aceh: Political Impacts and Political Risks. Dalam: John, Marei dan Judith Illerhues, eds., *A New Dynamic for Peace? Post-Tsunami Reconstruction and Its Impact on Conflict Resolution*. Bonn, Friedrich-Ebert Stiftung, 25.

insentif yang tepat yang dapat mengikat mereka dalam persyaratan perjanjian.

Demokrasi: Sebuah Kekuatan

Tulisan ini telah menunjukkan bahwa demokrasi dapat menjadi sebuah kekuatan untuk merintis jalan penyelesaian konflik secara damai dan kurang-lebih permanen. Di samping itu, tulisan ini juga telah menunjukkan bahwa tanpa adanya insentif yang tepat, maka upaya negosiasi untuk menyelesaikan konflik akan menghadapi jalan buntu atau kegagalan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kegagalan jeda kemanusiaan dan COHA. Pertama, penyelesaian perdamaian pertama-tama harus berhadapan dengan kubu-kubu yang berkonflik dengan mencoba untuk membantu mereka membuat suatu daftar permasalahan yang dapat dibawa ke meja perundingan. Pihak-pihak yang berkonflik harus mempersiapkan sebuah pendekatan yang fleksibel demi terciptanya dialog dan negosiasi. Kedua, pengenalan akan akar permasalahan konflik tersebut sangat penting untuk memulai perundingan, terutama hal ini dapat membuat pemerintah memberikan penawaran dengan insentif yang tepat terhadap segala penolakan dalam partisipasinya dalam perundingan dan melaksanakan serta terikat persyaratan-persyaratan yang ada sehingga dapat tercapai suatu persetujuan. Apabila tidak terdapat insentif yang tepat, proses perdamaian tidak dapat bertahan karena persetujuan tersebut tidak menarik bagi pihak-pihak yang terkait. Ketiga, penyelesaian perdamaian harus memasukkan proses politik yang inklusif sebagai satu paket.

Berbeda dengan dengan jeda kemanusiaan maupun COHA, perundingan Helsinki tidak saja lebih menyentuh substansi persoalan, tetapi juga memberikan insentif yang lebih tepat (yakni: pelibatan GAM ke dalam proses demokratis di

Aceh dan pemberian sejumlah kompensasi material) sehingga pihak GAM bersedia melunakkan tuntutan kemerdekaan penuh menjadi otonomi penuh. Dengan demikian, negosiasi pun lebih dimungkinkan sehingga perdamaian yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Aceh dapat diwujudkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa insentif yang tepat muncul akibat proses demokratisasi di Indonesia. Pelibatan sejumlah mantan petinggi GAM dalam proses politik – terbukti dengan terpilihnya mereka dalam sejumlah jabatan penting (gubernur, bupati, dll.) – telah menunjukkan kepada kita betapa demokrasi dapat menciptakan peluang bagi negosiasi yang terbuka sehingga makin mendorong pihak-pihak yang saling bertikai untuk menyepakati suatu pakta perdamaian dan menjalankan pemerintahan secara bersama-sama.

Referensi

Buku, Journal dan Makalah

Aspinall, Edward. 2005. *The Helsinki Agreement: a More Promising Basis for Peace in Aceh?* Policy Studies No.20. Washington: East-West Center.

_____. 2005. *The Helsinki Agreement: a More Promising Basis for Peace in Aceh?*. Policy Studies No.20. Washington: East-West Center.

_____. 2006. "Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesian Rule". In Anthony Reid (ed.). *Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.

Bell, Daniel A. 2004. "Is Democracy the 'Least Bad' System for Minority Groups?". In Susan J. Henders (ed.). *Democratization and Identity: Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*. New York: Lexington Book.

Brown, Mark Malloch. 2004. "Post-Conflict Transitions: the Challenge of Securing Political, Social and Economic Stability". In Kevin M. Cahill (ed.). *Human Security for All: a Tribute to Sergio Vieira de Mello*. New York: Fordham University Press.

Griffiths, Ann L. 1998. "Introduction". In Ann L. Griffiths (ed.). *Building Peace and Democracy in Post-Conflict Societies*. Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University.

Hedman. 2005, Eva-Lotta E. "Back to the Barracks: Relokasi Pengungsi in Post-Tsunami Aceh". *Indonesia* No.80, October.

Huber, Konrad. 2004. "The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Implementation". *Policy Studies* No.9. Washington: East-West Center.

Human Rights Watch. 2003. "Indonesia: Conditions Decline in Aceh". *Human Rights News*, 5 June.

International Crisis Group (ICG). 2005. *Aceh: a New Chance for Peace*. Asia Briefing No.40, Jakarta and Brussels: ICG, 15 August. W

International Crisis Group (ICG). *Aceh: a Fragile Peace*. ICG Asia Report No.47. Jakarta and Brussels, 2003.

Lembaga Research dan Survey IAIN Ar-Raniry Darussalam (The Research and Survey Institute of IAIN Ar-Raniry). 1978. *Laporan Penelitian: Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.

Miller, Michelle Ann. 2006. "What's So Special About Special Autonomy in Aceh?". In Anthony Reid (ed.). *Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.

Missbach, Antje. 2005. "Aceh's Guerillas: the Internal

Transformation of Gerakan Aceh Merdeka (GAM)”. In Ingrid Wessel (ed.). *Democratization in Indonesia: After the Fall of Suharto*. Berlin: Logos Verlag.

Natsios, Andrew. 1997. “An NGO Perspective”. In I.W. Zartman and J.L. Rasmussen (eds.). *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace.

Nessen, William. 2006. “Sentiments Made Visible: the Rise and Reason for Aceh’s National Liberation Movement”. In Anthony Reid (ed.). *Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.

Reid, Anthony. 2006. “The Pre-modern Sultanate’s View of Its Place in the World”. In Anthony Reid (ed.). *Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.

Riddell, Peter G. 2006. “Aceh in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: ‘Serambi Mekah’ and Identity”. In Anthony Reid (ed.). *Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.

Rieff, David. 2004. “Humanitarian Action in a New Barbarian Age”. In Kevin M. Cahill (ed.). *Human Security for All: a Tribute to Sergio Vieira de Mello*. New York: Fordham University Press.

Schulze, Kirsten E. 2004. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*. Policy Studies No.2. Washington: East-West Center.

_____. 2006. “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976-May 2004”. In Anthony Reid (ed.). *Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.

Smith, Anthony. 2002. “Aceh – Democratic Times, Authoritarian Solutions”. *New Zealand Journal of Asian Studies* Vol.4 (1), pp.68-89.

Snyder, Jack. 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: W.W. Norton.

Sulaiman, M. Isa. 2006. “From Autonomy to Periphery: a Critical Evaluation of the Acehnese Nationalist Movement”. In Anthony Reid (ed.). *Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.

Tjhin, Christine Susana. 2006. “Post-tsunami Reconstruction and Peace-Building in Aceh: Political Impacts and Political Risks”. In Marei John and Judith Illerhues (eds.). *A New Dynamic for Peace?: Post-Tsunami Reconstruction and Its Impact on Conflict Resolution*. Bonn: Friedrich-Ebert Stiftung.

United Nations News Service. 2003. “Indonesia: Annan Deeply Concerned about Hostilities’ Effect on Civilians in Aceh”, 29 May.

Varshney, Ashutosh. 2003. “Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond”. In Carolyn M. Elliott (ed.). *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford: Oxford University Press.

Weinstein, Harvey M. and Eric Stover. 2004. “Introduction: Conflict, Justice and Reclamation”. In Harvey M. Weinstein and Eric Stover (eds.). *My Neighbour, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Surat Kabar dan Internet

<http://www.acehkita.com>, 30 May 2006 (diakses 6 June 2006).

<http://www.acehkita.com>, 31 May 2006 (diakses on 3 June 2006).

<http://www.acehkita.com>, 4 May 2006 (diakses on 3 June 2006).

<http://www.acehkita.com>, 8 May 2006 (diakses 5 June 2006).

<http://www.cmi.fi/?content=press&Wid=61> (diakses 4 April 2006).

Kompas, 2 February 2005.

Kompas, 2 June 2005.

Kompas, 7 January 2003.

Koran Tempo, 7 July 2005.

Serambi Indonesia, 13 May 2006.

Serambi Indonesia, 4 February 2006.

Biografi Singkat Penulis

Y Purwadi Hermawan

*Mekarnya
Bunga Demokrasi Aceh* 

Upaya Kecil untuk Hasil Besar

Nota kesepahaman yang ditandatangani wakil pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia memang membawa angin perubahan bagi masa depan baru masyarakat Aceh. MoU Helsinki dapat disebut sebagai kesepakatan monumental yang meletakkan titik balik sejarah baru dari perjalanan panjang perjuangan dengan kekerasan menuju penciptaan kesejahteraan dengan jalan-jalan damai dan demokratis.

Namun tantangan yang dihadapi bagi pemeliharaan perdamaian juga terhampar di depan mata. Pertanyaan yang segera muncul adalah apakah pemerintah Indonesia berkomitmen untuk segera merealisasikan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dengan tokoh-tokoh GAM. Sepanjang tahun 2005-2007 masyarakat Aceh menanti dengan cemas dibuatnya Undang-undang yang mewujudkan tekad tersebut. Ketika Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh digodok, perdebatan muncul karena tampak bahwa pemerintah masih setengah hati memberikan masyarakat Aceh hak-hak otonom untuk mengelola

dirinya sendiri. Ketika akhirnya disetujui, masyarakat Aceh harus menerima realitas bahwa tidak semua yang mereka inginkan sepenuhnya diwujudkan oleh Jakarta.

Pertanyaan lain yang sama pentingnya adalah bagaimana masyarakat Aceh bertransformasi dalam kondisi damai pasca MoU Helsinki di tengah ketidakpastian menyangkut implementasi kesepakatan MoU Helsinki. Pemeliharaan perdamaian juga sangat tergantung pada kemampuan mantan anggota GAM untuk mengintegrasikan diri mereka dengan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Friedrich Ebert Stiftung menyadari betul betapa pentingnya proses reintegrasi ini bagi masa depan Aceh yang damai. Diyakini bahwa demokrasi adalah jalan yang bisa menjadi tumpuan bagi perubahan damai. Keyakinan ini menjadi makin kuat karena pada saat yang sama masyarakat Indonesia sedang juga berjuang dalam mengkonsolidasikan demokrasi mereka. Supaya bisa segera bersosialisasi dengan masyarakat Aceh dan Indonesia secara keseluruhan mantan anggota GAM perlu segera dibekali dengan pengetahuan dan praktik-praktik demokrasi. Setidaknya mereka yang kebanyakan baru keluar dari ‘hutan’ ataupun ‘gerilya kota’ tidak asing dengan pengertian demokrasi. Keyakinan ini kemudian memunculkan ide bagi pentingnya pelatihan demokrasi bagi mantan anggota GAM. Pelatihan demokrasi ini diharapkan dapat menjadi upaya kecil yang dapat berdampak besar bagi masa depan Aceh yang damai dan sejahtera.

Mempersiapkan Topik dan Metode Pelatihan

Sedikitnya ada dua pertanyaan sulit yang muncul ketika FES dan para trainer harus merancang pelatihan pendidikan demokrasi pertama kali di awal tahun 2006. Pertanyaan pertama adalah

materi-materi apa yang kiranya harus diberikan kepada mereka yang ‘baru saja keluar dari aktivitas gerilya baik di hutan maupun perkotaan.’ Pertanyaan kedua adalah metode apakah yang tepat sehingga membuat mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan dengan serius dan tentu saja kemudian memahami isi materi.

Kedua pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab. Apalagi pelatihan demokrasi di wilayah pasca konflik juga harus menjadi bagian penting dari proses reintegrasi mantan pejuang yang selama ini ‘terpisah’ dari sanak saudara dan masyarakat. Pilihan topik pelatihan dan metode yang dipilih harus membantu pemulihan trauma politik mereka yang harus mengangkat senjata melawan tentara penumpas separatism di masa lalu, mengobati ‘luka-luka psikologis’ mereka yang menjadi korban konflik, dan sekaligus membangun optimism bagi masa depan baru mereka. Tanpa optimisme, sulit mengharapkan bahwa para peserta pelatihan dapat mencerna materi pelatihan.

Banyak modul pelatihan demokrasi yang sebelumnya telah dibuat oleh FES ataupun *Political education NGO (POLENGO)* lain yang dipakai dalam pelatihan di banyak negara lain. Namun persoalannya adalah apakah materi-materinya memang sesuai kebutuhan dasar yang mereka perlukan untuk mengenal demokrasi. Seleksi atas topik-topik pelatihan ternyata tidak mudah. Para trainer harus menentukan topik-topik yang dapat memancing partisipasi aktif para peserta dan perdebatan yang sengit, namun tanpa harus memunculkan sensitivitas yang justru dapat memecah belah eks kombatan.

Demokrasi merupakan nilai universal. Namun demokrasi harus diterjemahkan sedemikian rupa dengan “pendekatan dan bahasa-bahasa lokal” dan mempertimbangkan kearifan lokal. Di sinilah kemudian pemilihan topik-topik harus akhirnya bermuara pada suatu keyakinan di kalangan peserta bahwa demokrasi yang

universal ternyata telah tumbuh dari tradisi-tradisi lokal di Aceh sendiri. Demokrasi adalah milik Aceh.

Untuk menetapkan topik yang sesuai sejumlah strategi dilakukan. Di sepanjang tahun 2006, FES, para trainer dan fasilitator melakukan konsultasi yang intensif dengan Perhimpunan Perdamaian Aceh yang menjadi partner lokal dalam pelatihan demokrasi. Penyesuaian-penyesuaian juga dilakukan terus menerus dalam lapangan, terutama menanggapi dinamika-dinamika yang terjadi dilapangan.

Pembentukan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi di awal tahun 2007, menjadikan wadah yang tepat untuk menggodok topik-topik pelatihan di sepanjang tahun 2007 maupun tahun-tahun berikutnya. Dewan Pengarah, Kepala Sekolah dan pengurus Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD) mengambil inisiatif di depan untuk menetapkan dari sekian banyak topik pelatihan yang telah didesign bersama-sama. Dengan pembentukan SPD, penentuan topik relatif lebih mudah terutama sejak tahun 2007 dan sesudahnya.

Pertanyaan tentang pilihan metode awalnya juga menghadapi kesulitan yang sama dengan pemilihan topik pelatihan. Target pelatihan adalah mereka yang tergolong sebagai orang dewasa, sehingga secara teoretis metode yang tepat adalah metode untuk pendidikan orang dewasa (seperti Andragogi). Namun tingkat pendidikan mereka ternyata beragam; ada yang hanya mengenyam pendidikan SD, namun ada pula yang telah menyelesaikan pendidikan S-1. Ada yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan sekuler, namun tidak sedikit pula yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti Madrasah ataupun pesantren-pesantren. Termasuk di antara peserta adalah guru ngaji, yang tentu saja memiliki cara berbeda ketika mengajar murid-muridnya.

Posisi dan pangkat para mantan kombatan GAM yang menjadi partisipan pelatihan juga bermacam-macam dalam struktur GAM. Beberapa di antara mereka adalah Panglima Wilayah dan Gubernur Wilayah yang ditugaskan oleh Komite Peralihan Aceh untuk mengikuti pelatihan demokrasi. Namun banyak pula di antara mereka adalah tentara-tentara yang tugasnya wajib mengikuti perintah panglima wilayah.

Awalnya trainer-trainer tidak menyadari bahwa perbedaan posisi para mantan anggota GAM ini akan berpengaruh dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan; namun dalam pelatihan-pelatihan awal yang dilakukan ternyata struktur komando dan hirarkis sangatlah berpengaruh. Mereka yang berpangkat rendah atau tentara biasa sungkan berbicara sebelum panglima wilayah berbicara; atau tidak akan berbicara berbeda dengan panglima mereka. Di sini pelatihan awal menjadi kaku karena struktur hirarki dan komando sangat membatasi inisiatif dan gerak bebas para peserta. Lagi-lagi metode yang tepat diperlukan untuk memecahkan kekakuan ini dan sekaligus menumbuhkan semangat egalitarianism dan partisipasi.

Dari persiapan yang matang, akhirnya disepakati bahwa metode pelatihan prinsipnya harus mendorong peserta aktif dalam pelatihan. Trainer bersepakat untuk menggunakan metode Metaplan yang lebih memberikan banyak kesempatan kepada peserta pelatihan untuk menggali pengalaman mereka dan untuk mensharingkannya dengan peserta-peserta lain. Di samping itu, diupayakan setiap peserta pelatihan didorong berperan aktif melalui sejumlah permainan peran, simulasi perilaku demokrasi dan perdebatan-perdebatan terbuka. Tayangan video tentang demokrasi dan film perjuangan juga menjadi menu handal untuk menghidupkan suasana pelatihan.

Bunga Demokrasi yang Indah

Pelatihan Demokrasi di sepanjang tahun 2006 dibedakan menjadi dua, yaitu pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan. Pelatihan dasar bersifat sangat terbuka dimana peserta dipilih oleh KPA daerah. Pelatihan lanjutan dimaksudkan untuk memberikan pendalaman dari materi-materi yang telah diberikan pada pelatihan dasar. Namun, peserta pelatihan lanjutan ini sangat selektif. Pelatihan ini sekaligus juga bertujuan untuk memunculkan fasilitator dan trainer lokal yang handal dari masyarakat Aceh.

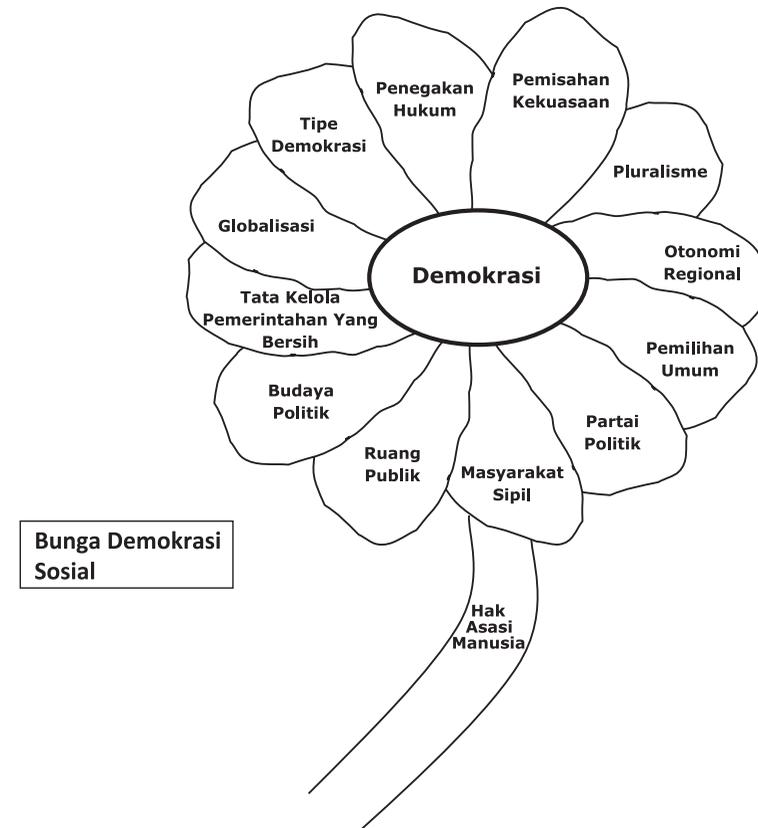
Pada pelatihan dasar yang diselenggarakan Perhimpunan Perdamaian Aceh, topik-topiknya bersifat sangat umum namun mendasar. Topik tersebut meliputi arti Demokrasi dan unsur-unsur demokrasi seperti Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan, penegakan hukum, gender dan *equality*, partai politik, pemilihan umum dan musyawarah-mufakat. Peserta juga diajak untuk melihat keuntungan-keuntungan memiliki demokrasi dan pendekatan demokrasi untuk menyelesaikan konflik.

Pada pelatihan lanjutan, topic-topik yang dipilih meliputi aturan hukum, pluralisme, budaya politik, pasar dan demokrasi, *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *defective democracy* (demokrasi cacat), demokrasi dan perdamaian, demokrasi dalam partai politik.

Dinamika pelatihan selalu hidup dan menarik dengan pilihan-pilihan metode pelatihan. Namun antusiasisme peserta itu sendirilah yang sebetulnya menentukan dinamika ini. Beberapa pengalaman tentang dinamika itu misalnya dapat ditulis di sini.

Suatu saat dalam pelatihan pertama tahun 2006, trainer membuka pelatihan dengan pertanyaan apakah demokrasi? Para peserta kemudian diminta untuk menulis satu kata di atas kartu

meta (*metacard*). Yang mengharukan adalah ketika sebagian besar peserta menulis “Kebebasan” sebagai pengertian utama dari demokrasi. Kebebasan tentu saja bermakna plural. Ini bisa diartikan bebas berpendapat dan berekspresi, bebas dari ketakutan, bebas berasosiasi dan bebas memilih. Trainer memaknainya sebagai kerinduan mendalam peserta yang selama ini hidup dalam cengkeraman ketakutan akan bayang-bayang ‘penyisiran dan penyusuran oleh aparat keamanan yang selalu mengkampanyekan kedaulatan, kesatuan dan persatuan bangsa’.



Perdebatan hangat muncul ketika peserta harus mensimulasikan tentang prosedur demokratik penyelesaian konflik. Peserta dibagi dalam beberapa peran: pejabat pemerintah daerah, masyarakat yang tanahnya tergusur akibat konflik, kontraktor yang memenangkan tender untuk proyek pembangunan jalan dan aktivis LSM. Penghayatan yang mendalam dari para peserta dalam mensimulasikan jalan terbaik proyek pembangunan jalan menunjukkan betapa sulitnya penyelesaian konflik karena masing-masing bersikukuh dengan kepentingannya. Namun pada akhirnya peserta juga menghayati bahwa sekalipun sulit, penyelesaian dengan jalan demokratis ternyata menjadi sangat indah dan damai.

Pelatihan juga mencoba mengangkat isu gender yang relatif sensitif untuk masyarakat Aceh. *Role play* dijadikan metode untuk memperkenalkan pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Dipilihlah tiga orang diantara peserta. Satu orang yang ditunjuk untuk berperan sebagai istri dan sekaligus aktivis sosial perempuan; satu sebagai pemuka agama dan tokoh desa; satu sebagai suami. Pertanyaannya adalah apakah perempuan boleh bekerja di luar rumah. Argumentasi-argumentasi logis muncul dari masing-masing peserta yang harus memainkan peran berbeda-beda. Serta merta muncul pro dan kontra antara aktivis perempuan dan suaminya, yang seringkali didukung oleh tokoh agama dengan nasihat-nasihat keagamaan dan normatif tradisional. Peserta lain mengamati perilaku pemain role play dan mencermati argumentasi-argumentasi mereka. Suasana menjadi sangat hidup ketika seluruh peserta harus menunjukkan sikap mereka terhadap kasus yang sedang dibicarakan.

Demokrasi memang indah. Keindahan ini menjadi semakin bermakna ketika ternyata salah seorang peserta pelatihan berhasil menorehkan perasaannya tentang demokrasi dalam sebuah puisi. Seorang eks kombatan yang pernah tertembak di beberapa bagian

tubuhnya itu berhasil memukau peserta pelatihan, trainer dan fasilitator ketika dia ternyata juga menunjukkan kepiawaiannya sebagai pembaca puisi.

Pohon Bunga Demokrasi

Buah Pena: Tgk. Muhammad Sukri T S - alias Tgk. Diladang Demokrasi ...

Nama Pohonmu kian manis

Di Seantero jagat maya

Di bawah naungan bermartabat

Kehadiranmu adalah perjuangan

Kewujudanmu adalah kesadaran

Tentang hukum, kedaulatan, kebebasan dan pluralisme

Kelahiranmu adalah kesetaraan, musyawarah, parpol

Kemunculanmu adalah batang pemerintahan

Berbunga supermasi sipil, titik tak bernoktah

Demokrasi ...

Sampai kapanpun derap langkah mu tetap tegar,

utuh dan jati

Di gelanggang petisi politik legislatif , eksekutif dan yudikatif

Atau di gelanggang legislatif , eksekutif dan yudikatif

Tetap bisa merubah jaman

Wahai tokoh intelektual Demokrasi

Kelangsunganmu jangan coba diundurkan

Ayoo... maju bersama tulang-tulang sakti

Mengangkat martabat agama, bangsa dan Negara

Menjunjung daulat demokrasi
 Jangan gusar pahlawan reformasi
 Langkahmu adalah perwira Lagumu adalah syahdu
 Nawaimu adalah keyakinan

Demokrasi...

Jangan relakan langkah mu di selingkuh kan
 Relakan matimu di galang tanah
 Jangan hidup digalas bangkai
 Bait-bait puisi dan demokrasi menyatukan kita

Daerah berdaulat Kutaraja, 1 Pebruari 2006, di Hotel Rajawali - Nanggroe Atjeh – Tgk.Diladang.

Membangun Sekolah Perdamaian dan Demokrasi

Dalam pelatihan demokrasi, FES menekankan pentingnya dibangun kemandirian lokal yang nantinya diharapkan mampu untuk mendiseminasikan dan mensolisasikan lebih lanjut apa yang telah dipelajari dari pelatihan demokrasi. Trainer dan fasilitator umumnya adalah aktivis LSM ataupun akademisi yang berasal dari Banda Aceh, Jakarta dan Bandung. Tidak selamanya mereka dapat mendampingi masyarakat lokal.

Dengan kesadaran akan pentingnya kemandirian lokal, pelatihan-pelatihan selalu diarahkan untuk mencari calon-calon fasilitator dan trainer di kalangan peserta yang potensial. Fasilitator dan trainer baru inilah yang nantinya diharapkan untuk aktif melakukan pelatihan-pelatihan dasar di daerah-daerah mereka. Diharapkan bahwa fasilitator dan trainer local lebih memiliki kemampuan yang lebih unggul untuk melanjutkan pelatihan demokrasi. Mereka mengenal lebih baik tradisi local dan

bisa berbicara dalam bahasa local, sehingga apa yang disampaikan akan lebih mudah diasup oleh peserta pelatihan.

Pendekatan ini dilakukan dalam pelatihan demokrasi di sepanjang tahun 2006, dan menjadi perhatian serius pada tahun 2007 dan seterusnya. Pada awal tahun 2007, Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat dan Perhimpunan Perdamaian dan Demokrasi Aceh (PPDA) bersama-sama dengan FES, Olof Palme International Center (OPIC) dan Perhimpunan DEMOS menggagas perlunya pembentukan suatu komite atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengorganisir pelatihan-pelatihan demokrasi termasuk topik-topik pelatihan, metode dan penentuan trainer-trainer dan fasilitator-fasilitator.

Pada tanggal 16-18 Maret 2007 diadakanlah lokakarya dan sekaligus peresmian pembentukan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi di Sabang, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. SPD inilah yang kemudian menjadi partner FES dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan demokrasi di Aceh.

Lokakarya ini ditindaklanjuti dengan *Training of Facilitators* dan *Training of Trainers* di Banda Aceh dan di Sabang dengan tujuan utama untuk mempersiapkan fasilitator dan trainer untuk pelatihan-pelatihan demokrasi di seluruh wilayah di Aceh. Pelatihan ini dirasakan sangat efektif karena fasilitator dan trainer inilah yang kemudian terlibat aktif dalam penentuan topik dan metode yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.¹

Partai Lokal: Jalan Reintegrasi Politik

Di sepanjang tahun 2007 dan 2008, pelatihan lebih fokus terkait dengan bagaimana kaidah-kaidah sebuah partai politik

1. Evaluasi lebih lanjut terhadap SPDA dan program pelatihan demokrasi dapat dilihat pada Bab *Dari Senjata ke Laptop: Tantangan dalam Transformasi Sebuah Gerakan Gerilya menjadi Aktor Politik*.

dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Topik-topik ini dirasakan sangat penting dan strategis karena menyangkut kepentingan jangka pendek, menengah dan panjang masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh harus segera disiapkan untuk mengambil bagian penting dalam proses demokratisasi melalui pemilu 2009. FES sendiri tidak melibatkan diri dalam pembangunan partai politik, dan tidak memfokuskan diri hanya pada satu partai politik saja, namun memberikan dukungan pada semua partai politik demi kemajuan kualitas demokrasi di Aceh. Demikian secara khusus mantan anggota GAM perlu dibekali dengan pengetahuan tentang partai politik lokal dan kompetensi untuk menjadi pengurus partai lokal. Diharapkan mereka mampu membangun partai politik yang demokratis, dan sekaligus dapat memenangkan pemilihan umum untuk menempatkan kader-kader dari mantan anggota GAM di lembaga-lembaga perwakilan daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota).

Pada tahun 2008-2009, pelatihan memberikan materi pengetahuan dasar yang meliputi pengantar demokrasi, teori partai politik dan transisi demokrasi, landasan hukum partai politik dan pemilu 2009, dan masalah-masalah mendesak di Aceh dan solusinya. Pelatihan juga memfasilitasi tumbuhnya keahlian peserta dengan topik pelatihan yang mencakup: bagaimana membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai lokal; bagaimana menetapkan visi, misi dan program partai lokal; bagaimana melakukan analisa SWOT; bagaimana merekrut anggota partai dan membangun relasi dengan konstituen; bagaimana menggali dana swadaya masyarakat dan mengelola keuangan partai; mengembangkan struktur organisasi partai dan pengambilan keputusan; mengelola konflik internal dalam partai; bagaimana membangun relasi dengan media massa.

Seiring dengan pembentukan partai lokal dan juga semakin dekatnya pemilu 2009, fokus pelatihan menjadi lebih mengerucut

lagi dengan menambahkan topik kampanye yang meliputi Strategi Kampanye, Perencanaan Kampanye, Manajemen dan Organisasi Kampanye. Peserta dalam pelatihan ini tetap dibekali dengan Analisa SWOT dan mekanisme rekrutmen anggota dan mekanisme pengambilan keputusan partai dan pengelolaan konflik internal.

Di sepanjang tahun 2007, telah diselenggarakan 14 training di 14 wilayah; 12 di antaranya mendapat dukungan penuh dari FES. Lima training pertama memberikan pengetahuan dasar tentang demokrasi dan pembentukan partai lokal. Sementara training-training berikutnya membekali peserta dengan strategi kampanye untuk memenangkan pemilu 2009. Keempat belas training tersebut melibatkan 463 peserta yang 125 (27%) di antaranya adalah kaum perempuan.

Di sepanjang tahun 2008, SPD telah mengorganisir 15 training di 15 wilayah. Pada tahun tersebut, sebanyak 531 peserta terlibat dan 154 (29%) di antara mereka adalah kaum perempuan.

Dari hampir 1.000 orang yang telah terlibat dalam pelatihan, lebih dari 100 orang telah mengajukan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota. Beberapa diantara mereka berhasil duduk di kursi perwakilan dan memainkan posisi penting dalam lembaga perwakilan seperti ketua dewan atau ketua komisi.

Membekali Wakil Rakyat Baru

Menyusul pemilihan umum 2009, fokus pelatihan demokrasi lebih pada bagaimana memberikan pembekalan kepada politisi-politisi local yang berhasil terpilih dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Tugas ini tentu saja tidak mudah. Mereka yang terpilih dalam pemilu 2009 berasal dari beragam partai politik termasuk

dari Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan partai-partai nasional ataupun lokal yang lain. SPD selama ini lebih fokus pada mantan kombatan GAM dan aktivis pro demokrasi Aceh yang memiliki jalinan dengan gerakan kemerdekaan Aceh di masa lalu. Dalam training ini FES juga bekerjasama dengan Aceh Future Institute (AFI) sebagai mitra lokal.

Seiring dengan kemunculan anggota-anggota baru DPRA/DPRK hasil pemilu 2009, harapan dan tuntutan terhadap jaminan keamanan, peningkatan ketertiban sosial, dan percepatan pembangunan di bidang ekonomi sangatlah besar. Demokrasi diyakini menjadi landasan sekaligus kerangka utama yang dapat menjamin keberlangsungan perdamaian dan percepatan pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian penguatan institusi-institusi dan proses-proses demokratis menjadi kunci.

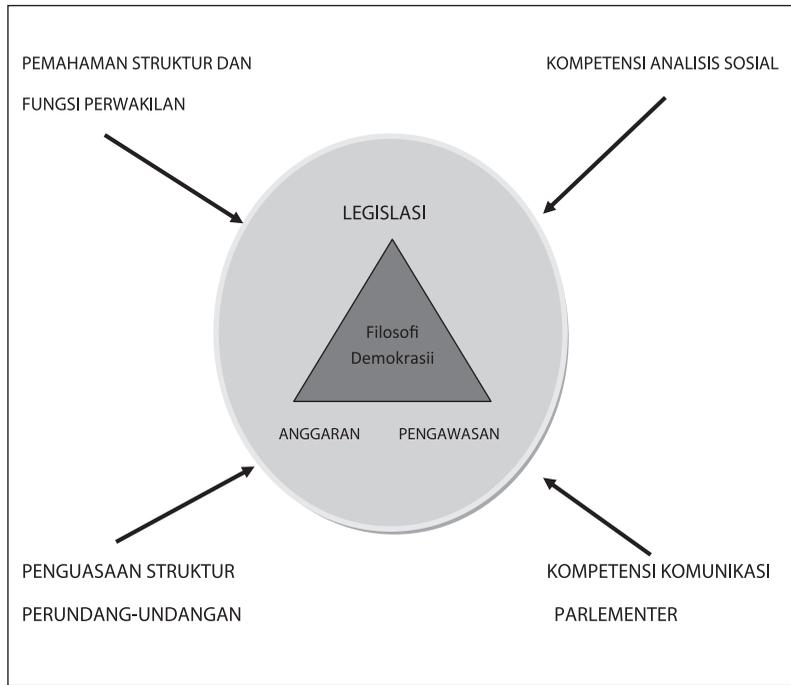
Dewan legislatif merupakan salah satu institusi politik yang amat sentral di dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi. Sebagai badan representasi, parlemen merupakan cerminan berbagai kelompok masyarakat dengan segala kepentingan danuntutannya. Selanjutnya, parlemen berfungsi sebagai lembaga legislasi yang bertujuan membuat berbagai peraturan yang mampu melindungi hak-hak setiap warga dan kelompok. Produk legislasi ini juga diharapkan mampu menjaga ketertiban, sekaligus kebijakan-kebijakan yang mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan. Di samping sebagai bentuk produk legislasi, penganggaran mencerminkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yang selanjutnya mengubah potensi-potensi tersebut menjadi kemampuan aktual masyarakat untuk membangun. Fungsi pengawasan oleh parlemen merupakan fungsi vital lainnya dimana

parlemen baik sebagai individu maupun institusi harus mampu menjamin pelaksanaan regulasi tersebut oleh eksekutif dan/atau mitra terkait serta mengawasi pelaksanaannya.

DPRA maupun DPRK dengan demikian diharapkan menjadi sebuah lembaga politik yang aktif, dinamis dan progresif. Misalnya, DPRA/DPRK tidak lagi semata-mata berada dalam sikap menunggu untuk didatangi oleh kelompok masyarakat untuk jmenyampaikan aspirasinya atau hanya sekadar menanggapi (memberi reaksi) terhadap usulan kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintahan (eksekutif). Sebaliknya, anggota DPRA/DPRK dapat secara pro-aktif menampung dan mampu mengolah aspirasi-aspirasi masyarakat menjadi regulasi-regulasi daerah. Dalam hubungannya dengan dinas-dinas pemerintahan serta satuan-satuan lain yang menangani isu-isu sosial, ekonomi (bisnis), keamanan, dan politik, DPRA/DPRK harus tampil sebagai institusi yang otonom. Dengan ini, interaksi dan komunikasi dengan instansi dan institusi lain berlangsung secara konstruktif dan etis.

Kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk memfasilitasi para anggota legislatif dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka di dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di dalam legislasi, penganggaran dan pengawasan, dan seperangkat softskill pendukung optimalisasi peran dan fungsi.

Pelatihan legislatif mencakup empat topik fundamental dan tiga topik pendukung. Empat topik fundamental mencakup nilai-nilai dasar demokrasi dan perdamaian, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tiga topik pendukung meliputi pemahaman isu-isu sosial, optimalisasi struktur dan fungsi dewan, dan komunikasi politik parlementer. Sesi pelatihan didesign sedemikian rupa untuk mengajak anggota legislative untuk memahami landasan filosofis dalam membangun Membangun demokrasi, perdamaian dan kesejahteraan di Aceh;



untuk memahami Memahami isu-isu sosial dan aspirasi rakyat; Optimalisasi struktur dan Fungsi Dewan Perwakilan; Pengenalan Program dan Proses Legislasi di Aceh; Proses Rencana Kerja Penganggaran; Pengawasan Parlemen; dan Komunikasi Politik Parleментар yang Efektif.

Pelatihan ini merangkul sekitar 300 anggota legislative baru yang segera mengisi Dewan Perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota. Pelatihan ini merupakan pembekalan pertama yang diorganisir oleh Sekolah Perdamaian dan Demokrasi dengan tujuan untuk menjangkau politisi dari berbagai macam partai nasional dan partai lokal.

Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi

Tidak perlu diragukan lagi bahwa Aceh telah mengalami suatu transformasi yang fundamental sejak nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Secara institusional, telah terbentuk sejumlah partai lokal yang kini menjadi wadah baru perjuangan masyarakat Aceh. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum telah diselenggarakan dan diyakini sebagai prosedur bagi pemilihan pejabat pemerintahan dan juga wakil-wakil rakyat yang bertanggungjawab bagi kesejahteraan rakyat. Media massa telah memantau gerak laju demokratisasi di Aceh dan ulah perilaku politisi-politisi lama dan baru yang mengambil peran bagi konsolidasi demokrasi Aceh.

Pelatihan demokrasi yang didukung oleh Lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti FES di Aceh tentu saja hanya merupakan sebagian dari program kecil dari sekian banyak program-program besar yang telah dilaksanakan oleh berbagai komponen masyarakat di Aceh.

Tentu saja harus diakui bahwa agenda besar bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan perdamaian masih harus dilanjutkan, seiring dengan proses konsolidasi demokrasi di Aceh. Dengan komitmen besar dari seluruh komponen masyarakat, impian untuk melanggengkan perdamaian akan terwujud di bumi Nangroe Aceh Darussalam. Semoga.

Referensi/Dokumen:

SPD. *Laporan Tahunan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi SPD Atjeh Tahun 2007*. Banda Aceh, 2008.

SPD. *Laporan Tahunan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD) Tahun 2008*. Banda Aceh. 2009.

Olof Palme International Center (OPIC). Aceh Office. *Laporan Kegiatan Management Meeting Sekolah Perdamaian dan Demokrasi*. Banda Aceh, 2007.

Tim Penyusun Modul Pelatihan Legislatif Aceh FES-SPD Aceh. *Membangun Demokrasi, Perdamaian, Keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta: FES, 2009.

SPD. *Agenda Training of Trainers*. Sabang, 2007.

SPD. *Term of Reference, Training of Trainers*. Banda Aceh, 2007.

FES. *Third Preparatory Meeting for Aceh Democracy Training*. Jakarta, 25 January 2006.

Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD). *Term of Reference (ToR) Training of Fasilitator (ToF)* Permata Hati Guest House & Training Center, Banda Aceh, 14 – 17 April 2008

SPD. *Modul Training Tingkat Lanjutan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD)* Tahun 2008.

Yulius Purwadi Hermawan. *Modul Pelatihan Manajemen Partai Lokal*. FES, Jakarta: 2007.

SPD. *Draft Modul Training Dasar Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD)* Tahun 2008.

FES. *Handout on Democracy*. FES, Jakarta, 2006.

FES. *Aceh Democracy Training: Basic*, Economics Faculty of Malikussaleh University

Lhokseumawe 6 – 8 March 2006.

FES. *Aceh Democracy Training: Intermediate*. Economics Faculty of Malikussaleh University

Lhokseumawe. 9 – 11 March 2006.

Pius Prasetyo

*Dari "Kombatan"
ke "Demokrat"* 

Komitmen Transformasi

Perubahan kebijakan komitmen politik antara pihak Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman di Helsinki jelas menjadi batu pijakan yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia dan khususnya bagi masyarakat di Aceh. Perubahan dari kondisi perang ke arah kondisi damai tentu saja menuntut perubahan banyak aspek dalam kehidupan baik pada skala nasional, maupun pada skala lokal di Aceh.

Salah satu tuntutan yang signifikan khususnya bagi masyarakat di Aceh, khususnya untuk mereka yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah bahwa mereka harus merubah model perjuangan politik mereka dari model perang bersenjata menjadi “perang” kompetisi politik melalui mekanisme dan proses politik formal dan demikian juga melalui lembaga-lembaga politik formal. Kesadaran untuk merubah pola perjuangan tersebut tentu saja bukan merupakan suatu hal yang mudah mengingat pola perjuangan fisik bersenjata sudah

dilakukan dalam periode waktu yang sudah sangat panjang paling tidak sejak rejim Orde Baru berkuasa.

Kesadaran untuk mengintegrasikan para mantan kombatan ke dalam dinamika kehidupan politik formal-institusional tidak hanya muncul dari kalangan intern mereka sendiri, namun juga muncul dari kalangan eksternal seperti lembaga-lembaga internasional non pemerintah. Lembaga internasional ini kemudian memberikan berbagai bantuan dalam bentuk kegiatan percepatan program reintegrasi.

Tulisan ini merupakan deskripsi pengalaman empiris penulis yang terlibat dalam kegiatan reintegrasi yang dilakukan bersama dengan Internasional NGO yang dalam hal ini adalah Friedrich Ebert Stiftung (FES) dari Jerman dengan menyelenggarakan *Democratic Training* untuk para mantan kombatan di beberapa kota di Aceh antara lain pengalaman pelatihan di Banda Aceh dan Lhoksemauwe. Proses yang terjadi dalam training dan perubahan-perubahan yang terjadi pada partisipan menjadi fokus dalam deskripsi ini.

Gerakan Aceh Merdeka Dari Perspektif Trainer

Tidak disangkal lagi bahwa keberadaan dan perjuangan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka – GAM jika dilihat dari sudut pandang sebagian orang di luar Aceh merupakan gerakan perjuangan politik bersenjata untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan tersebut pasti telah menjadi batu sandungan bagi pemerintah Indonesia. Dari waktu ke waktu pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan di Aceh khususnya upaya untuk mengakhiri perjuangan yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka – GAM.

Berbagai ragam kebijakan tersebut paling tidak bisa dilihat dari rejim Suharto yang lebih menerapkan tindakan militer dan

menempatkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Strategi yang digunakan adalah strategi perang melawan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Sangat dipahami bahwa penetapan Aceh sebagai daerah operasi militer jelas menimbulkan banyak korban yang tak terduga dari kedua belah pihak. Daerah operasi militer tersebut akhirnya berjalan dari waktu ke waktu bahkan sampai di era Reformasi pun kondisi tersebut masih dipelihara.

Upaya mencari alternatif pendekatan juga pernah dilakukan pada Era kepemimpinan Abdurachman Wahid yang ingin mengedepankan pendekatan dialogis perundingan. Namun sebelum hal tersebut berlanjut dengan upaya penyelesaian damai, presiden Abdurachman Wahid sudah harus turun dari kursi kepresidenan karena konstelasi dan kompetisi politik di Jakarta. Dalam perjalanan berikutnya menunjukkan bahwa sikap pemerintah Indonesia juga belum menunjukkan adanya perubahan pendekatan terhadap aktivitas Gerakan Aceh Merdeka. Baru pada saat kepemimpinan RI di pegang oleh Susilo Bambang Yudoyono – SBY kebijakan tentang penyelesaian masalah Aceh mengalami perubahan yang sangat fundamental.

Kebijakan pemerintah SBY yang bersedia menempatkan pemerintah RI dalam meja perundingan dengan petinggi dari GAM pada kenyataannya memang banyak menuai sikap mendukung dan protes. Terutama sikap yang tidak mendukung lebih banyak dipengaruhi oleh sikap dan pandangan bahwa Gerakan Aceh Merdeka tidak sepatutnya kalau harus duduk “semeja” dengan pemerintah RI, mereka menganggap penyeteraan antara RI dan GAM merupakan suatu hal yang salah, karena GAM adalah gerakan separatis. Dilain pihak sikap dan pandangan yang memberikan dukungan terhadap upaya penyelesaian masalah Aceh lebih didasarkan pada argumentasi bahwa penyelesaian damai hanya bisa dilakukan dengan cara perundingan yang dilakukan

dalam konteks kesetaraan dan kesepahaman. Oleh karena itulah perundingan menghasilkan kesepahaman (MoU) di Helsinki.

Kesepahaman inilah yang kemudian menjadi landasan bagi keberlanjutan untuk melakukan upaya yang bersifat re-integrasi bagi para mantan kombatan dalam mempersiapkan mereka untuk melakukan perjuangan yang sudah bukan lagi perjuangan senjata namun bentuk keterlibatan dan kompetisi dalam kehidupan politik praktis. Upaya yang dilakukan adalah pemberian pelatihan praktek politik demokrasi yang melibatkan aktor non pemerintah yang dalam hal ini NGO internasional yang bernama Fredrick Ebert Stiftung dari Jerman.

Reintegrasi Politik Melalui Pelatihan Demokrasi

Sudah menjadi kesadaran bahwa perjuangan politik pada pasca perang hanya bisa dilakukan dengan melibatkan diri dalam sistem dan mekanisme kompetisi politik sebagaimana yang sudah dijalankan secara modern. Dalam arti bahwa perjuangan untuk mempengaruhi dan memperoleh kekuasaan harus dilakukan melalui prosedur demokrasi yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert A.Dahl bahwa demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem politik yang harus dapat memberi peluang yang sama (equal) kepada semua warga negara (demos) yang sudah dewasa untuk terlibat dalam kehidupan politik. Kesamaan dalam kehidupan politik ini tentu saja didasarkan pada pemahaman bahwa mereka yang terlibat mempunyai kualifikasi yang layak untuk bisa terlibat dalam kesetaraan. (Robert A Dahl, lihat dalam, Anders Uhlin, *ibid*, p. 11.). Dalam konteks ini pulalah Dahl menegaskan bahwa hanya dalam sistem yang demokratis maka rakyat mempunyai peluang yang terbuka untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan baik melalui mekanisme langsung ataupun melalui mekanisme perwakilan.

Dari perspektif tersebut paling tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat dan memberikan agumentasi pembener bahwa upaya untuk mengintegrasikan warga masyarakat yang dalam hal ini adalah para mantan kombatan GAM dalam kehidupan politik yang lebih modern tentu saja merupakan hal yang sangat fundamental. Kegiatan mengintegrasikan kembali ini dilakukan dengan model pelatihan yang pada dasarnya merupakan pendidikan politik demokrasi.

Dalam banyak hal harus disadari bahwa pemerintah pada dasarnya tidak mampu untuk melakukan sendiri upaya-upaya yang dapat dilakukan yang dalam hal ini untuk mengintegrasikan para mantan kombatan tersebut dalam kegiatan politik praktis yang dapat diikuti oleh mereka. Oleh karena itu keterlibatan pihak non pemerintah menjadi sangat signifikan dalam upaya mempercepat proses integrasi dalam kegiatan politik praktis. Fredrich Ebert Stiftung – FES merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang berbasis di Jerman telah mengambil langkah untuk melibatkan diri dalam upaya membantu pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi bagi para mantan kombatan GAM sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahl bahwa keterlibatan dalam politik yang demokratis tentu saja menuntut adanya kecukupan kualifikasi atau kapasitas agar muncul “kesetaraan” dalam suatu kompetisi politik.

Friedrich Ebert Stiftung merancang model pelatihan dengan mengedepankan berbagai pengalaman yang pernah dimiliki termasuk juga upaya yang dilakukan dengan melibatkan personil baik dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi yang mempunyai konsern yang sama dalam rangka pemberdayaan politik para mantan kombatan tersebut. Pelibatan dari beberapa kalangan tersebut pada dasarnya untuk memperoleh berbagai pandangan dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan khususnya substansi yang harus diberikan bagi partisipan dalam pelatihan demokrasi.

Keterlibatan kaum akademis dari Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikulsaleh dan juga jaringan lembaga swadaya lainnya yang dalam hal ini adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan – PSHK serta KontraS dan GeraK pada akhirnya merupakan bagian integral dalam upaya mengkristalkan pandangan-pandangan dalam upaya untuk memberi kontribusi yang paling baik bagi masyarakat Aceh. Kristalisasi tersebut terwujud dalam berbagai substansi yang diberikan dalam pelatihan demokrasi untuk masyarakat Aceh khususnya para mantan kombatan – GAM.

Berbagai materi dari yang paling mendasar mengenai persepsi istilah demokrasi yang kemudian terangkai dalam “Bunga Demokrasi” pada hakekatnya ingin mengetahui lebih dahulu sampai sejauh manakah pemahaman yang dimiliki oleh para partisipan tentang demokrasi. Dalam praktek pelatihan pada akhirnya diperoleh suatu gambaran bahwa para partisipan pada dasarnya mempunyai variasi pandangan yang sangat beragam tentang demokrasi mulai dari yang paling elementer bahwa demokrasi lebih banyak diartikan sebagai “kebebasan” sampai dengan pandangan tentang demokrasi yang lebih menekankan pada sisi “aturan”. Pengertian “bebas” yang muncul dari partisipan banyak dipahami sebagai bentuk kebebasan yang kurang memperhatikan aspek aturan hukum yang merupakan instrumen untuk membatasi kebebasan dan untuk memberikan ruang bagi pihak lain untuk merasakan kebebasannya.

Dilain pihak juga ditemukan bahwa sebagian dari mereka juga mempunyai pandangan yang selaras dengan idealisme demokrasi yang sebenarnya, yaitu bahwa demokrasi berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itulah salah satu materi yang sangat ditekankan adalah tentang Hak Asasi Manusia. Sangat

dipahami bahwa mereka sangat menekankan pada aspek HAM dalam konteks pelatihan ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah perjuangan atau perlawanan yang dilakukan selama puluhan tahun dari generasi ke generasi. Lepas dari posisi manapun dalam melihat kondisi di Aceh pada waktu itu, tetap saja kita bisa menggarisbawahi bahwa mereka punya pengalaman yang sangat menggores tentang kejadian yang langsung mengenai atau dialami oleh dirinya sendiri dan berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia. Demikian juga kejadian yang dilihat atau yang dialami oleh kerabat atau rekan seperjuangannya. Pengalaman akan kejadian-kejadian tersebut tentu saja akhirnya menjadi referensi yang kemudian direfleksikan dalam pemahaman mereka tentang bagaimana seharusnya hidup berdemokrasi.

Dalam praktek pelatihan demokrasi khususnya pada sesi tentang hak asasi manusia, tidak jarang sebagian dari mereka pada dasarnya sudah tidak mau menyentuh wilayah yang sensitif seperti kejadian pembunuhan, penyiksaan, dan ataupun yang sejenisnya. Untuk sebagian dari mereka mungkin beraanggapan bahwa pengambilan contoh atau bahkan visualisasi dalam bentuk rekaman/film dapat mengingatkan luka lama yang oleh mereka ingin segera ditinggalkan meskipun tidak untuk dilupakan. Perang yang telah mereka alami dari generasi ke generasi tentu saja tetap meninggalkan catatan sejarah perjuangan atau perlawanan dari sudut pandang manapun pasti memunculkan persoalan kemanusiaan dan menimbulkan korban jiwa maupun harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Latar belakang sejarah yang dialami secara langsung ini tentu saja tidak akan begitu saja tidak mudah ditransformasikan dalam suatu sikap dan perilaku politik yang seharusnya diwujudkan dalam masa damai. Perubahan mindset atau cara pandang tentu saja harus disadari memerlukan suatu proses dan waktu.

Pelatihan demokrasi juga memberi tekanan bahwa praktek demokrasi memberikan tempat yang utama terhadap konstitusi atau hukum. Penegakan hukum harus menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan politik secara formal. Oleh karena itu dalam pelatihan tersebut para partisipan diberikan pemahaman bahwa hukum pada hakekatnya juga merupakan refleksi dari upaya untuk mengatur tingkah laku warga negara agar secara bersama-sama dapat mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Para peserta juga diberi praktek simulasi sederhana bagaimana aturan/hukum tersebut diharuskan dibuat dengan memperhatikan berbagai kepentingan yang muncul dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini kemampuan untuk melakukan negosiasi yang disimulasikan oleh kelompok yang ada dan yang tidak mengesankan pemaksaan, serta peran pemimpin dalam mengambil sikap untuk menentukan suatu keputusan merupakan suatu hal yang juga harus dipahami bagi mereka yang akan melanjutkan perjuangan politik diarena kompetisi politik formal.

Dalam simulasi tersebut sering nampak juga bahwa latar belakang pengalaman perjuangan bersenjata yang bernuansa militeristik dalam tingkatan tertentu juga nampak. Gerakan Aceh Merdeka yang mempunyai struktur / hirarki jabatan tentu saja juga akan memberikan pengaruh terhadap pola interaksi diantara mereka. Hubungan yang bersifat hirarki nampaknya juga memberi pengaruh terhadap pandangan/ide yang muncul dari mereka. Dilain pihak praktek demokrasi pada hakekatnya juga ingin menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas. Dilain pihak juga menunjukkan bahwa praktek demokrasi sering berbenturan dengan konteks masyarakat atau kelompok tertentu yang dalam skala tertentu bisa mereduksi hakekat berdemokrasi. Dalam hal ini feodalisasi ide/pandangan bisa terjadi karena konteks atau latar belakang tertentu yang dimiliki.

Dalam praktek sering menunjukkan bahwa gagasan seorang komandan seringkali ditempatkan sebagai suatu hal yang harus diikuti oleh anak buah. Pengalaman masa perang yang sangat ketat dengan praktek komando tentu saja akan mewarnai dalam praktek-praktek interaksi yang lainnya. Cara pandang seperti inilah yang dalam tingkatan tertentu ingin disesuaikan dengan konteks praktek berdemokrasi. Tentu saja sangatlah disadari bahwa pelatihan demokrasi yang diselenggarakan tersebut tidaklah berkeinginan untuk melakukan perubahan secara tiba-tiba, atau bahkan berpikiran bahwa pelatihan akan langsung dapat merubah pola pikir, sikap dan tindakan para peserta, meskipun tentu saja hal tersebut merupakan harapan dari pelatihan demokrasi.

Upaya untuk membuka pemahaman tentang demokrasi tidak juga lepas dari kesadaran bahwa tuntutan demokrasi adalah terwujudnya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemahaman ini tentu saja tidak hanya semata-mata memberikan referensi teoritis, namun berharap jika seandainya diantara para peserta pelatihan ada yang berhasil dalam suatu kompetisi politik dan akhirnya dapat menduduki jabatan-jabatan politik, maka mereka diharapkan dapat mewujudkan suatu praktek pemerintahan yang baik dan menghindari praktek-praktek korupsi.

Idealisme tentang tata pemerintahan yang baik tentu saja menjadi substansi yang harus diintroduksikan dan ditekankan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, pelayanan yang baik, dll yang pada tataran ini sering kali menemukan kontradiksi dengan kondisi empiris dilapangan. Namun demikian hal inilah yang pada akhirnya harus menjadi tantangan bagi mereka untuk dapat membuktikan bahwa mereka akan mewujudkan suatu sistem dan penyelenggaraan pemerintahan pasca perang dalam wujud yang lebih bisa dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat di Aceh yaitu suatu pemerintahan yang dapat menyejahterakan rakyat.

Isu lain yang perlu diintroduksi dalam konteks berdemokrasi adalah upaya untuk terus menerus menegaskan adanya persamaan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk dapat terlibat dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Sangat disadari bahwa dalam kelompok masyarakat dengan latar belakang kultur dan pemahaman tertentu seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Sementara dalam konteks berdemokrasi, maka kesempatan harus dibuka untuk semua warga negara sejauh memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Kenyataan berdasarkan pelatihan menunjukkan bahwa para peserta lebih banyak menyadari akan perlunya kesetaraan gender. Hal ini bisa dipahami bahwa para pejuang GAM tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, melainkan kaum perempuan Aceh juga melakukan perjuangan angkat senjata. Kelompok perempuan yang melakukan hal tersebut menyebut diri kelompok *Inong Balee*. Hal ini dapat dikatakan sebagai wujud praktek kesetaraan, meskipun mereka melakukan kegiatan perjuangan tersebut lebih dikarenakan oleh kondisi yang mendesak atau keterpaksaan.

Sebagian dari mereka yang tergabung dalam *Inong Balee* misalnya didorong oleh kejadian yang dialami karena tindak kekerasan, penyiksaan, atau bahkan pembunuhan yang terjadi pada suami atau kerabat mereka. Hal inilah yang menjadi dorongan kuat bagi para perempuan Aceh untuk melibatkan diri dalam perjuangan yang sering diidentikkan dengan peran laki-laki. Dalam konteks inilah maka praktek kesetaraan gender mereka wujudkan, namun hal ini bukan berarti dalam praktek-praktek selanjutnya kesetaraan ini begitu saja bisa diwujudkan. Kultur, adat isitiadat, dan bahkan keyakinan tentu saja akan menjadi variabel yang menentukan dalam

kelanjutan praktek kesetaraan gender. Pada dasarnya pelatihan demokrasi ini ingin menegaskan bahwa praktek demokrasi harus membuka peluang yang sama bagi semua warga negara tanpa dibatasi oleh sekat perbedaan gender.

Salah satu pilar kehidupan yang harus diintroduksi kepada para partisipan pelatihan demokrasi adalah bahwa memasuki arena kompetisi politik modern mau tidak mau harus masuk kedalam struktur politik, yang dalam hal ini adalah partai politik, yang sudah ada atau membangun partai politik baru. Banyak alasan yang disampaikan mengenai apa, bagaimana, kedudukan dan peran partai politik dalam kehidupan politik yang modern. Partai politik jelas akan menjadi pilar dalam membangun sistem dan kehidupan politik yang demokratis, disamping tentu saja sebagai sarana yang terstruktur dalam menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kelompok yang dalam masyarakat agar diakomodasikan dalam proses pembuatan kebijakan atau proses politik.

Pengenalan fungsi partai politik juga dilakukan agar peserta juga memahami bahwa partai politik tidak hanya semata-mata sebagai kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan melainkan juga mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti sosialisasi politik, artikulasi politik, agregasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, pengaturan konflik, proses politik. Hal ini dimaksudkan untuk disadari oleh partisipan yang akan melibatkan diri dalam kehidupan politik pasca angkat senjata. Kepentingan dan tuntutan dari masyarakat Aceh, lebih khusus lagi dari para mantan kombatan mau tidak mau harus disalurkan melalui mekanisme dan struktur politik modern.

Dalam konteks politik modern itulah maka pengenalan tentang kehidupan berpolitik melalui partai politik juga tidak akan pernah lepas dari kompetisi antar partai politik dalam pemilihan

umum. Oleh karena itu secara khusus pula materi pemilihan umum juga diberikan. Mekanisme politik inilah yang harus ditekankan kepada para partisipan bahwa kompetisi politik dengan partai politik hanya bisa dilakukan melalui mekanisme politik modern yaitu pemilihan umum. Mekanisme inilah yang harus ditopang bersama oleh partai politik sehingga pemilihan umum yang diselenggarakan dapat dipercaya oleh semua peserta pemilu.

Pengenalan tahap-tahap pemilu juga diperkenalkan dalam pelatihan tersebut sehingga partisipan mengenal secara pasti hal-hal apakah yang harus dilakukan dalam mengikuti pemilihan umum khususnya ketika mereka menggunakan partai politik sebagai kendaraan politiknya.

Peranan media massa dalam demokrasi juga menjadi substansi yang sangat penting untuk ditekankan dalam pemahaman tentang demokrasi. Diawali dengan ilustrasi yang menggambarkan seorang politisi yang benar-benar bisa memanfaatkan media massa, dan yang akhirnya dapat menguasai percaturan politik untuk mencapai kekuasaan. Hal ini pada dasarnya ingin menekankan bahwa media massa mempunyai posisi dan pengaruh yang sangat signifikan jika dimanfaatkan dalam percaturan atau kompetisi politik. Media massa dapat menjadi kekuatan politik dan dapat melakukan tekanan-tekanan politik terhadap suatu rejim yang berkuasa. Disisi lain media massa juga akan dapat menjadi saluran bagi kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat yang kemudian dapat menjadi input bagi pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan publik.

Dalam pelatihan tersebut partisipan memperoleh kesadaran bahwa keterlibatan dalam kehidupan politik dan khususnya upaya untuk mempengaruhi atau memperoleh kekuasaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peranan media massa. Argumentasi ini menjadi semakin relevan ketika pelaku politik / politisi harus membangun komunikasi dengan masyarakat.

Partisipan pelatihan disadarkan bahwa politisi selamanya tidak akan pernah lepas dari masyarakat, khususnya dalam membangun dan memperkuat dukungan dari masyarakat. Kekuatan legitimasi hanya bisa dibangun secara terus menerus melalui komunikasi yang salah satunya dilakukan dengan media massa.

Seluruh materi pelatihan yang diberikan tersebut sangat disadari tidak akan dapat begitu saja diwujudkan dalam realitas politik yang mereka lakukan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktek-praktek politik diberbagai tempat, khususnya di Indonesia bahwa idealisme mengenai praktek politik senantiasa memunculkan diskrepansi atau kesenjangan antara yang ideal dan kenyataan. Oleh karena itu ketika sebagian dari mereka sudah masuk pada ranah politik praktis, maka pihak Friedrich Ebert Stiftung melakukan kembali upaya untuk memberikan pemahaman tentang praktek demokrasi untuk mereka yang sudah menduduki jabatan politik khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) Aceh – DPRA.

Kompetisi Meraih Kekuasaan

Peluang yang diberikan oleh dalam nota kesepahaman bahwa para mantan kombatan GAM boleh mendirikan partai politik lokal nampaknya dimanfaatkan oleh mereka dengan mendirikan partai politik lokal. Di wilayah Ach akhirnya muncul beberapa partai lokal seperti Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dsb. Munculnya beberapa partai tersebut tentu saja dapat dibaca bahwa aspirasi masyarakat Aceh tidak mungkin hanya diwadahi dalam satu wadah partai politik. Hal ini tentu saja juga menunjukkan bahwa perjuangan bersenjata yang berujung pada nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM pada akhirnya juga tidak akan dapat tetap menyatukan langkah berikutnya dalam satu wadah politik yang sama.

Dalam konteks itulah maka demokrasi memberikan wadah munculnya berbagai perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat. Persoalan atau konflik yang muncul sudah seharusnya dikelola dalam mekanisme politik yang paling elegan yaitu membangun suatu struktur politik baru yang dalam hal ini partai-partai politik yang dirasakan dapat menjadi saluran aspirasi dan kepentingan politik mereka.

Pelatihan untuk para anggota DPRD tentu saja juga merupakan hal sangat penting mengingat bahwa mereka yang menjadi anggota DPRD belum tentu semua pernah memperoleh pelatihan demokrasi. Oleh karena itu upaya untuk mengingatkan kembali dan mengintroduksikan kepada mereka yang belum pernah mengikuti jelas merupakan hal yang sangat signifikan. Respon dan pertanyaan yang elementer pun masih muncul dari mereka yang sudah menjalankan politik praktis di tataran politik lokal di Aceh dengan menjadi parlemen daerah (Aceh). Isu-isu sensitif yang berhubungan dengan benturan ide antara pemikiran Islam dan demokrasi juga merupakan substansi yang muncul dalam pembicaraan atau diskusi pada saat pelatihan tersebut. Paling tidak dalam pelatihan tersebut berusaha membukakan suatu pemahaman bahwa ada pemikiran yang bisa saja berbeda dengan cara pemikiran yang lebih banyak dilandasi oleh aspek primordialisme yang dalam hal ini adalah pemikiran atas dasar pemikiran keagamaan. Pelatihan pada akhirnya juga membukakan bahwa aspek atau sisi lain yang tidak bisa diakomodasi dengan pola pemikiran yang primordialistik.

Menginteraksikan pemikiran jelas menjadi suatu hal yang sangat penting dalam proses pendewasaan suatu masyarakat. Ini bukan berarti bahwa masyarakat harus menerima begitu saja pola pemikiran yang selama ini mungkin belum menjadi kebiasaan. Namun yang lebih penting adalah seseorang atau sekelompok

orang mulai diintroduksikan adanya benturan pemikiran untuk akhirnya dapat sampai pada kondisi kedekatan untuk tidak ingin mengatakan suatu titik temu (keseimbangan).

Dari Kombat Ke Demokrat: Sebuah Catatan Kritis

Judul “dari Kombat ke Demokrat” bisa dikatakan sebagai pernyataan yang sloganistik atau bahwa terlalu utopis. Penulis sendiri dengan pengalaman dalam memberikan pendampingan/pemateri dalam pelatihan tersebut tentu saja juga tidak akan realitis bahwa pelatihan yang dilakukan dalam sesi tersebut akan dengan cepat memberikan efek perubahan yang mendasar. Penulis sendiri sangat menyadari bahwa proses menjadi aktor yang demokrat yang dituntut dalam suatu sistem dan kehidupan yang demokratis tentu saja menuntut suatu proses yang berkelanjutan.

Pelatihan tersebut paling tidak telah memberikan cara pandang / sikap dan tindakan yang semestinya bisa ditempuh dalam upaya membangun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan melalui keterlibatan dalam bidang politik praktis pasca perang. Kesediaan untuk mau “terbuka” para mantan kombat pada dasarnya telah menjadi catatan yang sangat penting bagi penulis. Hanya dengan sikap yang terbuka maka perkembangan individu dan masyarakat akan dapat terjadi. Meskipun juga harus dicatat bahwa keterbukaan pasti juga akan menimbulkan efek konflik. Namun hal ini menjadi wajar ketika muncul konflik, dan sejauh masih mempunyai kesediaan untuk saling menyesuaikan diri yang disertai kemauan untuk mengintegrasikan diri, maka hal ini akan menjadi modal yang sangat fundamental dalam membangun untuk kesejahteraan rakyat.

Memang kendala yang pasti muncul adalah ketika keberhasilan dalam mencapai posisi kekuasaan kemudian hanya

disikapi sebagai keberhasilan individu tanpa dilandasi prinsip akuntabilitas, bahwa kekuasaan tersebut pada hakekatnya sebagai sarana untuk berkontribusi dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu sebenarnya perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam rangka memberikan pendampingan bagi para praktisi politik sehingga bisa membantu memposisikan para aktor politik pada jalur pemikiran bahwa perjuangan apapun yang dilakukan adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

Esther Marthaler, Y Purwadi Hermawan dan Norbert von Hoffman

*Dari Senjata
ke Laptop* 

Pembelajaran dari SPD-A¹

Pendidikan Politik Sebagai Pondasi

Penyelenggaraan pendidikan politik pasca konflik adalah salah satu cara untuk mendukung proses perdamaian dan menjamin transformasi menuju masyarakat damai tetap berkelanjutan. MoU Helsinki menetapkan bahwa perjuangan bersenjata telah bertransformasi menjadi usaha politik demokratis dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) telah bertransformasi menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Mantan GAM dan pendukung-pendukungnya merupakan aktor politik baru, yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan pasca MoU Helsinki di Aceh. Karenanya pendidikan politik diperlukan untuk mengisi kelemahan ini. Tokoh-tokoh Komisi Peralihan Aceh, negosiator GAM di Helsinki,

1. Diterjemahkan dan diadaptasi dari: Esther Marthaler, Yulius Purwadi dan Norbert von Hoffman, *From Weapons to Laptops, The Challenges of transforming guerrilla movement to political actors*, Zurich: Helvetas (April 2009). Karya ini merupakan laporan hasil evaluasi terhadap SPDA dan program pelatihan demokrasi yang dilakukan di Aceh pada bulan Maret 2009.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bekerjasama dengan dengan organisasi lokal dan membentuk Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh (SPDA) sebagai wadah pelatihan peningkatan kemampuan politik.

Tujuan dibentuknya platform institusional adalah untuk menyediakan pendidikan politik kepada anggota partai-partai politik dan anggota masyarakat Aceh lain yang ingin menjadi bagian dalam proses politik pasca MoU Helsinki. Frase pertama (hingga tahun 2008) secara eksplisit fokus kepada mantan pejuang dan anggota partai politik lokal. Oleh sebab itu, dari tahun 2007 hingga 2008 SPDA menyelenggarakan 20 pelatihan dasar, 5 Pelatihan Tingkat Menengah serta 2 Pelatihan Fasilitator dan 2 Pelatihan untuk Pelatih (Training for Trainers), terutama untuk mantan pejuang. Di awal 2009 SPDA telah menghasilkan sejumlah besar pelatih lokal dan fasilitator. Bersama para akademisi lokal mereka dapat menyelenggarakan pelatihan tingkat dasar dan menengah serta pelatihan bagi pelatih dan telah menghasilkan sejumlah besar alumni yang tersebar di seluruh Propinsi Aceh.

Banyak partisipan terdahulu telah dilibatkan untuk peran politik, 86 orang untuk kursi legislatif, 154 orang saat ini adalah kadar partai. Mengingat komponen pelatihan SPDA ditujukan untuk mengembangkan *soft skill* perilaku politik yang demokratis, partisipan terdahulu harus lebih terbuka terhadap pluralisme dan menghargai adanya perbedaan pendapat, dan dapat berunding dan menghalangi provokasi. Di desa mereka, mereka cenderung menjadi pemimpin dan fasilitator perubahan dan menjalin hubungan yang baik dengan komunitas setempat. Berarti pendidikan politik yang telah diberikan oleh SPDA merupakan kontribusi yang penting dalam proses perdamaian dan demokratisasi.

Tetapi situasi politik di Aceh pada awal 2009 sangat sarat dengan kekerasan dan ada perubahan yang sangat cepat dalam

perspektif politik. Mantan sekutu pada waktu perang secara tiba-tiba menjadi saingan untuk memperebutkan kursi di parlemen dan sektor keamanan harus segera menyesuaikan diri dengan situasi baru (militer saat ini menyerahkan penanganan keamanan internal kepada polisi). Pada saat yang sama banyak mantan pejuang GAM berada di posisi yang tinggi dalam pemerintahan dan partai lokal ingin memenangkan kursi mayoritas legislatif. Fokus SPDA yang diarahkan pada level personal/individual dan kesadaran atau kemampuan mantan pejuang harus dikaitkan dengan tingkat sosio-politik institusional; dalam konteks ini peraturan-peraturan hukum yang ada memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses perdamaian secara keseluruhan. Di lingkungan yang sangat dinamis ini banyak kemungkinan untuk terjebak dalam transformasi konflik. Terutama beberapa eksponen senior GAM/KPA menunjukkan potensi yang cenderung menjadi *pengacau* (*spoilers*) apabila mereka tidak melihat sebuah keuntungan yang didapat atau kehilangan harapan dalam demokratisasi. Karena itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk mengontrol lingkungan secara sistematis dan mengambil aksi yang cepat dalam menanggapi perubahan dan tekanan dalam proyek.

Seiring dengan perubahan situasi, pendidikan politik juga harus mengalami perubahan. Apa yang menjadi fokus terhadap satu pihak dalam fase transformasi awal harus terbuka dan memperluas ruang lingkungannya. Untuk menjadi seorang aktor multi-partai dan platform yang mendukung proses perdamaian, SPDA perlu (sebagian sedang dalam proses) membuat beberapa penyesuaian struktural dan strategis. Pendidikan politik dan sejenis akademi politik memang sangat diperlukan, mengingat ujian sesungguhnya untuk sistem baru ini masih di depan. Tidak semua mantan pejuang dapat menyerap dan diserap dalam sistem politik. Namun demikian, yang terpilih harus menjalankan

perannya dan dalam hal ini juga harus didukung. Perlu diingat lagi bahwa tantangan dalam proses perdamaian harus segera dapat diatasi dan harus diakui bahwa transformasi yang dicapai saat ini masih jauh dari sempurna.

Situasi Politik dan Tantangan dalam mencapai perdamaian di Aceh

Pembentukan Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh (SPDA) dan aktivitas pelatihannya sangat terkait dengan usaha untuk mengimplementasikan MoU Helsinki serta memfasilitasi proses transformasi Aceh menjadi sebuah entitas yang damai dan demokrasi. SPDA telah melakukan usaha yang serius untuk berkontribusi dalam perubahan fundamental para mantan pejuang dengan pola pikir kemiliteran menjadi demokratis, melalui sejumlah pelatihan dasar dan menengah. Karena itu sangat dibutuhkan pemahaman terhadap situasi politik terkini di Aceh untuk dapat mengidentifikasi lebih dalam tantangan apa yang sedang dihadapi oleh SPDA di masa depan.

MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 telah membawa transformasi situasi politik di Aceh dari area konflik yang penuh dengan kekerasan menjadi area dimana demokrasi adalah satu-satunya 'aturan main' yang berlaku (the only game in town). Dalam MoU Helsinki telah disebutkan bahwa pemerintah Indonesia harus memfasilitasi pendirian partai lokal termasuk beberapa partai yang mewakili mantan pejuang GAM. Ini diharapkan agar pelaksanaan MoU Helsinki akan membawa pada pembentukan demokrasi yang bertahan lama dan perdamaian berkelanjutan di 'Beranda Mekah' Indonesia.

Progres telah terjadi dalam pembentukan partai politik. Enam partai lokal telah disetujui oleh komisi pemilihan dengan

kondisi yang telah memenuhi syarat untuk berkompetisi di pemilihan umum bersama 38 partai nasional. Namun demikian transisi menuju demokrasi dan perdamaian terbukti menghadapi berbagai tantangan- tantangan serius.

Banyak peneliti menggambarkan situasi politik di Aceh semakin memburuk bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu April 2009. Daripada membawa harapan akan stabilitas, pesta demokrasi rakyat telah meningkatkan ketegangan di antara politisi partai lokal dan menyebabkan kegelisahan diantara komunitas lokal. Intimidasi telah dilakukan sebagai strategi untuk memenangkan dukungan dari pemilih potensial. Banyak yang menyalahkan Partai Aceh (PA) sebagai aktor dibalik intimidasi. Namun demikian, Partai Aceh sendiri telah mengalami serentetan intimidasi dan karena itu mengklaim diri mereka sebagai korban akibat perilaku strategis partai lain. Penculikan beberapa pejabat partai dan pemboman beberapa kantor partai adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa partai tersebut menjadi sebuah target teror yang terorganisir. Pada awal Maret 2009, setidaknya empat aktivis Partai Aceh dilaporkan terbunuh dalam serentetan insiden. Namun investigasi polisi tidak dapat menemukan pelaku yang bertanggung jawab dalam kriminalitas politik ini. *Orang Tidak Dikenal/OTD*) atau *Kelompok Tidak Dikenal/KTD* telah menjadi frase yang terkenal untuk menyebut mereka yang bertanggung jawab akan segala kekacauan yang terjadi di Aceh.

Banyak peneliti mengklaim bahwa militer dan pemerintah pusat secara sengaja membuat kegemparan situasi politik dan bertanggung jawab terhadap naiknya tensi di Aceh. Salah satu alasan mengapa mereka dicurigai dibalik beberapa aksi kekerasan karena militer Indonesia dan pemerintah pusat masih berprasangka bahwa PA menyimpan agenda 'kemerdekaan' tersembunyi, yang akan diperjuangkan lagi secara terbuka, apabila partai tersebut

memenangkan pemilihan umum di Aceh (BeritaAntara, 23/02/09). Beberapa responden yakin bahwa personel militer sendiri yang memimpin intimidasi dalam melawan beberapa aktivis partai lokal. Responden juga yakin bahwa dalam beberapa kasus, milisi pro-Indonesia membuat teror baru dengan taktik lama di kalangan masyarakat agar mendapat dukungan dari militer Indonesia. Para milisi termasuk mantan kelompok pejuang GAM yang selama konflik menyerah kepada militer Indonesia dan sesudah itu mendukung perang melawan GAM.

Situasi politik dengan ketegangan yang tinggi tentu saja merupakan sebuah tantangan serius dalam proses perdamaian dan transformasi demokrasi yang sedang berjalan di Aceh. Sistem politik yang baru di Aceh dengan jelas menawarkan kesempatan kepada mantan pejuang untuk menjadi aktor politik baik dengan membentuk sebuah partai tunggal atau bergabung dengan partai lokal dan nasional. Banyak mantan pejuang yang telah tergabung dalam Partai Aceh, beberapa ada yang menjadi anggota Partai SIRA. Dapat dimengerti bahwa ini menyebabkan tensi diantara mantan pejuang dengan afiliasi politik baru yang berbeda. Rekonsiliasi dengan komunitas secara keseluruhan merupakan agenda penting dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian di Aceh. Sangat dibutuhkan pula rekonsiliasi mantan pejuang yang akan menjadi politisi dengan aparat keamanan (polisi dan pemimpin militer) juga dengan milisi pro- Indonesia dan mantan pejuang GAM. Membangun kepercayaan juga merupakan salah satu kunci tantangan dalam situasi terkini; sementara itu kecurigaan dan ketakutan di antara kelompok yang berbeda masih merupakan ancaman utama dalam proses perdamaian. Sekolah Perdamaian dan Demokrasi dapat berkontribusi dalam proses rekonsiliasi melalui penyelenggaraan pelatihan yang lebih terbuka untuk setiap segmen masyarakat politik.

Pendidikan Politik di Aceh

Terdapat beragam institusi nasional dan internasional yang telah menyelenggarakan pendidikan politik di Aceh. Di samping FES institusi nasional dan internasional tersebut diantaranya adalah IRI, DEMOS, OPIC, ALGAP dan UNDP. Liga Inong Aceh (LINA) merupakan satu contoh lembaga lokal yang aktif dalam mendampingi mantan pejuang GAM.

Dari Amerika Serikat, IRI - International Republican Institute dan NDI - National Democratic Institute telah merancang pelatihan untuk partai politik khususnya dalam persiapannya untuk mengikuti pemilihan umum. Kedua institusi tersebut juga pernah menyelenggarakan beberapa program dengan KPA.

DEMOS Jakarta - Centre for Democracy and Human Rights Studies adalah salah satu pendiri SPDA, tetapi kemudian lebih berkonsentrasi dalam kerjasama langsung dengan partai-partai politik seperti Partai Aceh atau Partai Rakyat Aceh.

Olof Palme International Centre – OPIC (Swedia) telah aktif sejak 2006. Institusi asing ini telah bekerja sama secara terbuka dengan GAM, khususnya KPA, setelah MoU Helsinki ditandatangani. Program utamanya adalah mendampingi SPDA, tetapi juga mendukung program pendidikan politik LINA dan LSM lokal lainnya.

Aceh Local Government Programme – ALGAP merupakan proyek yang ditangani oleh GTZ Jerman dengan biaya dari Uni Eropa. Proyek ini bertujuan untuk membantu para pemegang otoritas dan parlemen di daerah yang terkena efek Tsunami, khususnya supaya mereka dapat kembali menjalankan tugasnya dengan kapasitas penuh. Pejabat pemerintah dan anggota parlemen di seluruh daerah Aceh menjalani pelatihan untuk memberikan mereka keterampilan dan kompetensi yang mereka butuhkan

untuk memberikan pelayanan yang diminta. Proyek jangka panjang mereka adalah mempromosikan anggota parlemen, seperti perwakilan masyarakat yang terpilih, dan kerja sama mereka dengan perwakilan eksekutif yang otoritatif. Hingga saat ini, GTZ menyelenggarakan beberapa rangkaian pembelajaran – di lokasi pusat tetapi juga secara langsung di wilayah-wilayah yang kurang akses. ALGAP juga memberikan konsultasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

UNDP mendukung *the Aceh Government Transformation Programme* (AGTP) yang menjawab kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas pemerintah, dan untuk menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan sumber daya pemerintahan; serta menjamin aset yang telah disediakan oleh *the Agency for Rehabilitation and Reconstruction in Aceh* (BRR), yang telah dihapuskan secara bertahap pada April 2009. Melalui BRR UNDP juga mendukung proyek “Penguatan Kapasitas dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemulihan Komunitas di Aceh dan Nias” dan kampanye kesadaran publik yang membantu penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Di samping lembaga-lembaga internasional beberapa NGO lokal telah aktif dalam melakukan pendidikan politik. Sebagai contoh adalah LINA yang seperti SPDA juga melatih para mantan pejuang GAM.

LINA –*Liga Inong Aceh* memberikan pelatihan kepada wanita mengenai dasar HAM dan partisipasi politik. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan kesadaran politik agar dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pengarus-utamaan kehidupan politik, dan menjadi aktivis wanita yang terlibat dalam mendukung perdamaian di Aceh.

LINA awalnya merupakan sayap wanita GAM. Dalam pelaksanaan programnya, ditekankan bahwa 30% dari partisipan

pendidikan tersebut adalah mantan pejuang wanita (yang dipilih dari panglima wilayah). Presiden LINA adalah Shadia Marhaban, yang juga merupakan ketua departemen Kewanitaan Partai SIRA – yang dengan fakta tersebut membuat kerjasama LINA dengan kepemimpinan KPA menjadi bermasalah menjelang pemilihan umum di tahun 1999.

Struktur Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh

MoU Helsinki Agustus 2005 telah menetapkan bahwa perjuangan bersenjata berubah menjadi perjuangan melalui saluran politik formal. Setelah MoU Helsinki ditandatangani, KPA dibentuk untuk mengkoordinir mantan pejuang GAM di forum ‘*legitimate*’ ini. Pemimpin-pemimpin teratas GAM memang masih ada, tetapi tidak memiliki peran yang jelas lagi.²

Ketika SPDA memulai pelatihan pendidikan politik, SPDA bertujuan untuk menutup perbedaan pengetahuan tentang arena berpolitik di kalangan mantan pejuang GAM. Para aktor politik baru, yang sebagian besar mantan pejuang dan partai nasional Indonesia yang telah terbentuk, memiliki perbedaan latar belakang dan pengalaman sebagai aktor politik.

Saat FES memfasilitasi pembentukan SPDA ini, FES merupakan salah satu dari sedikit organisasi internasional yang berupa menjawab tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk mantan pejuang. Saat partai politik masih belum terbentuk, KPA harus dan merupakan salah satu partisipan pembentukan SPDA. Ketua KPA Muzzakhir Manaf bahkan memberikan pidato pembuka di *workshop* pembentukan SPDA. Partisipan lain yang terlibat adalah *Olof Palme Centre*,

2. Lihat :*Briefing* ICG No. 90, 23 Maret: “*Indonesia: Deep Distrust in Aceh as elections approach*”.

DEMOS, PPDA³ dan FES sebagai kelompok pendukung SPDA untuk menjamin konstituen yang luas dalam program-program SPDA ini. SPDA menggunakan struktur KPA yang ada dalam mengundang partisipan dari daerah-daerah dan desa-desa.

Sekolah tersebut melibatkan tiga negosiator GAM utama pada proses perundingan di Helsinki. Setelah pembentukan partai politik lokal, terdapat perpecahan dalam KPA. Pada bulan Agustus 2007, Partai Aceh (PA) dengan ambisi untuk mewakili masyarakat Aceh secara keseluruhan telah terbentuk, dan banyak anggota KPA mengambil peran dalam memimpin partai baru.

Pada bulan Desember 2007 – mantan aktivis mahasiswa dan gerakan referendum (SIRA) bersama dengan beberapa negosiator Helsinki membentuk partai SIRA (Partai Suara Independen Rakyat Aceh) mereka sendiri. Pembentukan ini mengejutkan aktivis-aktivis Partai Aceh Hal ini telah membuat banyak pandangan dan prasangka di kalangan pengurus KPA dan Partai Aceh, yang cenderung melihat SIRA sebagai *traitors* (pengkhianat) dalam kaukus masyarakat Aceh.

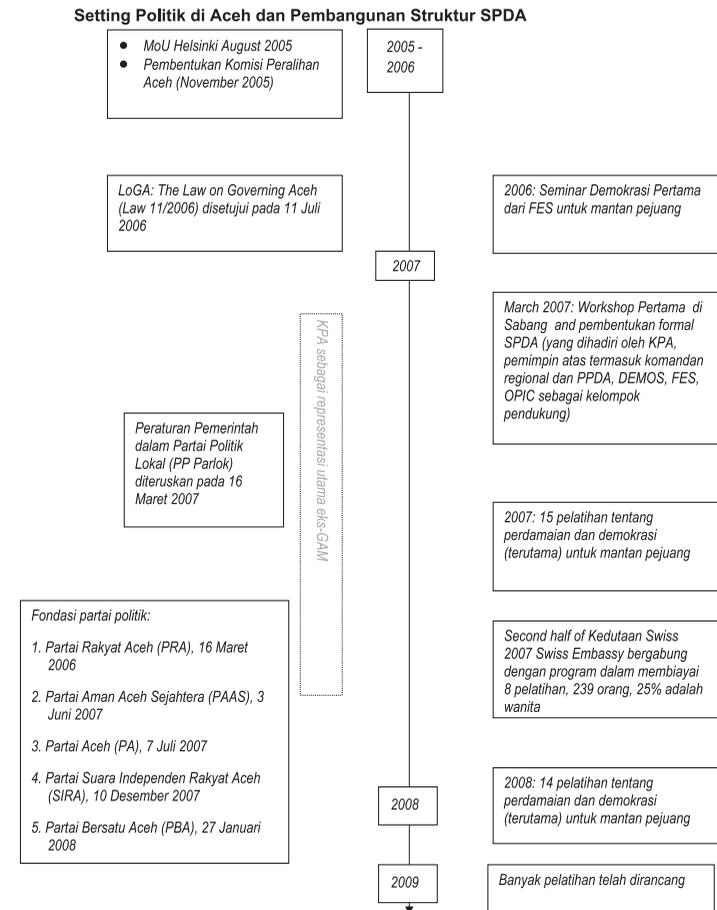
Konstelasi politik ini mempengaruhi kerja SPDA. Pengurus SPDA sebagian besar terdiri dari pengurus SIRA, tetapi di sisi lain bekerja dengan komandan regional KPA yang sebagian besar bergabung dengan Partai Aceh.

Namun yang menarik adalah, hingga saat ini tidak ada ketegangan di antara anggota muda Partai Aceh yang dilatih SPDA. Secara keseluruhan mereka telah mempelajari pluralisme dan menghargai pendapat yang berbeda- beda. Bisa dipahami kemudian bahwa pemimpin KPA pusat mulai mengkritisi

3. Sebuah LNGO yang dibentuk oleh Irwandi, Kamaruzzaman dan mantan petinggi GAM lainnya, yang saat ini tidak berfungsi lagi, tetapi masih ada. Sebagian anggota pendiri memiliki posisi tinggi dalam sistem nasional Indonesia (Iwandi saat ini adalah Gubernur Aceh, Kamaruzzaman adalah sekretaris BRR).

SPDA dan beberapa pelatihan yang diselenggarakannya karena keterlibatan aktif pengurus Partai SIRA di dalamnya.

Pada awal 2009, SPDA menyadari tantangan- tantangan ini dan sedang dalam proses untuk mengembangkan strategi baru, termasuk membuka diri bagi partisipan yang lebih luas; SPDA juga mulai membicarakan program advokasi, pelatihan untuk parlementer dan strategi komunikasi yang pro- aktif.



Kurikulum SPDA

Pada tahun 2007 dan 2008 SPDA menyelenggarakan total 20 Pelatihan Dasar dan 5 Pelatihan Tingkat Menengah serta 2 Pelatihan Fasilitator dan 2 Pelatihan untuk Pelatih (training for trainers) baik tingkat dasar maupun tingkat menengah.

Pelatihan tingkat dasar dan tingkat menengah memakan waktu masing-masing 4 hari. Terdapat 30 partisipan di masing-masing pelatihan yang umumnya dimulai siang hari di hari pertama. Program pelatihan dimulai dengan pengenalan tentang program setelah makan malam. Partisipan akan mengikuti pelatihan model workshop selama 3 hari penuh, termasuk diskusi kelompok. Program ditutup di sore hari pada hari terakhir.

Rata-rata staf dalam setiap program terdiri dari 2 hingga 3 orang dari SPDA, 1 atau 2 orang dari FES, 3 hingga 4 orang fasilitator dan moderator; ditambah 3 hingga 4 pelatih eksternal, biasanya akademisi lokal atau nasional tergantung topik spesifik dalam pelatihan tersebut.

Selama 3 hari program pelatihan setidaknya ada 7 topik berbeda yang diperkenalkan dan didiskusikan. Pendekatan ini dapat berguna untuk tujuan pengenalan dalam hal partisipan yang baru pertama kali menghadiri pelatihan semacam ini. Pelatihan mengkombinasikan ceramah oleh trainer dan partisipasi aktif peserta dalam diskusi-diskusi kelompok. Contohnya dalam sebuah pelatihan tingkat menengah pada bulan Oktober 2008 dengan tema “Membangun Kapasitas Berpolitik dan Demokrasi” satu topik adalah: “Bagaimana untuk membaca, menganalisa, dan memformulasikan anggaran”. Kerangka waktu adalah dua jam untuk pengenalan dan setengah jam untuk diskusi grup dan mempresentasikan hasil diskusi setiap grup. Ini mungkin masih belum mencukupi untuk memahami sebuah isu yang kompleks,

namun merupakan langkah awal yang nantinya perlu didalami oleh para peserta sendiri.

Metode workshop yang ditawarkan untuk pelatihan dasar terlihat tepat untuk para partisipan. Metode lain meliputi studi kasus, role plays, dan instrument lain dipandang tepat untuk pendidikan orang dewasa. Pendekatan semacam ini tentunya membutuhkan sistem pelatihan yang maju untuk fasilitator dan para pelatih.

Relevansi, Efisiensi dan Dampak SPDA

Relevansi

Untuk mentransformasi sebuah gerakan bersenjata menjadi sebuah gerakan politik merupakan hal yang sangat sulit. Semua orang yang telah diwawancarai mengemukakan relevansi dan pentingnya Proyek SPDA. Saat SPDA dibentuk pada bulan Maret 2007, sebagian besar partisipan merupakan kader KPA dari daerah-daerah, dengan Letnan Kepala KPA. Diantara partisipan pertama banyak mantan panglima wilayah GAM, yang nantinya menjadi koordinator wilayah yang akan menyeleksi partisipan dalam pelatihan SPDA berikutnya. Pada umumnya mantan pejuang yang pertama-tama akan diundang dalam pelatihan; dalam pelatihan berikutnya mantan pendukung GAM, keluarga mantan pejuang GAM, dan korban yang memenuhi syarat juga diundang dalam pelatihan SPDA. Di fase berikutnya, aktivitas NGO juga dilibatkan. Mayoritas partisipan adalah orang Aceh yang telah terlibat dalam satu perjuangan bersenjata atau bentuk perjuangan lain; mereka telah dipilih oleh panglima wilayah dan jaringan mereka.

Salah satu peserta menjelaskan bagaimana dia dan kawan-kawannya menghabiskan waktu bertahun-tahun di hutan dan karenanya belum siap untuk menjadi warga sipil biasa, apalagi

kemudian harus menjadi aktor politik demokratik: “saat kita turun dari lembah, kita hamper lupa bagaimana membaca dan menulis”.

Untuk belajar berargumentasi dan mengembangkan kemampuan mempengaruhi adalah tantangan terbesar bagi mereka. Memahami istilah- istilah teknis partai politik, tanggung jawab- tanggung jawab seorang anggota parlemen, mekanisme pemilihan, dan konsep HAM adalah satu modal penting untuk melanjutkan transformasi. Tetapi yang juga dibutuhkan adalah perubahan sikap dan cara pikir. Agar orang- orang ini dapat menjadi aktor politik, sangatlah penting untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kompetensi dalam bermusyawarah, kemampuan untuk berargumentasi, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain dan kesadaran terhadap dasar- dasar hak dan kewajiban seluruh aktor di arena berpolitik.

SPDA telah berupaya keras memberikan pengajaran tentang perdamaian dan demokrasi, tetapi sekaligus mampu membuktikan dirinya menjadi sebuah laboratorium dan tempat yang aman untuk mengekspresikan diri mereka dan mempraktikkan keterampilan baru.

Saat saya turun dari lembah, saya hampir lupa bagaimana cara membaca dan menulis. Setelah menjalani sedikit pelatihan saya dapat membaca dan menulis kembali. Saya menjadi pemimpin di wilayah dan desa saya. Manfaat yang saya peroleh dari pelatihan adalah untuk merubah cara dan pola berpikir saya. Sebagai seorang mantan pejuang saya selalu berpikir di area “bertahan dan kekerasan”. Setelah pelatihan pemikiran, saya mulai berkembang menjadi demokratis. SPDA mendukung perdamaian Aceh karena hal tersebut dapat menyalurkan aspirasi pemerintah dan masyarakat Aceh dalam arah demokrasi. SPDA memiliki arti politik bagi mantan pejuang. Dan kami mantan

pejuang merasakan banyak manfaat dari proyek tersebut, karena sebelumnya kami adalah partisipan yang cakap di arena berperang. Ketika kami tidak memiliki senjata di tangan kami, kami merasa seperti anak ayam tanpa induk semang, tanpa pengalaman. Dengan proyek SPDA kami memiliki alat yang tepat untuk menyalurkan aspirasi baru kami. Setelah saya bergabung dalam TOT dan menjadi fasilitator saya selalu diundang untuk memfasilitasi pertemuan- pertemuan KPA di desa saya. Saya juga memulai organisasi pemuda di daerah saya dan saat ini saya sedang memfasilitasi pertemuan komunitas di mesjid lokal. Akhirnya masyarakat bahkan mendukung saya sebagai salah satu kandidat parlementer untuk dewan legislatif Bener Meria. Terima kasih kepada anda semua yang telah mendukung kami. Joni Suryawan.

SPDA telah membuktikan kemampuannya dalam aspek- aspek tersebut. Dengan sangat jelas SPDA telah memberdayakan mantan pejuang untuk mempertimbangkan aspirasi baru. Para mantan pejuang, yang dilatih oleh SPDA, saat ini memainkan peran aktif dalam politik lokal, seperti yang dapat dilihat dari jumlah mantan pejuang yang menjadi partisipan untuk kursi legislatif (86) dan jumlah kader partai (Partai Aceh = 154). Pernyataan mantan partisipan dengan sangat jelas mengindikasikan bahwa cara pandang dan pola pikir mereka telah berubah dan kepercayaan diri mereka sebagai aktor politik telah meningkat. Pernyataan lain adalah termasuk kemampuan mereka untuk mengajarkan tentang perdamaian, kemampuan mereka untuk menjembatani dan sebagai fasilitator dalam dialog, dan pengetahuan mereka mengenai proses demokrasi. Disebutkan juga kapabilitas mereka untuk memiliki pikiran yang terbuka dengan memahami bagaimana negara lain dapat mengatasi konflik lokal dan strategi politik negara- negara lain dalam menangani kekerasan yang pernah dihadapinya. Mempelajari aspek teknis demokrasi juga

terbukti sangat mencerahkan para partisipan.

“Sebelum mengikuti pelatihan, saya berpikir setiap hal diputuskan oleh Gubernur. Sekarang saya mengetahui hak dan tanggung jawab masyarakat”.

“Sekarang saya menyadari apa itu anggaran dan ada hak untuk menjaga dan mengawasinya”.

Proses perdamaian di Aceh bisa dinilai sebagai sebuah cerita sukses. Pada saat yang sama, beberapa analis politik juga mengemukakan kekurangan yang masih harus ditangani dan sejumlah hal yang tidak diharapkan terjadi. Pada periode sebelum pemilihan umum ketegangan menjadi tinggi dan sejumlah insiden kekerasan telah mengacaukan banyak masyarakat Aceh. Namun demikian sebagian besar aktor tetap optimis.

Beberapa penelitian⁴ mengemukakan sejumlah tantangan-tantangan kunci. Salah satu poin penting adalah kesempatan yang hilang dalam reformasi demokrasi dalam politik dan administrasi lokal. Aturan dan regulasi yang jelas, serta kapasitas administratif yang meningkat masih belum cukup. Setelah banyaknya pendampingan internasional pasca Tsunami, sebagian besar pendonor saat ini telah meninggalkan propinsi Aceh dan apa yang menjadi penyebab utama konflik – keluhan ekonomi – masih belum ditindaklanjuti dengan langkah rekonstruksi dan rehabilitasi.

Ruang demokrasi sosial telah muncul selama tiga tahun belakangan. Namun yang sebenarnya ditakutkan adalah munculnya perampok bergaya lama (*old-style rapacious*) dan bapakism atau perilaku patron-klient. Peran mereka dalam politik baru sangat strategis karena akan menjadi agen perubahan dalam badan pembuat undang-undang yang baru terpilih dan badan

eksekutif; namun mereka akan bekerjasama keras dibawah tekanan berat untuk tunduk pada politik personal dan favoritisme. Meskipun pemimpin yang baru terpilih akan menjadi perwakilan demokratis yang *legitimate*, otoritas mereka mendapat tantangan oleh pemikiran “rantai pimpinan” lama dan sistem perlindungan gaya Indonesia.

Lagipula, peran sektor keamanan masih dipertanyakan. Militer telah berusaha untuk mendapatkan kembali kontrol teritorial dan polisi terlihat masih lemah; organisasi sektor keamanan tentunya menjadi aktor kunci untuk masa depan Aceh.

Tantangan dalam transformasi GAM menjadi sebuah gerakan politik dapat menjadi sangat sulit apabila mantan elit GAM melihat tidak adanya keuntungan yang diperoleh dari sistem demokrasi baru. Dalam situasi ini mereka bahkan dapat mulai mengganggu proses perdamaian. Pada saat yang sama, dukungan massa yang telah mengakar pada saat perang terjadi, dapat berubah menjadi dukungan bagi gerakan penghambat perubahan yang besar. Situasi ini akan melahirkan kevakuman yang dapat diisi oleh kelompok kepentingan baru yang oportunistis dari yang berorientasi bisnis hingga politisi nasional; gerakan ini dapat membelah mantan eksponen GAM menjadi pebisnis; kelompok religius dapat pula melaksanakan agenda Islam konservatif mereka.

Tantangan bagi pemimpin partai dan parlemen yang baru terpilih menjadi beragam. Banyak kesulitan telah menanti aktor-aktor demokratis baru. Kemampuan seluruh anggota parlemen yang baru terpilih tentunya harus ditingkatkan, sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka dalam koridor demokrasi.

SPDA sejauh ini telah menghubungkan tradisi masyarakat Aceh dan keterampilan berdemokrasi dengan cukup cerdas. Bagaimanapun juga, dalam konteks prasangka orang Indonesia

4. oleh Demos

yang nasionalis, dan terkait dengan berbagai batu kerikil yang menghadang, akan sangat penting untuk menterjemahkan kearifan historis masyarakat Aceh menjadi prosedur demokrasi dan perilaku aktual di kehidupan politik sehari-hari.

Hanya sedikit jumlah organisasi yang menyediakan pendidikan politik untuk mantan pejuang dan tidak satupun dari mereka yang melakukan se-sistematis SPDA. SPDA telah merangkul lebih dari 800 orang untuk berkumpul bersama; SPDA juga mengembangkan pusat pendataan untuk dapat melacak jejak alumninya. Pusat jaringan dan dukungan SPDA yang telah dibangun selama ini cukup kuat, di beberapa wilayah – dimana mantan panglima wilayah menjadi pelatih SPDA, fasilitator dan kandidat legislatif – bahkan sangat kuat.

Efektivitas

Pada fase pertama SPDA, tujuannya adalah membangun sebuah platform institusional, untuk menyediakan pendidikan politik bagi demokrasi dan perdamaian, untuk anggota partai politik dan masyarakat lainnya yang tertarik di Propinsi Aceh (dengan fokus sementara kepada mantan pejuang dan anggota partai politik lokal). SPDA sukses didirikan sebagai sekolah perdamaian dan demokrasi dan menyediakan 15 pelatihan untuk 463 partisipan di tahun 2007, dan 14 pelatihan untuk 413 partisipan di tahun 2008. Sejauh ini, partisipan sebagian besar mantan pejuang dan orang-orang terdekat GAM. Partai politik selain PA dan beberapa eksponen SIRA sejauh ini telah banyak menikmati manfaat dari pelatihan yang diselenggarakan SPDA ini. Hal tersebut juga terjadi pada *civil society organizations*. Komite dan pengurus SPDA menyadari adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan partisipan.

Berdasarkan evaluasi, partisipan- partisipan SPDA yang telah menyelesaikan pelatihan dasar dan tingkat menengah memahami pentingnya demokrasi dan persyaratan resmi dan organisasional bagi partai politik serta kampanye dan proses pemilihan. Mereka juga terlihat lebih terbuka dalam dialog dengan komunitas mereka dan memahami dasar dari resolusi konflik tanpa kekerasan. Secara umum para pelatih saat ini jauh lebih terbekali untuk berinteraksi dengan komunitas mereka, dapat menerima pandangan orang yang beraneka pikiran. Mereka juga tidak dengan gampang terprovokasi oleh intrik politik lagi.

Seberapa besar kontribusi SPDA terhadap perdamaian dan demokrasi di Aceh merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Menurut 5 kriteria efektivitas yang dikembangkan oleh CDA dalam Merefleksikan Program Praktik Perdamaian⁵, dapat dikatakan sebagai berikut: Program tersebut telah menunjukkan kepada masyarakat, isu- isu, dan dinamika yang menjadi kunci terjadinya konflik ketika program pelatihan demokrasi mulai dilaksanakan. Hal tersebut berkontribusi pada perdamaian dengan memperkenalkan cara berinteraksi baru dan tidak mengandung unsur kekerasan. Memfasilitasi SPDA sebagai organisasi independen dengan pengurus lokal, memungkinkan tim manajemen dan dewan untuk mengembangkan rasa memiliki SPDA dan program-program pelatihannya. Sejak permulaan pelatihan, sebuah impresi terhadap komitmen dari staf untuk berkolaborasi satu sama lain telah bertumbuh. Bagaimanapun juga, karena keadaan (politik), SPDA memang masih belum bisa menjadi tempat yang aman untuk berinteraksi antara kelompok/ aktor yang berbeda dan melibatkan lebih banyak orang. Apakah sebuah lembaga baru dapat segera mengatasi pendorong aktual konflik (seperti perbedaan, ketidakadilan, dan keluhan-keluhan yang menyulut konflik) adalah salah satu kriteria untuk melihat efektivitas.

5. RPP Criteria of Effectiveness: see Attachment Nr. 4

Meskipun demikian, analisis efektivitas juga menuntut analisis konflik yang berkelanjutan. Memberikan dukungan kepada institusi yang menjadi pendorong perdamaian ini, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perdamaian. SPDA sejauh ini berkonsentrasi kepada sikap dan perilaku, dimana ini adalah pendekatan yang tepat untuk memulai dan masih sangat relevan. Tetapi untuk menghubungkan aktivitas awal dengan institusi yang signifikan akan meningkatkan efektivitas pelatihan politik memang perlu diuji lebih lanjut. Parlemen adalah lembaga perwakilan yang berpotensi untuk mentransformasikan kekuatan yang dapat menghancurkan proses perdamaian (pertanyaannya kemudian adalah, apakah parlemen memainkan peran penting dalam mengatasi faktor pendorong hal-hal negatif, atau jika ada institusi lain yang jauh lebih signifikan). Kriteria penting lainnya adalah faktor ketahanan terhadap kekerasan. Para partisipan telah mengakui bahwa mereka saat ini jauh lebih terbekali untuk menolak provokasi.

“Setelah pelatihan saya dapat menerima pandangan orang lain, meskipun mereka adalah militer dan arogan. Saya juga tidak mudah diprovokasi oleh intrik- intrik politik.”

Lagi, kader KPA yang lebih rendah pangkatnya merupakan aktor penting dalam konflik ini. Pada akhirnya, mereka melihat masalah keamanan bukanlah merupakan ruang lingkup utama program pelatihan demokrasi; sementara mereka mengakui pula bagi SPDA juga tidak mudah untuk menangani isu keamanan dalam pelatihan-pelatihannya.

Efisiensi

Analisis awal di lapangan telah mengungkap aktor kunci dan membawa pendidikan politik untuk mantan pejuang GAM.

Hal ini merupakan kontribusi penting bagi proses perdamaian dan koheren dalam tingkat kelompok yang menjadi sasaran utama, komite, dan isi pelatihan. Sejak SPDA di bentuk, para pengurus bekerja sama secara langsung lewat pemimpin KPA regional. Beberapa kader teratas dalam KPA mengkritisi bahwa dengan tidak bekerja sama langsung dengan kepemimpinan KPA pusat maka ‘rantai komando’ telah hancur. Beberapa figur pemimpin KPA mulai mengintervensi pelatihan, dengan memberi tahu partisipan bahwa KPA tidak mengesahkan pemimpin regional yang diundang; para peserta pelatihan juga diminta untuk tidak lagi berhubungan dengan SPDA. Kebanyakan kesulitan ini dapat diatasi dengan melibatkan Panglima Wilayah KPA Muzzakir Manaf, yang dengan terlihat suportif terhadap pelatihan-pelatihan demokrasi.

Bagaimanapun juga, kesulitan berkomunikasi ini telah menjadi sistemik dan adanya kebutuhan untuk menjalin hubungan yang baik atau setidaknya garis komunikasi dengan kader teratas KPA. Sangat tipikal⁶, SPDA lupa menganalisa secara sistematis konteks yang berubah dan untuk segera mengambil langkah konkrit untuk menyesuaikan situasi baru (*Do Ho Harm and Conflict Analysis* yang tidak sulit dipahami akan sangat bermanfaat bagi SPDA untuk mempersiapkan langkah strategis dalam penyesuaian baru ini). Seperti yang disebutkan sebelumnya, lingkungan sekitar sangat berubah-ubah⁷ dan apa yang diharapkan tentang dewan perwakilan dan keanggotaan yang seimbang ketika pelatihan demokrasi dimulai ternyata terlihat cukup berbeda seiring dengan perubahan konstelasi politik.

6. Staf SPDA menyadari bahwa beberapa stakeholders tiba-tiba menjadi rakus akan proyek. Tipikal dalam hal tersebut adalah fakta, bahwa banyak proyek dalam konteks konflik tidak beroperasi secara strategis dalam hal memimpin analisis yang sistematis dan bertindak sesuai dengan keadaan yang berubah.

7. Lihat: ICG Briefing No. 90, 23 Maret: “Indonesia: Deep Distrust in Aceh as elections approach”.

Tantangan sulit bagi SPDA adalah bertahannya tradisi birokrasi, cara berpikir ‘rantai komando’ dan rivalitas politik sehingga sangat sulit bagi kader-kader dalam KPA untuk menerima SPDA sebagai partner yang sejajar atau bahkan tempat untuk mempelajari sesuatu. Pada saat yang sama, pengalaman baru dan cara pikir mendunia dari mantan pelatih SPDA telah berkontribusi dalam mempertanyakan struktur hierarki lama. Staf SPDA, bagaimanapun juga, harus menjaga tali komunikasi dengan kader KPA.

Secara umum, pelatihan demokrasi melalui SPDA telah terlaksana dengan baik dengan memilih keanggotaan yang seimbang sedari awal, tetapi juga harus menyesuaikan kegiatan-kegiatan pelatihan dengan situasi politik terbaru.

Dampak

Ketika SPDA mulai mendukung proses perdamaian, SPDA dengan berani menargetkan tidak hanya konstituen tipikal proses perdamaian (yang mudah diraih: wanita dan anak-anak) namun juga aktor-aktor yang lebih sulit, yang semula membawa senjata. Oleh karena pengetahuan yang tidak seimbang di antara peserta, pelatihan demokrasi memutuskan untuk bekerja pertama hanya dalam satu aspek. Dalam fase pertama, focus untuk mendukung mantan pejuang GAM ini merupakan strategi yang legitimate. Seiring dengan berjalannya proses perdamaian, fokus ini menjadi semacam beban bagi SPDA dan membahayakan reputasi SPDA. Loncatan politik telah berubah cukup substansial dengan Irwandi dan Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur; perubahan substansial juga terjadi dengan penyelenggaraan pemilihan parlemen lokal. Padahal mantan elit GAM awalnya termarginalisasi secara politik di tahun 2006, mereka memiliki harapan besar untuk memenangkan mayoritas kursi di DPRA dan DPR Kabupaten

dan Kota di tahun 2009. Persaingan yang terjadi antara partai-partai lokal, antara partai lokal dan nasional, dan bahkan antar partai telah menjadi salah satu sumber ketegangan yang sengit. Ini harus sangat dicermati. Beberapa orang menyatakan bahwa ada semacam revolusi yang berjalan dalam Partai Aceh; pemimpin-pemimpin muda saat ini berani berbicara dan melakukan aksi-aksi politik di lapangan secara berbeda.

Tetapi aspirasi mantan pejuang tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan aspirasi politik dan masalah pembangunan ekonomi yang masih belum terselesaikan. Sebaliknya, hal itu akan diukir dengan penarikan bantuan internasional pasca Tsunami. Di permulaan pelatihan, mantan pejuang sebenarnya merupakan aktor kunci dalam hubungannya dengan konflik. Maka pelatihan demokrasi ditujukan untuk membangun kapasitas mereka dan mengubah pola pikir mereka. Di tahun 2009 tidak legitimate untuk menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan satu-satunya program yang ditujukan pada kelompok ini lagi⁸. Relevansi mereka sebagai aktor yang berhubungan dengan konflik telah berubah dan aktor-aktor lain yang menjadi kunci dalam konflik harus dipertimbangkan.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, peran kekuatan militer telah meningkat dan polisi sebagai salah satu aktor kunci dalam menjaga keamanan masih belum mendapat dukungan yang mencukupi. Kurangnya rasa percaya di antara masyarakat dan aparat keamanan masih menjadi salah satu hal yang membahayakan perdamaian di Aceh.

Karena itu program SPDA dapat mengambil peran tertentu dalam meningkatkan kepercayaan antara aktor-aktor utama dalam konflik. Dengan membuka lingkup partisipan, secara meningkat

8. Diakui oleh SPDA

pelatihan dapat menjadi tempat bagi mantan pejuang dan aparat keamanan – yaitu polisi – untuk bertemu dan membangun rasa saling percaya. Dengan adanya komandan polisi baru per daerah, hal ini dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk membangun tali komunikasi baru dengan polisi.

Fokus dalam mengubah sikap dan membangun kapasitas secara cepat dalam waktu pasca MoU Helsinki, tentunya merupakan aktivitas penting untuk memulai. Seiring dengan perubahan waktu, akan menjadi penting untuk tidak hanya bekerja dalam keterampilan dan sikap individu, tetapi juga berpikir tentang perubahan institusional. Dengan bekerja dengan parlementer terpilih, pelatihan dapat memperluas ruang lingkupnya dan menghubungkan aktivitas sebelumnya dengan dukungan tidak langsung kepada institusi⁹, yang merupakan sebuah langkah dalam arah yang tepat. Yang terakhir anggota parlemen harus memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian dengan penyatuan kepentingan masyarakat dengan menilai anggaran dan secara ideal mengambil peran konstruktif dalam merumuskan peraturan-peraturan daerah.

Mempertimbangkan pendekatan yang beraneka ragam kepada FES di Aceh, seharusnya ada cara untuk menghubungkan ikatan SPDA dengan aktivitas-aktivitas lain. Mengapa tidak dikembangkan beberapa fokus pelatihan-pelatihan yang terkait satu sama lain di antara pelatihan demokrasi dan pelatihan bagi perserikatan buruh? Parlemen di masa depan serta mantan pejuang dapat memperoleh keuntungan dalam melihat lebih mendalam terhadap pertanyaan legal yang spesifik mengenai undang-undang tenaga kerja dan dengan mengetahui aktivis perserikatan buruh.

9. Lagi pertanyaan penting disini adalah: seberapa pentingnya parlemen sebagai sebuah institusi yang mengalami faktor pendorong utama konflik atau sumber utama tension? Apakah ada institusi lain yang harus dipertimbangkan?

Pada saat yang sama perserikatan buruh akan diuntungkan dengan tersedianya akses dan komunikasi dengan anggota partai dan politisi yang baru dilatih dan pemimpin-pemimpin lokal. Hal yang sama juga diperuntukkan bagi kelompok pemuda dan partai lain seperti PRA dan aktivis LSM dan media. Hal serupa partner organisasi lain dapat menspesialisasikan pengetahuan terkait dengan legislasi di masa depan, yang dapat membantu merumuskan kebijakan atau mendukung komunitas pemimpin dalam memformulasikan aspirasi atau kepentingan masyarakat.

Dengan menghubungkan perubahan sikap mantan pejuang dengan mempengaruhi bidang institusional, pencapaian SPDA dapat disebar dan dampak SPDA dapat menjadi lebih luas dan lebih berkelanjutan.

Akhirnya menyangkut feasibilitas, strateginya adalah menjaga pendekatan *low profile*. Melakukan penyesuaian terhadap situasi dan gentingnya dinamika politik tentunya menjadi strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Tetapi gaya *low profile* harus berjalan dengan transparansi. Dalam kasus SPDA ini akan muncul banyak spekulasi dan gosip mengenai latar belakang institusional lembaga pendidikan ini; spekulasi ini dapat memunculkan persepsi yang tidak jelas dan kadang-kadang tidak sepenuhnya tidak terkait sama sekali dengan pelatihan demokrasi. Dengan orientasi strategi yang baru, feasibilitas dan sebuah cara berkomunikasi yang lebih pro-aktif akan mempertahankan kesan baik dari lembaga pelatihan demokrasi seperti SPDA.

Isu Gender

SPDA memiliki sebuah kebijakan yang jelas bahwa setidaknya ada 30% peserta wanita dalam pelatihan. Ini tentu saja merupakan tantangan untuk mampu merealisasikan target 30%.

Meskipun demikian proyek telah sukses melatih 30,75% wanita di tahun 2008 dan 27% di tahun 2007.

Ada sedikit ketegangan yang terjadi ketika jumlah peserta wanita meningkat. Bagaimanapun juga, melibatkan wanita dalam pelatihan tidaklah mudah. Satu hal yang harus dipertimbangkan adalah sejumlah tugas para wanita. Ketika pria berpindah-pindah, mobilitas adalah masalah serius bagi wanita. Mereka biasanya tidak bepergian untuk urusan mereka pribadi dan mereka harus menjaga anak-anak mereka. Wanita juga sering harus menjaga saudara-saudara mereka. Lagipula, sumber daya untuk wanita masih sangat terbatas.

Untuk memperkuat kapasitas wanita sangat penting untuk memberi perhatian kepada peran mereka di keluarga sebagai unit kunci.

Karena itu harus berhati-hati untuk menaksir kebutuhan wanita dan memfasilitasi kondisi yang memperbolehkan mereka berpartisipasi di pelatihan. Memasang kuota adalah maksud yang baik untuk memunculkan kesadaran akan adanya isu gender diantara *stakeholders*. Bagaimana pun juga kuota saja tidak cukup untuk memfasilitasi partisipasi wanita dalam pelatihan, membagi pengalaman-pengalaman mereka dan mengekspresikan ide-ide mereka. Lagipula, peran mereka sebagai ibu, harus dipertimbangkan dan diperhitungkan pekerjaan rumah, dan tugas mereka sebagai pengatur rumah tangga dan mobilitas mereka yang terbatas dalam merancang aktivitas proyek.

Pendidikan Politik adalah Hak

Pada dasarnya para peserta pelatihan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini melihat peran yang jelas dari SPDA dalam proses transformasi. Dengan menyelesaikan sikap

dan *soft skills*, dikombinasikan dengan aspek teknis demokrasi, SPDA telah memberikan kontribusi nyata dan krusial dalam proses perdamaian. Lembaga ini juga memberi kontribusi penting bagi proses reintegrasi, sekalipun ini seringkali tidak diakui. Dengan memberikan sebuah peran baru dan *soft skills* kepada mantan pejuang, pandangan mereka ke masa depan telah berubah secara signifikan. Sekarang mereka mempercayakan pemilihan pemimpin Propinsi Aceh dengan mekanisme demokrasi termasuk dengan peran penting dari partai-partai politik baru.

Sejarah lokal masyarakat Aceh, kearifan lokal, dan tradisi lokal merupakan topik-topik yang sangat penting bagi SPDA. Pelatihan-pelatihan harus mempertimbangkan dengan hati-hati, bagaimana menjamin, bahwa isu-isu ini tetap positif dan memiliki daya konstruktif dalam proses perdamaian.

Menjaga tali komunikasi dengan aktor-aktor struktural lama seperti kepemimpinan KPA barangkali menjadi sulit. Namun bila berhasil diatasi, ketegangan situasi dapat berkurang secara signifikan. Tetapi tantangan untuk merevisi dewan pengurus menjadi lebih inklusif harus diagendakan. Juga aktor-aktor lain seperti aparat polisi dan mungkin militer harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mencari peluang dalam menjalin tali komunikasi dengan aparat keamanan. Mereka bahkan harus diundang dalam beberapa acara khusus tertentu¹⁰.

Tantangan lain yang ada adalah menempatkan posisi SPDA dalam konstelasi politik local baru: apakah SPDA akan menjadi “sebuah *think thank* Partai Aceh”, atau “bagian SIRA” atau “perpanjangan KPA”. Jawabannya tentu saja tergantung pada perspektif para pengelola SPDA. Saat pelatihan demokrasi baru dimulai, SPDA telah menjaga sifat low profile-nya. Bagaimanapun

¹⁰ Pelatihan SPDA yang melibatkan fasilitator dari luar Aceh dapat memberikan kesempatan untuk mengundang aparat kepolisian untuk berpartisipasi.

juga situasi telah berubah dan sebuah strategi yang lebih pro aktif akan berkontribusi dalam pembentukan sebuah citra baru yang jelas bagi SPDA.

Pengurus SPDA dan fasilitator sadar akan banyaknya tantangan dan telah memutuskan bahwa pelatihan demokrasi harus diperluas dan terbuka untuk partisipasi yang lebih luas. Strategi baru ini memperbolehkan partisipan dari semua kalangan untuk mengikuti pelatihan dan menghilangkan kriteria lama 'mantan pejuang' secara keseluruhan.

Proses transformasi GAM menjadi seorang aktor politik jelas masih belum selesai secara keseluruhan dan ujian yang sebenarnya untuk sistem baru masih menanti. Berlomba- lomba untuk meraih kursi dan menjadi anggota partai adalah langkah pertama untuk seorang aktor politik baru. Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah dan pemimpin baru Aceh. *Legislator* yang terpilih berada dibawah tekanan yang besar dalam kinerjanya, tetapi bidang pengaruh mereka sebenarnya cukup terbatas. Mengetahui hak untuk mengawasi anggaran adalah satu hal, tetapi kemampuan mereka untuk secara kompeten membaca anggaran adalah tugas yang cukup sulit. Berkaitan dengan itu adalah kebingungan yang sudah lazim di Indonesia mengenai *checks and balances*, karena konsep *checking and balancing* kekuatan dan peran masing- masing cabang vis à vis lainnya masih belum cukup jelas untuk semua aktor. Sejauh ini sistem politik seringkali lebih melindungi kepentingan kelompok-kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

*Eiplog: Seulawah
di Ujung Barat Republik*



Seulawah Republik

Dari Seulawah pertama hingga ketiga

Tanggal 16 Juni 1948, bertempat di hotel Kutaraja Banda Aceh berhasil terkumpul 20 kg emas untuk republik, emas inilah yang kemudian digunakan pemerintah Indonesia untuk membeli pesawat Dakota yang merupakan pesawat angkut pertama milik Indonesia, yang kemudian oleh Soekarno diberi nama Seulawah yang dalam bahasa Aceh berarti gunung emas. Tahun berikutnya, atas inisiatif dari Teungku Daud Beureueh, rakyat Aceh mengumpulkan sumbangan berupa uang untuk pemerintah Republik Indonesia, US\$ 250.000 untuk Tentara Nasional Indonesia, US\$ 50.000 untuk membangun kantor pemerintahan Republik Indonesia, US\$ 100.000 untuk keperluan memindahkan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta dan US\$ 100.000 untuk biaya operasional pejabat pemerintah Republik Indonesia. Inilah periode pertama hadiah rakyat Aceh untuk republik.

Tahun 2005, Seulawah kedua kembali dihadiahkan oleh rakyat Aceh, setelah perang berkepanjangan, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Republik Indonesia bersama Gerakan Aceh Merdeka menandatangani sebuah piagam perdamaian di Helsinki. MoU ini bukan saja menghentikan pertikaian antara Republik dengan Aceh, namun perdamaian ini sekaligus merubah citra Indonesia di mata internasional. Belum pernah kita melihat apresiasi internasional yang begitu tinggi, citra Indonesia sebagai negara dengan angka pelanggaran HAM yang tinggi menjadi berubah, SBY-JK sempat masuk dalam kandidat peraih nobel perdamaian dan sejak itu Indonesia kembali diterima dan terlibat aktif dalam pergaulan internasional dan berbagai upaya menciptakan perdamaian dunia. Di level internasional perdamaian di Aceh menjadi salah satu referensi penting dalam penyelesaian konflik di belahan dunia yang lain. Di tingkatan nasional, Aceh menjadi model perubahan, terutama berkaitan dengan relasi kekuasaan dan ekonomi antara pusat dan daerah yang dituangkan melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Tahun berikutnya, pilkada langsung digelar di Aceh, pilkada berlangsung damai dan aman, pasangan Irwandi Yusuf seorang mantan tokoh GAM dan Nazar seorang aktivis SIRA terpilih menjadi gubernur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah republik, pasangan calon independen bisa bertarung dan menang dalam pemilihan umum. Momentum ini tidak diragukan lagi menjadi preseden positif dalam tradisi berdemokrasi di Indonesia, sehingga pada tahun 2008, calon independen resmi diperkenankan bertarung dalam pilkada di seluruh Indonesia. Pelajaran yang berharga ini merupakan periode ketiga sumbangan Seulawah dari rakyat Aceh untuk republik.

Seulawah Keempat

Dalam MoU Helsinki disebutkan, bahwa keberadaan partai politik lokal diperkenankan dalam Pemilu di Aceh. Enam partai

lokal dinyatakan berhak ikut dalam pemilu 2009. Kembali, untuk pertama kali dalam tradisi politik republik, sebuah model berpolitik yang yang baru ditawarkan. Peluang kemenangan partai lokal sangat besar, namun disisi lain partai lokal dituntut untuk menampilkan performa terbaiknya dihadapan publik. Yang menarik tentu, bahwa momentum ini adalah peringatan berharga kepada partai nasional untuk mulai berbenah diri, pola-pola kekuasaan partai yang berpusat di Jakarta dan jauh dari representasi kepentingan daerah akan mengalami koreksi. Suka tidak suka, partai nasional harus melakukan akomodasi dan memberikan porsi yang besar bagi kepentingan masyarakat di daerah, jika tidak mereka akan ditelan oleh masa transisi.

Politik masa transisi selalu menghadirkan kecemasan-kecemasan sekaligus harapan-harapan baru. Antusias politik rakyat Aceh sangat tinggi, berbagai pihak menunggu sejauhmana keberadaan partai lokal bisa menjadi model alternatif bagi berbagai kebuntuan politik sentralistik selama ini. Keberadaan partai lokal bukan hanya sekedar menjadi "basa-basi politik" pusat terhadap Aceh, tapi lebih jauh diharapkan bisa menjadi referensi penting dalam merumuskan model demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Keberadaan partai lokal tentu semakin mendekatkan partai politik terhadap konstituennya, sehingga akses penyerapan aspirasi, pertanggungjawaban partai terhadap publik, representasi calon yang dikenal baik oleh masyarakat akan semakin mudah dilakukan. Sehingga tidak dimungkinkan sebuah partai politik bertarung dalam pemilu tanpa program politik dan ideologi yang jelas. Inilah yang diharapkan dan ditunggu-tunggu akan menjadi Seulawah keempat dari rakyat Aceh.

Menjaga Seulawah

Menjelang pemilu 2009, suhu politik nasional sudah mulai meningkat, meski suara pemilih di Aceh tidak signifikan, namun

Aceh tetaplah memiliki Seulawah yang bisa dicuri oleh siapapun. Aceh tetap menjadi issue yang sexy untuk dijadikan komoditas politik. Bagi kelompok nasionalis Aceh tetap harus dicurigai akan memisahkan diri dari republik, apalagi jika partai lokal memenangkan pemilu. Bagi kelompok politik Islam, Aceh adalah kantong suara yang harus direbut dan dijadikan model penerapan syariat Islam, sehingga issue Palestina kemudian dijadikan sebagai ajang konsolidasi politik. Bagi kelompok demokrat Aceh adalah sensitifitas politik sekaligus aset, salah bersikap terhadap Aceh bisa mengundang pukulan politik, bisa dituduh tidak nasionalis, pro-GAM, dan juga antek asing.

Berbagai tarik menarik politik di Jakarta membawa pengaruh di Aceh, angka kriminal berbau politik meningkat, intimidasi terhadap partai lokal, ketegangan antara partai lokal dengan partai nasional, atau antara partai lokal dengan partai lokal semakin sering terjadi. Sementara itu berbagai operasi keamanan mulai digelar, namun aroma politik tak bisa dihindari. Ketegangan politik ini kembali mengingatkan luka lama akan konflik, militer mulai memberikan pernyataan politik di media massa, polisi merasa tidak cukup percaya diri menjaga keamanan, pemerintah propinsi merasa kehilangan kontrol atas kondisi keamanan. Aceh memasuki fase ketidakpastian, partai lokal terjepit antara upaya memenangkan pemilu disatu sisi, dan tuduhan sebagai upaya separatisme di sisi lain.

Menjelang pemilu 2009 tentu aroma kontestasi politik semakin menyengat, disemua daerah di Indonesia sebenarnya mengalami hal serupa, namun Aceh selalu menjadi daerah istimewa, ketika masyarakat Makassar, Surabaya, Medan boleh mengusung issue putra daerah dalam pilkada, Aceh tidak semudah itu. Orang Aceh memimpin Aceh bisa dimaknai sebagai ancaman keamanan dan disintegrasikan. Sama halnya ketika partai lokal diamini untuk

bertarung dalam Pemilu 2009 di Aceh, maka kemenangan partai lokal dianggap sebagai awal peluang lepasnya Aceh dari pangkuan Republik. Untuk hal seperti itu banyak pihak yang merasa penting untuk merepotkan diri meredam peluang dominasi partai lokal, berbagai argumentasi berbasis nasionalisme, kedaulatan dan keamanan digunakan untuk meyakinkan Jakarta bahwa Aceh tidak aman dan separatisme akan kembali bangkit dalam bentuk yang lebih membahayakan.

Terlepas dari semua persoalan politik itu, masyarakat sipil yang telah merasakan nikmatnya menghirup udara perdamaian, menikmati bagaimana roda ekonomi kembali berputar dan suasana mencekam dan saling mencurigai mulai hilang, kini kembali resah. Tiga tahun belumlah sanggup untuk menghapus trauma akan kekerasan pada masa konflik. Berbagai program kemanusiaan dan perdamaian tidak cukup untuk menghapus kenangan tersebut, bahkan kenangan tersebut terkadang lebih kuat dari kepercayaan akan langgengnya perdamaian di Aceh.

“Es soll kein Friedensschlu für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden”, tidak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap absah apabila di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang di masa depan, demikian Immanuel Kant menegaskan salah satu butir syarat sebuah perdamaian abadi. Dalam konteks Aceh tidak ada pilihan lain, selain mempertahankan perdamaian. Hanya dengan mempertahankan perdamaian, semua pihak akan bisa mengambil pelajaran berharga dari Aceh. Pemilu 2009 diyakini adalah salah satu babakan penting dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh, hal ini bisa terwujud jika bisa dilewati dengan damai. Seluruh pihak sebaiknya melihat bahwa proses politik yang berlangsung di Aceh, termasuk keberadaan partai lokal adalah sebuah proses

pembelajaran bagi semua pihak, sebuah momentum emas untuk memikirkan ulang pola relasi antara pusat dan daerah, sebagai proses transisi politik GAM dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan demokratis, sebagai proses memenangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Hanya dengan itu, dan hanya dengan kebesaran hati seperti itu Aceh tidak akan memisahkan diri dari republik, dan kemudian Seulawah keempat bisa diselamatkan.

Belajar Dari Aceh

Buah Dari Perdamaian

Masyarakat selalu bertransformasi melalui dua peristiwa pokok, konflik dan konsensus, setidaknya itulah yang diyakini Dahrendorf (1959). Konflik selalu muncul ketika ada ketidakpuasan terhadap sebuah konsensus, begitupun konsensus akan selalu hadir sebagai jawaban atau minimal solusi sementara atas konflik. Tampaknya Dahrendorf tidak percaya akan ada perdamaian abadi sebagaimana Kant mempercayainya. Namun Kant menyebutkan satu prasyarat penting demi tercapainya perdamaian abadi, "tidak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap absah apabila di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang di masa depan".

Jika meletakkan Aceh dalam konteks dua pemikir di atas, maka perjanjian damai (memorandum of understanding-MoU) yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, harusnya dipertahankan oleh semua pihak. Jika melirik Dahrendorf, maka MoU Helsinki harus dilihat sebagai konsesi yang bersifat sementara, dan karenanya harus diletakkan dalam konteks masa transisi. Karena Kant mensyaratkan bahwa tidak boleh ada maksud tersembunyi, maka seluruh pihak sebaiknya menghindari ketertutupan satu sama lain.

Terlepas dari akan abadi atau tidaknya perdamaian di Aceh, namun setelah empat tahun berlalu, perdamaian telah membawa angin perubahan di Aceh. MoU Helsinki setidaknya telah meletakkan pondasi dan struktur dasar pembangunan demokrasi dan kesejahteraan di Aceh. Beberapa hal fundamental diatur dalam MoU Helsinki, yang kemudian diadopsi menjadi pasal-pasal dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Beberapa hal diantaranya adalah dibolehkannya calon independen (non partai) untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah (propinsi dan kabupaten), dan juga untuk pertamakalinya partai lokal (Parlok) diperkenankan untuk berdiri. Dua hal ini merupakan alternatif yang secara legal disediakan untuk mengatasi keterbatasan hukum nasional. Disahkannya UUPA juga akhirnya mengatasi kekhawatiran Darhendrof dan Kant, UUPA mampu mengangkat MoU Helsinki dari sekedar kesepakatan damai menjadi norma hukum yang secara sah diakui negara. Selain itu UUPA juga diyakini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah, ketimbang kewenangan yang diberikan oleh UU otonomi khusus dan UU otonomi daerah.

Di level nasional, proses perdamaian Aceh memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. Perdamaian ini efektif mengubah citra Indonesia di kancah pergaulan internasional. Belum pernah kita melihat apresiasi internasional yang begitu tinggi. Citra Indonesia yang buruk dalam penegakan HAM, menjadi berubah. Bahkan SBY-JK sempat masuk daftar kandidat peraih nobel perdamaian. Indonesia kembali diterima dan terlibat aktif dalam pergaulan internasional dan berbagai upaya menciptakan perdamaian dunia.

Politik Aceh: Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Legislatif

Pilkada langsung di Aceh mengantar pasangan Irwandi Yusuf seorang mantan tokoh GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

dan Muhammad Nazar, seorang aktivis SIRA (Sentra Informasi untuk Referendum Aceh) menjadi gubernur dan wakil gubernur. Momentum ini membuka ruang politik di level nasional, sehingga pada tahun 2008, calon independen diperkenankan bertarung dalam pilkada di seluruh Indonesia.

April 2009, enam partai lokal di Aceh resmi ikut dalam pemilu legislatif. Partai Aceh (PA) akhirnya memenangkan pemilu dengan merebut 34 kursi (48%) dari 69 kursi DPR Aceh. Di seluruh kabupaten/kota PA meraup 235 kursi, dengan unggul di 15 kabupaten/kota. Partai lokal lain juga mendapatkan kursi, meski tidak sebanyak PA. Yang menarik adalah institusionalisasi ideologi di tubuh partai bisa terjadi di Aceh, yang mana hal ini sangat sulit ditemukan di partai-partai nasional, terutama sejak era Soeharto hingga sekarang. Masyarakat Aceh bisa dengan mudah mengenali platform ideologi dan platform yang ditawarkan oleh partai lokal yang ada, sama mudahnya bagi mereka untuk mengenali suatu program partai rasional atau tidak. Selain karena popularitas tokoh beserta track record masa lalunya, masyarakat juga mengenali dengan baik kebutuhannya dan bagaimana cara memenuhinya. Sehingga pilihan politik menjadi lebih mudah, ketimbang memilih partai nasional yang bukan hanya jauh dari segi jarak, tapi juga karena watak partai yang seakan hanya di-remote dari Jakarta.

Ruang politik yang terbuka di Aceh memberi kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan akses menuju kekuasaan. Namun pada saat yang sama, orang yang duduk ditampuk kekuasaan juga mendapatkan kontrol yang ketat, hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat antara otoritas politik dan masyarakat.

Meletakkan Aceh Dalam Referensi Demokrasi Indonesia

Mungkin terlalu berlebihan jika menganggap dinamika politik lokal di Aceh akan menjadi model tradisi politik baru

di Indonesia. Namun setidaknya, pengalaman politik di Aceh memberi kita beberapa pelajaran berharga. Pertama, bahwa pengesahan UUPA adalah upaya perlakuan khusus yang ternyata memungkinkan untuk mempercepat akselerasi transformasi politik di level lokal. Kedua, kewenangan yang besar yang didapatkan Aceh hari ini bukanlah pemberian atas kebaikan hati negara, tapi merupakan negosiasi alot berpuluh-puluh tahun antara Aceh dan Jakarta. Tidak seperti kewenangan dalam UU otonomi daerah dan UU otonomi khusus, UUPA berhasil menghindari jebakan dekonsentrasi, dimana negara secara sengaja mengalihkan beberapa tanggungjawab administratif ke pemerintah lokal. Ketiga, kontestasi politik elektoral di level lokal yang diwarnai oleh kehadiran partai lokal, ternyata tidak menimbulkan sengketa politik berkepanjangan seperti yang terjadi pada beberapa pilkada di daerah lain. Hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat antara partai politik (termasuk elit partai) dan konstituen massa. Sehingga sengketa politik yang muncul bisa dinegosiasikan secepat mungkin. Keempat, kehadiran partai lokal ternyata tidak secara otomatis mematikan partai nasional, terbukti dalam pemilu April 2009, Partai Demokrat dan Golkar berada diposisi kedua dan ketiga setelah PA. Namun partai lokal justru memberikan peringatan kepada partai nasional untuk seserius mungkin mengurus persoalan lokal. Kelima, gerakan sosial di Aceh semakin mudah memainkan peran sebagai kekuatan alternatif diluar prosedur formal demokrasi. Wilayah kerja yang tidak begitu luas menjadikan gerakan sosial lokal menjadi mudah untuk menemukan identitas-identitas kolektif dan merebut ruang politik. Isu yang diusung oleh gerakan sosial kemudian tidak mengawang-awang dan susah dimengerti, karena gerakan sosial lokal dituntut untuk mampu menemukan inovasi yang berpijak pada realitas sosial yang ada. Di Aceh seluruh teori-teori yang rumit diuji dalam tindakan praktis.

Enam hal diatas setidaknya membuat para penganut konservatisme politik menjadi tersentak, ternyata alternatif-alternatif masih tersedia untuk menjawab kebuntuan tradisi politik nasional yang sangat oligarkis dan sentralistik. Kaum konservatif bisa saja berapologi bahwa Aceh adalah wilayah yang secara demografis, geografis dan sosial berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Justru dari pendirian seperti itulah kita berpijak, kebhinekaan Indonesia adalah keragaman demografis, geografis dan juga sosial. Untuk itu maka pendekatan yang sentralistik dari Jakarta tidak lagi relevan untuk diterapkan. Fakta bahwa di Aceh berlaku kekhususan-kekhususan, bukanlah alasan untuk tidak melihat Aceh sebagai salah satu referensi praktek demokrasi lokal yang berhasil. Mungkin terlalu dini untuk menyebut ini berhasil, namun sebuah teori tidaklah harus menunggu beratus-ratus tahun untuk dirumuskan. Bagaimanapun politik adalah proses, sehingga terlalu naif untuk mengabaikan dinamika lokal yang sedang terjadi di Aceh. Kita membutuhkan banyak rujukan yang bukan hanya tumpukan-tumpukan teori, tapi juga fakta-fakta empirik, dan Aceh sudah memulainya.

Menata Ulang Politik Nasional: Memulai Dari Lokal

Apa yang terjadi di Aceh sebenarnya juga merupakan fenomena global, John Harris dkk. menyebutkan, "lokalisasi politik telah terbukti menjadi produk modernitas dan menjadi bagian integral globalisasi dan restrukturisasi negara-bangsa yang diasosiasikan" Lalu apa kontribusi praktek politik lokal terhadap kemajuan demokrasi nasional? Pratchet (2004) menegaskan bahwa demokrasi lokal tidak hanya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, tetapi juga membangun semangat partisipatoris dalam masyarakat. Pratchet menggariskan bahwa

tanpa adanya demokrasi lokal, peluang untuk mengembangkan norma, nilai dan keterampilan berdemokrasi pada skala yang lebih luas akan menjadi sangat terbatas. Pada titik inilah praktek demokrasi lokal menemukan signifikansi dan kontribusi positifnya pada tradisi politik nasional.

Bukan tidak penting berbicara tatanan *high politics* nasional. Namun perlu juga untuk mengalihkan perhatian sejenak ke perkembangan dan potensi demokrasi di tingkat lokal. Lokal bukanlah semua yang berbau tradisional, feodal dan kolonial, tapi juga merupakan pilar-pilar utama kebhinekaan bangsa Indonesia. Pun para pengamat politik kontemporer di negara-negara Eropa sedang giat mengembangkan new localism, sebab sejarah panjang Eropa mengajarkan bagaimana mekanisme demokrasi dan politik di level lebih rendah mampu bertahan dalam berbagai terpaan krisis, baik ekonomi maupun perang. Bukan hanya alternatif politik, tapi juga berbagai alternatif yang lebih teknis seperti model pembangunan, sistem kesejahteraan dan modal sosial hanya bisa ditemukan di level lokal. Ini bukan hanya tugas akademisi atau praktisi politik, tapi juga tugas mereka yang menyatakan diri sebagai aktivis gerakan sosial untuk ikut mengisi ruang-ruang lokal ini, sambil belajar bagaimana menata kembali gerakan mereka di level nasional. Akhirnya, tradisi demokrasi Indonesia tidak perlu mencontek tradisi demokrasi model Eropa atau Amerika atau negara manapun, tapi menemukan sendiri model demokrasi, tradisi politik dan konsep kesejahteraannya. Mulai dari sesuatu yang jauh terpencil, mulai dari lokal.

Hasan Tiro: Ingatan Bagi Bangsa Yang Bebal

Sampai hari ini sudah lebih setahun lamanya Tuan memegang kendali pemerintahan atas tanah air dan bangsa kita. ... Tuan tidak mempergunakan kekuasaan yang telah diletakkan di tangan Tuan itu

untuk membawa kemakmuran, ketertiban, keamanan, keadilan dan persatuan di kalangan bangsa Indonesia. Sebaliknya Tuan telah dan sedang terus menyeret bangsa Indonesia ke lembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpecahan, dan perang saudara.

Demikianlah penggalan surat yang ditulis oleh Hasan Di Tiro dari New York pada tanggal 1 September 1954. Surat ini ditujukan kepada Ali Sastroamidjojo yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Waktu itu Hasan Tiro bekerja sebagai staf perwakilan Indonesia di PBB. Pada saat yang sama, dia juga belajar di University of Columbia di New York, Amerika Serikat. Surat ini merupakan reaksi atas operasi penumpasan Tentara Islam Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Sejak itu Hasan Tiro terus melawan upaya penumpasan paksa oleh Republik. Hasan Tiro pernah memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia agar menempuh upaya damai.

Persoalan yang dihadapi Indonesia bukan tidak bisa dipecahkan, tetapi Tuanlah yang mencoba membuatnya menjadi sukar. Sebenarnya jika Tuan mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini dengan jalan semestinya, yakni perundingan, maka besok hari juga keamanan dan ketenteraman akan meliputi seluruh tanah air kita.

Demikianlah bunyi surat yang ditulisnya kepada PM Ali Sostramidjojo, namun tidak pernah mendapat respon serius dari pemerintah Indonesia. Hingga akhirnya 4 Desember 1976, dia mendeklarasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Hasan Tiro: Modernisasi Strategi Melawan Republik

Berbeda dengan pendahulunya Tgk. Daud Beureueh, Hasan Tiro berbekal pendidikan modern membangun GAM dengan

organisasi yang lebih disiplin. Memperketat rekrutmen, strategi gerilya yang modern, doktrin pasukan dan platform tempur yang jelas, serta desentralisasi kepemimpinan dalam struktur GAM. Ada dua hal yang menarik dari Hasan Tiro, pertama, dia membagi GAM dalam dua struktur, yakni GAM sebagai kekuatan politik negara, hal ini dipimpinnya sendiri sebagai Wali Nanggroe (pemimpin negara). Dalam konteks ini, perjuangan politik Aceh sebagai 'negara' dikontrol melalui struktur pemerintahan sipil yang dikendalikan dari Swedia. Kedua, GAM sebagai kekuatan militer yang dikenal dengan nama TNA (Teuntra Neugara Aceh/Aceh Nasional Army) yang dipimpin oleh panglima perang dengan rantai komando militer modern. TNA mendapat kepercayaan penuh untuk melakukan pertempuran di Aceh, namun keputusan-keputusan politik hanya bisa dilakukan oleh Wali Nanggroe di Swedia.

Strategi ini memberi energi perjuangan yang besar terhadap GAM, kemungkinan untuk pembelotan dan pengkhianatan pasukan sangat minim, kalupun ada tidak akan mempengaruhi posisi politik GAM. Desentralisasi kepemimpinan membuat pasukan GAM tidak mudah dipukul mundur hanya dengan menangkap atau membunuh pimpinan pasukannya, sebagaimana beberapa kali terjadi ketika DI/TII dibawah Tgk. Daud Beureueh. Dalam beberapa insiden penembakan terhadap panglima GAM, hal ini tidak mempengaruhi struktur pasukan secara keseluruhan. Keputusan politik yang dikendalikan dari Swedia membuat pemerintah RI kesulitan dalam meruntuhkan kekuatan politik GAM, kemungkinan tindakan infiltrasi menjadi percuma karena pasukan GAM di Aceh tidak berhak mengambil keputusan politik.

Patriotisme di Mata Hasan Tiro

Sejak berdirinya Gerakan Aceh merdeka, atas usul Teungku Daud Beureueh pada tanggal 28 Mei 1977, Hasan Tiro diangkat

menjadi Wali Nanggroe untuk menjalankan pemerintahan Republik Islam Aceh (RIA). Perlawanan gerilya terus menerus dilakukan oleh GAM, konflik berkecamuk di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur yang merupakan basis gerilya GAM. Pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan satuan pasukan elit KOPASSUS dengan sandi Operasi Jaring Merah pada tahun 1989, sebuah operasi intelijen untuk menemukan dan menghancurkan unit-unit gerilya GAM. Pada bulan Juli 1989 Soeharto memerintahkan untuk mengirim 6000 personel tambahan, termasuk 2 batalyon KOPASSUS. Sejak saat itu Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Belum pernah selama dunia berkembang, tidak walaupun di masa penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa bunuh membunuh antara sesama saudaranya secara yang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang sedang Tuan paksakan di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan..... Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan telah memperbuat semua ini atas nama persatuan nasional dan patriotisme. Rasanya tidak ada suatu contoh yang lebih tepat dari pepatah yang mengatakan bahwa patriotisme itu adalah tempat perlindungan yang terakhir bagi seorang penjahat.

Bagi Hasan Tiro, patriotisme dan nasionalisme adalah sesuatu yang berbahaya jika berada ditangan orang yang salah. DOM yang mengorbankan banyak sekali jiwa rakyat Aceh, benar-benar melukai seorang Hasan Tiro. Patriotisme adalah jalan bagi kaum yang kalap, patriotisme tanpa nilai luhur kemanusiaan adalah barbarianism.

Terhitung sejak Aceh menyatakan melawan Republik, sudah lima kali perjanjian damai diupayakan. Ikrar Lam Teh,

Ikrar Blangpadang, Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh (JUHP), Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) dan terakhir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Konflik dan perdamaian seakan siang dan malam yang berganti, seperti pepatah orang Aceh “Pat Ujeun Nyang Hana Prang, Pat Prang Nyang Hana Reuda,” tidak ada hujan yang tak reda dan tak ada perang yang tak berakhir.

Begitulah hingga pada 15 Agustus 2005, kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM ditandatangani di Helsinki. Hasan Tiro mendukung penuh proses perdamaian tersebut. Ribuan anggota GAM kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Kembali Ke Kampung Azali

Pada tanggal 11 Oktober 2008, Wali Nanggroe itu menginjakkan kakinya pertama kali di bumi Kutaradja (Banda Aceh). Ratusan ribu masyarakat menyambut kembalinya Hasan Tiro, berharap akan ada mukjizat baru yang akan datang atau setidaknya akan ada titah baru dari mulut sang Wali. Namun yang tiba hanyalah tubuh ringkih dengan tangan yang melambai, namun kharismanya begitu kuat memancar. Rasanya belum ada sambutan yang begitu meriah untuk seorang tokoh di Indonesia, bukan sekedar banyaknya orang yang hadir, namun getaran emosi orang banyak menggema dalam adzan yang menyambutnya di Bandar Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Hasan Tiro bersujud mencium bumi kelahirannya setelah 30 tahun lebih mengasingkan diri ke Swedia.

Kabar duka itu tiba pukul 12.15 WIB, seorang kawan dari Partai Aceh mengabarkan wafatnya Sang Wali Nanggroe. Dia telah kembali, tepat sehari setelah pemerintah Republik Indonesia

mengabulkan permohonannya untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kepergiannya seakan ingin mengatakan pada pemerintah Indonesia, mengapa tidak dari dulu kita berdamai? Dalam suratnya September 1954, tepat di bulan kelahirannya, dia menulis “Sebenarnya jika Tuan mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini dengan jalan semestinya, yakni perundingan, maka besok hari juga keamanan dan ketenteraman akan meliputi seluruh tanah air kita.” Pemerintah Indonesia harusnya menganugerahi Hasan Tiro gelar pahlawan nasional, karena “perjuangan”-nya telah menjadi pengingat bagi demokrasi Indonesia, betapa berbahayanya kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak dikontrol, dia menginginkan kedaulatan dan kesejahteraan sebagai tujuan bernegara, tanpa kesejahteraan orang banyak, maka Negara tidak berguna.

Kini sang Wali itu telah pergi, dia benar-benar kembali, kembali ke semua yang azali. Kembali ke kampung halaman, kembali ke pangkuan Negara yang dulu pernah dibelanya. Kembali ke kedamaian, kembali pada Allah sang pemilik kehidupan, kembali ke keabadian. Selamat jalan Syuhada.

Dia meninggalkan pada kita semua, sebuah pelajaran berharga, bahwa kemerdekaan dan rasa berdaulat, tidaklah bisa dipertukarkan dengan apapun. Jika rasa itu terkoyak, maka sembahpun akan meninggalkan bekas. Pelan-pelan luka itu telah mengering, dia pergi dalam kedamaian. Tinggallah kita menjaga perdamaian ini, menjaga luka itu tak lagi terkoyak oleh ketidakadilan.

Tentang Penulis

Prof. Bob Sugeng Hadiwinanta, Ph.D., adalah Guru Besar dalam Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Mendapat gelar sarjana dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; gelar Master of Arts (MA) dari Department of International Relations, Monash University, Australia; dan gelar doktor (Ph.D.) dari Faculty of Social and Political Sciences, King’s College, Cambridge University, Inggris. Dia adalah Georg Forster Research Fellow di bawah Alexander von Humboldt Foundation, Jerman. Telah mempublikasi ratusan makalah, artikel, dan buku. Karya tulis yang pernah dipublikasikan, antara lain, adalah *The Politics of NGOs in Indonesia* (London: RoutledgeCurzon, 2003); ‘The 2004 Parliamentary and Presidential Elections in Indonesia’. Dalam Aurel Croissant and Beate Martin (eds.) *Between Consolidation and Crisis: Elections in Five Nations in Southeast Asia* (Berlin: Lit Verlag, 2006); *Democracy in Indonesia: the Challenge of Consolidation* (co-edited with Christoph Schuck) (Munich: Nomos, 2007), ‘From Violence to Voting: Post-Conflict Settlement and Democratization in Aceh’. Dalam Eva Streifeneder dan Antje Missbach (eds.). *Indonesia: the Presence of the Past*. Berlin: Regio Spectra, 2007), ‘From Heroes to Trouble Makers: Civil Society and Democratization in Indonesia’. In Marco Buente and Andreas Ufen (eds.). *Democracy in Post-Suharto Indonesia* (London: Routledge, 2009), and ‘International Relations in Indonesia’ in *International Relations of the Asia Pacific*. Vol.9, No.1, 2009. Turut merancang Modul dan melaksanakan pelatihan Demokrasi dan Peningkatan Kapasitas Politik di Aceh, sejak 2006. Tahun

2003 - sekarang menjadi koordinator penelitian bersama OXFAM-Inggris tentang “*The Challenges and Prospects of Fair Trade Campaign in Indonesia*” dan Anggota Aceh study Group, East-West Center, Washington Amerika Serikat.

Linda Christanty. Sastrawan-cum-wartawan kelahiran Bangka. Pada 1998, tulisannya berjudul “Militerisme dan Kekerasan di Timor Leste” meraih penghargaan esai terbaik hak asasi manusia. Kumpulan cerita pendeknya “Kuda Terbang Maria Pinto” memperoleh penghargaan Khatulistiwa Literary Award 2004. Petikan novelnya tentang konflik politik dan tsunami di Aceh “Tongkat Sultan” telah diadaptasi dalam opera modern dan dipentaskan dalam pertemuan World PEN di Tokyo, Februari 2008. Cerita pendeknya yang berlatar belakang politik 1965, “Makan Malam”, menjadi bahan matapelajaran bahasa Indonesia di SMA seluruh negara bagian New South Wales, Australia. Karyanya yang terbaru adalah “Dari Jawa Menuju Atjeh” (2009) dan Kumpulan cerita pendek berjudul “Rahasia Selma” diterbitkan tahun 2010. Dia sempat bekerja sebagai redaktur majalah kajian media dan jurnalisme Pantau (2000-2003), kemudian menulis drama radio bertema transformasi konflik untuk Common Ground Indonesia (2003-2005). Sejak akhir 2005, dia memimpin kantor feature Pantau Aceh di Banda Aceh.

Mangadar Situmorang, Ph.D. Sejak 1990, dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dia juga menjabat sebagai salah satu Direktur di Parahyangan Centre for European Studies (PACES) . Memiliki ketertarikan terhadap kajian tentang konflik dan penyelesaiannya, dan Studi doktoral yang telah siselesaikannya di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Teknologi Curtin, Perth, Australia mengambil tema: Intervensi Kemanusiaan Internasional dalam Konflik Antarnegara dengan Studi Kasus Timor Leste, Ambon dan Aceh. Menyelesaikan

Sarjana (S1) dan Master (S2) nya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pius Sugeng Prasetyo, Ph.D. Sejak 1991 menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Lahir di Yogyakarta, 3 September 1964. Menyelesaikan S1 dari FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1989 , Master (S2) FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, Jurusan Administrasi dan Kebijakan Publik, 1994, dan Doctoral (Ph.D) Sozial und Kulturwissenschaften - Institut für Politikwissenschaft, Justus – Liebig – Universität Giessen – Germany, 2005. Telah melakukan banyak penelitian dan menulis buku yang antara lain : Restrukturisasi Institusi Lokal, Bappenas, *Village Democracy in Indonesia*. Dari tahun 2002 sampai saat ini, menjadi dosen tamu (summer course) di Institut für Politikwissenschaft, Giessen Jerman. Tim Pembuat Modul dan menjadi Narasumber/Trainer, Pelatihan Demokrasi dan HAM Tingkat Dasar dan Lanjutan di Aceh.

Saiful Haq, Lahir di Makassar – Sulawesi Selatan, 12 Mei 1975. Mendapatkan gelar Master of Defence and Security Management dari Defense Study ITB bekerjasama dengan Cranfield University UK. Memulai karir sebagai aktivis pro demokrasi dengan mengikuti berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Tahun 2002-2005 aktif sebagai pegiat Hak Asasi Manusia dan aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Tahun 2005-2006 bekerja sebagai Program Manager untuk Center for Security Sector Management (CSSM) Cranfield University UK Kantor Asia. Tahun 2007-2008 menjadi peneliti tamu di Justus Liebig University Giessen Jerman. Beberapa karya yang sudah dipublikasikan diantaranya, Conflict And Peace Dynamics, DDR Process in Aceh, “*Assessing the Process of Supporting the Peace Sustainability*”. Institut Teknologi Bandung-Cranfield University

UK (2007); Keamanan Insani “Paradigma Baru Pembangunan Aceh dalam Sektor Keamanan, Pembangunan dan Demokrasi”. 2007. AJMI dan HivoS Belanda (2007); “DDR Programme in Aceh Indonesia 2005-2006”, Cranfield University UK, CSSM Case Study Series, 2006; “Alternative of Defense Acquisition and Budgeting in Indonesia”, ITB and International NGO Forum for Indonesia Development-INFID (2007); Keamanan Insani, “Paradigma Baru Sektor Keamanan”, VHR-DFID (2008); *Early Warning System* Dalam Issue Keamanan Insani, (2008). Kini bekerja sebagai Program Officer di Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia, juga aktif sebagai Menteri PDT Kabinet Indonesia Muda (KIM).

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D. Sejak 1993, Dosen di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dan dari 2007 sampai sekarang menjadi Ketua Departemen Hubungan Internasional dan Peneliti Parhyangan Center for International Studies. Menyelesaikan Sarjana (S1) Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Gadjah mada Yogyakarta, Master (S2) Monash University Australia dan Ph.D (S3) dari Leeds University Inggris. Tim Pembuat Modul dan menjadi Narasumber/Trainer, Pelatihan Demokrasi dan HAM Tingkat Dasar dan Lanjutan di Aceh, serta Tim Perumus Penyusunan Modul Pendidikan Politik Perempuan LINA (Liga Inong Aceh). Menulis dan menjadi kontributor/editor beberapa buku diantaranya : *Political Parties and General Elections in Post Subarto Indonesian Politics*, dalam buku Challenges for Democracy in Indonesia, 2007; Transformasi dalam studi Hubungan Internasional, 2007; Pekerjaan Partai dalam Partai Partai Sosial Demokrat.